



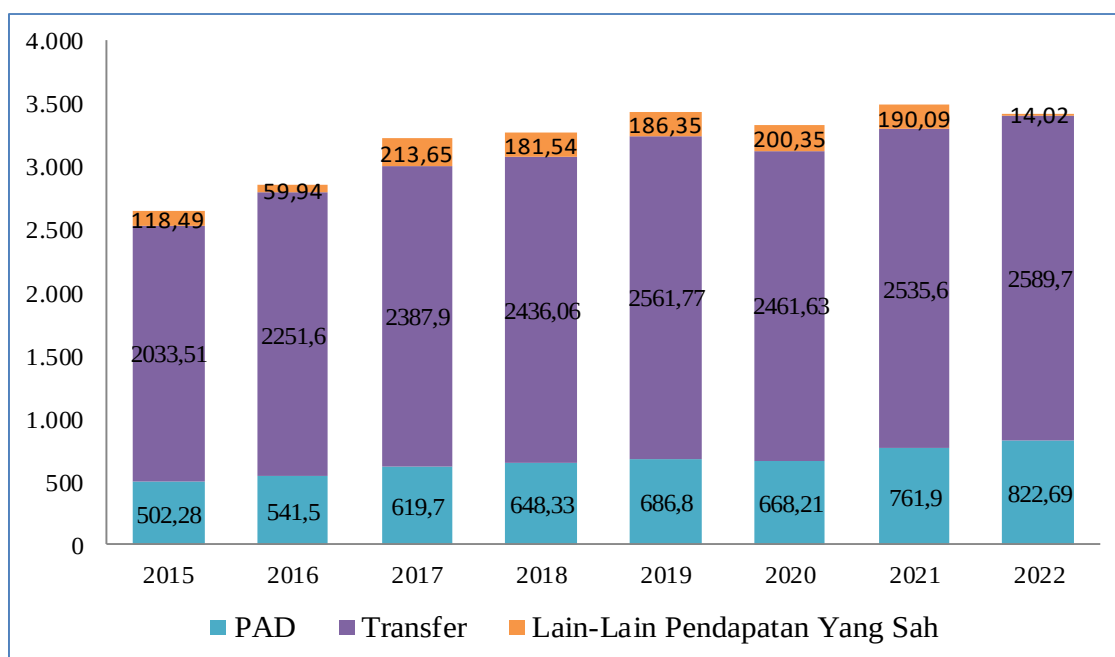
BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2022 terealisasi sebesar Rp3.426.408.181.663,84 atau mencapai 97,34 persen dari target APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp3.519.947.807.708,00. Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp61.314.718.746,16 atau turun 1,76 persen jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp3.487.722.900.410,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp822.685.992.141,84; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.589.697.751.952,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14.024.437.570,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2015 disajikan pada grafik berikut:

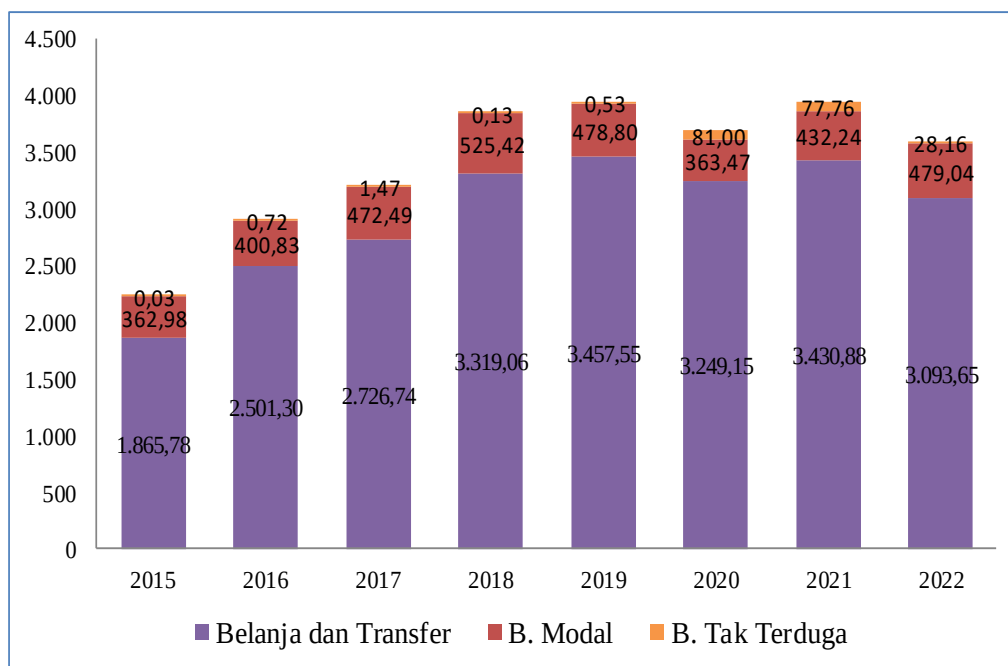


Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2015-2022

Belanja dan Transfer pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp3.600.847.367.173,00 atau 91,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp3.956.268.992.204,00. Belanja dan Transfer TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp169.963.081.020,00 atau naik 4,95 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.430.884.286.153,00.



Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.444.173.455.628,00; Belanja Modal sebesar Rp479.036.065.598,00; dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp28.163.884.848,00 serta Transfer sebesar Rp649.473.961.099,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2015 disajikan pada grafik berikut:



Grafik Perkembangan Realisasi Belanja TA 2015-2022

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.426.408.181.663,84 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.951.373.406.074,00 serta Transfer sebesar Rp649.473.961.099,00 maka terdapat defisit anggaran pada TA 2022 sebesar Rp174.439.185.509,16. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2022 adalah sebesar Rp436.945.123.266,00, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp486.691.123.266,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.746.000.000,00. Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini:

A. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp3.426.408.181.663,84 yang berarti mencapai 97,34 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.519.947.807.708,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rekapitulasi total anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.A, rekapitulasi anggaran Pembiayaan TA 2022 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran



V.1.B, dan rekapitulasi anggaran Pendapatan TA 2022 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.C.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2021
Pendapatan - LRA					
Pendapatan Asli Daerah	864.151.372.260,00	822.685.992.141,84	95,20	761.991.440.173,00	7,97
Pendapatan Transfer	2.645.583.354.052,00	2.589.697.751.952,00	97,89	2.535.638.088.327,00	2,13
Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	190.093.371.910,00	(92,62)
	3.519.947.807.708,00	3.426.408.181.663,84	97,34	3.487.722.900.410,00	(1,76)

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD pada TA 2022 adalah sebesar Rp822.685.992.141,84 yang berarti mencapai 95,20 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp864.151.372.260,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 beserta realisasinya disajikan pada lampiran V.2.

Realisasi PAD pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp822.685.992.141,84 dan Rp761.991.440.173,00. Pada TA 2022, terjadi kenaikan realisasi PAD sebesar Rp60.694.551.968,84 atau naik 7,97 persen jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada TA 2021.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun
Pendapatan Asli Daerah:					
Pajak Daerah	307.546.471.000,00	267.236.064.377,00	86,89	222.525.782.288,00	20,09
Retribusi Daerah	22.493.656.435,00	26.130.786.681,00	116,17	23.687.898.823,00	10,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.000.000.000,00	21.801.615.649,00	103,82	15.507.581.925,00	40,59
Lain-lain PAD yang Sah	513.111.244.825,00	507.517.525.434,84	98,91	500.270.177.137,00	1,45
	864.151.372.260,00	822.685.992.141,84	95,20	761.991.440.173,00	7,97



a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp267.236.064.377,00 atau mencapai 86,89 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp307.546.471.000,00. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp267.236.064.377,00 dan Rp222.525.782.288,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2022 lebih tinggi Rp44.710.282.089,00 atau bertambah 20,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2022 serta realisasi TA 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah:	2022			2021		(Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		dari TA 2021 (%)
Pajak Hotel	11.500.000.000,00	11.691.202.409,00	101,66	6.661.447.114,00		75,51
Pajak Restoran	65.166.838.975,00	30.341.525.352,00	46,56	19.573.620.505,00		55,01
Pajak Hiburan	3.305.132.025,00	3.745.164.050,00	113,31	663.337.982,00		464,59
Pajak Reklame	4.000.000.000,00	4.446.084.050,00	111,15	3.234.454.505,00		37,46
Pajak Penerangan Jalan	79.000.000.000,00	79.981.345.497,00	101,24	69.076.634.126,00		15,79
Pajak Parkir	1.850.000.000,00	1.954.749.591,00	105,66	1.067.145.250,00		83,18
Pajak Air Tanah	1.550.000.000,00	1.516.529.774,00	97,84	1.535.813.859,00		(1,26)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000,00	7.932.886.217,00	79,33	7.642.314.183,00		3,80
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	75.174.500.000,00	64.804.027.332,00	86,20	60.600.524.027,00		6,94
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.000.000.000,00	60.822.550.105,00	108,61	52.470.490.737,00		15,92
	307.546.471.000,00	267.236.064.377,00	86,89	222.525.782.288,00		20,09

Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan periode 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan penerimaan pada TA 2021. Peningkatan tersebut dapat dicapai karena mulai meningkatnya konsumsi pada sektor perhotelan, restoran, hiburan, parkir, dan sebagainya. Peningkatan penggunaan dari



beberapa sektor tersebut disebabkan karena mulai menurunnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp26.130.786.681,00 atau mencapai 116,17 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.493.656.435,00.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut.

Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp26.130.786.681,00 dan Rp23.687.898.823,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 lebih tinggi Rp2.442.887.858,00 atau naik 10,31 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021. Anggaran dan realisasi pada TA 2022 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah:	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	126.730.500,00	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	97.288.000,00	(100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.215.800.000,00	81,05	787.236.000,00	54,44
Retribusi Pelayanan Pasar	4.650.000.000,00	5.865.677.722,00	126,14	4.050.469.207,00	44,81
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.100.000.000,00	1.225.760.000,00	111,43	905.510.000,00	35,37
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	125.850.000,00	125,85	99.650.000,00	26,29
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	375.000.000,00	389.454.500,00	103,85	372.592.500,00	4,53
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000,00	1.870.838.000,00	103,94	1.682.833.700,00	11,17
	9.525.000.000,00	10.693.380.222,00	112,27	8.122.309.907,00	31,65
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.716.156.435,00	4.437.484.886,00	119,41	4.722.142.016,00	(6,03)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	388.375.000,00	-	-	-
Retribusi Terminal	700.000.000,00	1.284.978.200,00	183,57	767.206.500,00	67,49
Retribusi Tempat Khusus Parkir	111.628.000,00	1.032.969.000,00	925,37	824.663.200,00	25,26
Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000,00	200.111.000,00	66,70	166.588.000,00	20,12
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	918.372.000,00	915.707.000,00	99,71	4.647.556.000,00	(80,30)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	330.000.000,00	221.424.650,00	67,10	108.469.000,00	104,14
	6.076.156.435,00	8.481.049.736,00	139,58	11.236.624.716,00	(24,52)
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.830.000.000,00	6.840.041.723,00	100,15	4.158.600.800,00	64,48
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	27.500.000,00	48.500.000,00	176,36	19.500.000,00	148,72
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000.000,00	49.575.000,00	141,64	65.025.000,00	(23,76)
Retribusi Perpanjangan IMTA	-	18.240.000,00	-	85.838.400,00	(78,75)
	6.892.500.000,00	6.956.356.723,00	100,93	4.328.964.200,00	60,69
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	22.493.656.435,00	26.130.786.681,00	116,17	23.687.898.823,00	10,31



Berikut penjelasan mengenai pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022:

1) Retribusi Jasa Umum

Merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

- a) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan, tidak terdapat realisasi di TA.2022 dikarenakan sudah menjadi pendapatan BLUD.
- b) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.215.800.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp428.564.000,00 atau naik 54,44 persen dari realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2021 sebesar Rp787.236.000,00. Selain itu, realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga mencapai 81,05 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00, karena pandemi *covid* sudah mulai menurun sehingga kegiatan masyarakat sudah mulai normal;
- c) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp5.865.677.722,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinperindag Rp5.766.212.722,00 dan Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp99.465.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 naik sebesar Rp1.815.208.515,00 atau naik 44,81 persen dari Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 sebesar Rp4.050.469.207,00, dikarenakan TA 2022 retribusi dilaksanakan dari awal tahun sampai akhir tahun (Januari-Desember) sedangkan di tahun 2021 dilaksanakan mulai bulan Mei sampai bulan Desember 2021;
- d) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.225.760.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp320.250.000,00 atau naik 35,37 persen dari TA 2021 sebesar Rp905.510.000,00 dan mencapai 111,43 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.100.000.000,00 yang disebabkan pandemi *covid* sudah mulai menurun sehingga kegiatan masyarakat sudah mulai normal;
- e) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp125.850.000,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinperkim. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp26.200.000,00 atau naik 26,29 persen dari realisasi TA



2021 sebesar Rp99.650.000,00, karena adanya sosialisasi terkait penyediaan mobil penyedotan kakus yang dikelola oleh UPTD, sehingga meningkatkan penggunaan layanan mobil sedot kakus;

- f) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebesar Rp389.454.500 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.862.000,00 atau naik 4,53 persen dari TA 2021 sebesar Rp372.592.500,00;
 - g) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.870.838.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp188.004.300,00 atau naik 11,17 persen dari TA 2021 sebesar Rp1.682.833.700,00, yang disebabkan karena adanya kenaikan jumlah Menara Telekomunikasi.
- 2) **Retribusi Jasa Usaha**
 Merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- a) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.437.484.886,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas), pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	Realisasi (Rp)
Kecamatan Sumpiuh	727.674.580,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	672.987.921,00
Kecamatan Purwokerto Timur	615.462.260,00
Dinas Pekerjaan Umum	611.347.400,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	475.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara	451.206.714,00
Kecamatan Purwokerto Barat	435.206.563,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142.785.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.880.048,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	61.557.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	50.681.400,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.200.000,00
Dinas Pendidikan	22.771.500,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	14.600.000,00
Kecamatan Ajibarang	12.000.000,00
Sekretariat Daerah	1.600.000,00
Kecamatan Tambak	1.000.000,00
Kecamatan Somagede	924.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000,00
Jumlah	4.437.484.886,00



Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 melebihi target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar 119,41 persen. Realisasi pada TA 2022 adalah sebesar Rp4.437.484.886,00 mengalami penurunan Rp284.657.130,00 atau 6,03 persen dari TA 2021 sebesar Rp4.722.142.016,00 karena :

1. Dinas Perikanan dan Peternakan :
 - Tahun 2022 sekitar lingkungan UPT BPBAT sudah banyak bermunculan kios penjual ikan dengan harga lebih rendah sehingga menjadi pesaing dalam penjualan dan pembeli benih memilih ke UPR yang dekat dengan rumah/kolam;
 - Tahun 2022 tidak ada yang menyewa karena kondisi bangunan dan kolam rusak serta tidak ada dana rehabilitasi.
 2. Dinas Pendidikan :
 - Pembayaran Sewa Rumah Dinas bulan Agustus 2022 - Desember 2022 SDN Bentul-Kec. Kebasen, untuk rumah dinas di sekolah yang lain banyak yang sudah tidak ditempati lagi, karena kondisinya kebanyakan sudah rusak berat;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :
 - Tahun 2022 untuk Pendapatan UPT Lokawisata Baturraden Triwulan I sebesar Rp1.824.315.000,00 sudah terakumulasi sebagai pendapatan BLUD Pariwisata, sehingga masih tersisa sebesar Rp900.482.000,00 sebagai pendapatan objek wisata yang dikelola oleh Dinporabudpar;
 - Realisasi pendapatan Dinporabudpar atas retribusi atas penyewaan tanah dan bangunan Tahun 2022 mengalami penurunan karena pendapatan UPT Lokawisata Baturraden sudah diakui sebagai pendapatan BLUD Pariwisata.
- b) Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan penerimaan pendapatan retribusi baru pada TA 2022 melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp388.375.000,00;
- c) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp1.284.978.200,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Terminal pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp517.771.700,00 atau naik 67,49 persen dari TA 2021 sebesar Rp767.206.500,00. Hal ini sebabkan pandemi covid sudah mulai menurun sehingga kegiatan masyarakat sudah mulai normal;
- d) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.032.969.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar dan Dinperindag, masing-masing sebesar Rp98.628.000,00 dan Rp934.341.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp208.305.800,00 atau naik 25,26 persen dari realisasi Retribusi



Tempat Khusus Parkir pada TA 2021 sebesar Rp824.663.200,00. Hal ini terjadi TA 2022 terdapat kenaikan pada nominal perjanjian parkir dengan Pihak Ketiga;

- e) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp200.111.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinkanak. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami kenaikan sebesar Rp33.523.000,00 atau naik 20,12 persen dari TA 2021 sebesar Rp166.588.000,00. Hal ini disebabkan Tahun 2022 beberapa jagal sudah mulai kembali melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH). Selain itu Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2022 mencapai 66,70 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp300.000.000,00;
 - f) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp915.707.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar dan Kecamatan Banyumas. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.731.849.000,00 atau turun 80,30 persen dari TA 2021 sebesar Rp4.647.556.000,00. Namun demikian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar 99,70 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2022 Rp918.372.000,00. Hal ini terjadi karena TA 2022 Pendapatan UPT Lokawisata Baturraden Triwulan I sudah terakumulasi sebagai pendapatan BLUD Pariwisata.
 - g) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp221.424.650,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perikanan dan Peternakan. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp112.955.650,00 atau naik 104,14 persen dari TA 2021 sebesar Rp108.469.000,00. Hal ini disebabkan TA 2022 terdapat Pendapatan Retribusi Baru yang berasal dari Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terealisasi 67,10 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp330.000.000,00.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp6.840.041.723,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi IMB melalui DPMPTSP. Retribusi IMB mengalami peningkatan sebesar Rp2.681.440.923,00 atau naik 64,48 persen dari TA 2021 sebesar Rp4.158.600.800,00 yang terealisasi sebesar 100,15 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2022, hal ini disebabkan proses perizinan IMB baru berproses kembali pada awal Tahun 2022;



- b) Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp48.500.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui DPMPTSP. Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengalami peningkatan sebesar Rp29.000.000,00 atau 148,72 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp19.500.000,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terdapat beberapa pendirian tempat penjualan minuman beralkohol baru di Kabupaten Banyumas;
- c) Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp49.575.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui Dinas Perhubungan. Retribusi Ijin Trayek terealisasi sebesar 141,64 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan dan turun sebesar Rp15.450.000,00 atau 23,76 persen dari realisasi Retribusi Ijin Trayek pada TA 2021 sebesar Rp65.025.000,00. Hal ini disebabkan berkurangnya angkutan yang melakukan izin trayek dengan alasan karena penumpang angkutan umum yang semakin menurun dengan adanya angkutan online dan layanan bus Trans Banyumas;
- d) Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp18.240.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui Dinakerkop UKM. Retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp67.598.400,00 atau 78,75 persen dari retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2021 sebesar Rp85.838.400,00.

Hal ini disebabkan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK), objek retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berubah dari Perpanjangan IMTA menjadi Perpanjangan RPTKA. Dan sebelum Perda yang mengatur retribusi Penggunaan TKA disesuaikan maka Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dialihkan menjadi PNBPN. Pemungutan retribusi Penggunaan TKA dihentikan pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan 4 Agustus 2022 dengan diundangkannya Perda Banyumas No.4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 adalah sebesar Rp21.801.615.649,00 atau 103,82 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.000.000.000,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemkab Banyumas berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan Kas Daerah pada TA 2022.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp21.801.615.649,00 dan Rp15.507.581.925,00.



Dengan demikian, realisasi TA 2022 lebih tinggi Rp6.294.033.724,00 atau naik 40,59 persen dari realisasi TA 2021.

Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi sebagai berikut:

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1. PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	-	8.269.629.645,00	-	6.714.236.789,00	23,17
2. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	-
3. PT. Bank BPD Jawa Tengah	8.000.000.000,00	9.481.986.004,00	118,52	8.723.491.506,00	8,69
4. Perumda Air Minum Tirta Satria	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-	-
5. PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda)	9.000.000.000,00	50.000.000,00	0,56	69.853.630,00	(28,42)
6. PRPP Jateng	-	-	-	-	-
	21.000.000.000,00	21.801.615.649,00	103,82	15.507.581.925,00	40,59

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp21.801.615.649,00 berasal dari setoran dividen atas laba TA 2021 yang dibayarkan TA 2022, yakni dari PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp8.269.629.645,00 dan PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar Rp9.481.986.004,00, dan setoran dividen dari Perumda Air Minum Tirta Satria sebesar Rp4.000.000.000,00 dan setoran dividen dari PT.BIJ (Perseroda) sebesar Rp50.000.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp507.517.525.434,84 atau 98,91 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp513.111.244.825,00.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp507.517.525.434,84 dan Rp500.270.177.137,00. Hal ini berarti realisasi periode Tahun 2022 lebih tinggi Rp7.249.010.120,96 atau naik 1,45 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	2022			2021		Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
Lain-lain PAD yang Sah:						
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000.000	1.428.847.735,00	57,15	742.640.000,00		92,40
Jasa Giro	9.751.252.494,00	2.400.766.186,00	24,62	5.635.427.955,00		0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	613.571.961,00	0,00	39.407.002,00		1457,01
Pendapatan Bunga	-	12.175.639.762,00	0,00	3.386.583.910,00		259,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	998.279.060,00	0,00	539.984.748,00		84,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.600.000.000,00	4.046.698.368,00	112,41	303.591.984,00		1232,94
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	993.476.308,00	0,00	708.117.365,00		40,30
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	137.650.663,00	0,00	264.538.289,00		(47,97)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	960.719.700,00	0,00	-		0,00
Pendapatan dari Pengembalian	-	1.267.949.463,00	0,00	1.185.292.783,00		6,97
Pendapatan BLUD	497.259.992.331,00	482.481.589.352,84	97,03	485.997.655.186,00		(0,72)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	0,00	624.571.250,00		(100,00)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	0,00	200.613.255,00		(100,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	1.695.000,00	0,00	7.074.000,00		(76,04)
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	10.641.876,00	0,00	634.679.410,00		(98,32)
	513.111.244.825,00	507.517.525.434,84	98,91	500.270.177.137,00		1,45

- Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.428.847.735,00 terdiri atas:
 - Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.100.000,00;
 - Hasil penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.702.000,00;
 - Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp700.000,00;
 - Hasil penjualan Aset Lainnya sebesar Rp1.309.345.735,00;
- Penerimaan jasa giro sebesar Rp2.400.766.186,00 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:
 - Jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp2.400.119.381,00;
 - Jasa giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp87.875,00;
 - Jasa giro pada Rekening Dana Cadangan sebesar Rp558.930,00.
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp613.571.961,00 yang merupakan setoran hasil pengelolaan dana bergulir yang ditempatkan pada PT. BPR BKK Purwokerto Perseroda atas bunga pinjaman Dana Bergulir bulan Desember 2021 sampai dengan Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, hasil pungutan jasa atas Dana Pinjaman Bergulir



- digunakan 50 persen sebagai imbalan jasa kepada PT. BPR BKK Purwokerto dan 50 persen sebagai Pendapatan Daerah;
4. Pendapatan Bunga sebesar Rp12.175.639.762,00 yang merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
 5. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp998.279.060,00 terdiri atas:
 - a) tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terhadap bendahara sebesar Rp997.067.600,00;
 - b) tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp1.211.460,00;
 6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp4.046.698.368,00 terdiri atas:
 - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Pendidikan sebesar Rp70.677.575,00;
 - b) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Kesehatan sebesar Rp39.566.856,00;
 - c) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Rp12.528.834,00;
 - d) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup Rp578.794.615,00;
 - e) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp14.914.155,00;
 - f) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp23.589.027,00;
 - g) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pemerintah lainnya sebesar Rp3.306.627.306,00;



7. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp993.476.308,00 merupakan denda atas Pajak dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2022
<i>Pendapatan Denda Pajak:</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>
Pendapatan Denda Pajak Hotel	18.544.650,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	110.670.226,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3.466.953,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.200.370,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.825.922,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.724.199,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.862.282,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	801.181.706,00
Jumlah	993.476.308,00

8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp137.650.663,00 terdiri atas denda atas retribusi jasa umum sebesar Rp89.467.800,00; denda atas retribusi jasa usaha sebesar Rp35.721.407,00 dan denda atas retribusi perizinan tertentu sebesar Rp12.461.456,00;
9. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp960.719.700,00 terdiri atas :
- a) JAMPEL220802110500509 PTASURAN sebesar Rp758.219.700,00;
 - b) KLAIM KBG PUTRA SATRIA sebesar Rp202.500.000,00.
10. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.267.949.463,00 terdiri atas:
- a) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp35.486.576,00;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.232.462.887,00;
11. Pendapatan BLUD pada TA 2022 sebesar Rp482.481.589.352,84 merupakan pendapatan dari 47 (empat puluh tujuh) BLUD di Kabupaten Banyumas yang berasal dari Jasa Layanan Umum pada BLUD;



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Rincian realisasi per jenis Pendapatan BLUD TA 2022 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan BLUD</i>	<i>Pendapatan Jasa Layanan BLUD</i>
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	510.809.737,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	5.670.341.341,00
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.176.305.539,00
Puskesmas Banyumas	2.581.156.822,00
Puskesmas Gumelar	2.961.440.440,00
Puskesmas Ajibarang I	3.265.383.400,00
Puskesmas Baturraden I	1.427.335.111,00
Puskesmas Cilongok I	4.208.157.042,00
Puskesmas Kembaran I	1.555.416.495,00
Puskesmas Kemranjen I	2.619.323.330,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	1.001.110.970,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	814.029.326,00
Puskesmas Sokaraja I	2.405.495.535,00
Puskesmas Sumbang I	2.312.624.571,00
Puskesmas Sumpiuh I	2.691.730.558,00
Puskesmas Tambak I	1.891.890.908,00
Puskesmas Wangon I	3.678.924.754,00
Puskesmas Ajibarang II	2.532.967.314,00
Puskesmas Baturraden II	1.197.777.753,00
Puskesmas Cilongok II	2.639.668.952,00
Puskesmas Kembaran II	1.465.332.261,00
Puskesmas Kemranjen II	1.806.655.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	874.197.652,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	1.040.800.400,00
Puskesmas Sokaraja II	1.455.021.915,00
Puskesmas Sumbang II	2.511.540.786,00
Puskesmas Sumpiuh II	1.462.200.759,00
Puskesmas Tambak II	1.140.955.815,00
Puskesmas Wangon II	1.197.672.106,00
Puskesmas Jatilawang	4.099.128.607,00
Puskesmas Kalibagor	2.329.914.484,00
Puskesmas Karanglewas	3.095.102.976,00
Puskesmas Kebasen	3.600.179.034,00
Puskesmas Kedungbanteng	3.059.773.100,00
Puskesmas Lumbir	3.103.732.706,00
Puskesmas Patikraja	2.621.778.023,00
Puskesmas Pekuncen I	2.841.709.486,00
Puskesmas Purwojati	2.308.540.359,00
Puskesmas Purwokerto Barat	1.533.676.482,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	2.364.019.377,00
Puskesmas Rawalo	3.393.461.587,00
Puskesmas Somagede	2.138.273.025,00
Puskesmas Pekuncen II	1.522.146.888,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	7.402.389.531,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	244.127.666.698,84
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	113.942.863.762,00
Lokawisata Baturraden	18.900.966.635,00
Jumlah	482.481.589.352,84

Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp482.481.589.352,84 terdiri atas pendapatan kapitasi, pendapatan karcis umum, pendapatan klaim BPJS, pendapatan klaim KBS, pendapatan SKD, pendapatan laboratorium, pendapatan KIA, pendapatan persalinan, pendapatan calon pengantin, pendapatan tindakan gigi, pendapatan tindakan KB, pendapatan haji, pendapatan ambulans, pendapatan konsultasi, dan pendapatan vitasi;



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Perbandingan Pendapatan BLUD TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan BLUD</i>	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	510.809.737,00	772.580.922,00	(261.771.185,00)	(33,88)
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	5.670.341.341,00	4.934.684.025,00	735.657.316,00	14,91
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.176.305.539,00	4.892.800.838,00	(3.716.495.299,00)	(75,96)
Puskesmas Banyumas	2.581.156.822,00	1.087.212.527,00	1.493.944.295,00	137,41
Puskesmas Gumelar	2.961.440.440,00	2.413.542.683,00	547.897.757,00	22,70
Puskesmas Ajibarang I	3.265.383.400,00	2.767.872.510,00	497.510.890,00	17,97
Puskesmas Baturraden I	1.427.335.111,00	3.145.662.764,00	(1.718.327.653,00)	(54,63)
Puskesmas Cilongok I	4.208.157.042,00	1.385.716.421,00	2.822.440.621,00	203,68
Puskesmas Kembaran I	1.555.416.495,00	4.192.917.184,00	(2.637.500.689,00)	(62,90)
Puskesmas Kemranjen I	2.619.323.330,00	1.575.289.809,00	1.044.033.521,00	66,28
Puskesmas Purwokerto Timur I	1.001.110.970,00	2.481.303.534,00	(1.480.192.564,00)	(59,65)
Puskesmas Purwokerto Utara I	814.029.326,00	954.352.071,00	(140.322.745,00)	(14,70)
Puskesmas Sokaraja I	2.405.495.535,00	744.443.042,00	1.661.052.493,00	223,13
Puskesmas Sumbang I	2.312.624.571,00	2.124.620.048,00	188.004.523,00	8,85
Puskesmas Sumpiuh I	2.691.730.558,00	2.348.388.946,00	343.341.612,00	14,62
Puskesmas Tambak I	1.891.890.908,00	2.531.917.203,00	(640.026.295,00)	(25,28)
Puskesmas Wangon I	3.678.924.754,00	1.785.167.869,00	1.893.756.885,00	106,08
Puskesmas Ajibarang II	2.532.967.314,00	3.318.327.838,00	(785.360.524,00)	(23,67)
Puskesmas Baturraden II	1.197.777.753,00	2.614.189.869,00	(1.416.412.116,00)	(54,18)
Puskesmas Cilongok II	2.639.668.952,00	1.143.403.216,00	1.496.265.736,00	130,86
Puskesmas Kembaran II	1.465.332.261,00	2.634.363.743,00	(1.169.031.482,00)	(44,38)
Puskesmas Kemranjen II	1.806.655.000,00	1.482.452.288,00	324.202.712,00	21,87
Puskesmas Purwokerto Timur II	874.197.652,00	1.736.067.912,00	(861.870.260,00)	(49,64)
Puskesmas Purwokerto Utara II	1.040.800.400,00	774.992.434,00	265.807.966,00	34,30
Puskesmas Sokaraja II	1.455.021.915,00	895.100.507,00	559.921.408,00	62,55
Puskesmas Sumbang II	2.511.540.786,00	1.435.326.615,00	1.076.214.171,00	74,98
Puskesmas Sumpiuh II	1.462.200.759,00	2.514.912.639,00	(1.052.711.880,00)	(41,86)
Puskesmas Tambak II	1.140.955.815,00	1.477.537.463,00	(336.581.648,00)	(22,78)
Puskesmas Wangon II	1.197.672.106,00	984.362.114,00	213.309.992,00	21,67
Puskesmas Jatilawang	4.099.128.607,00	1.083.712.778,00	3.015.415.829,00	278,25
Puskesmas Kalibagor	2.329.914.484,00	3.701.569.964,00	(1.371.655.480,00)	(37,06)
Puskesmas Karanglewas	3.095.102.976,00	2.306.760.087,00	788.342.889,00	34,18
Puskesmas Kebasen	3.600.179.034,00	3.138.182.121,00	461.996.913,00	14,72
Puskesmas Kedungbanteng	3.059.773.100,00	3.339.540.075,00	(279.766.975,00)	(8,38)
Puskesmas Lumbir	3.103.732.706,00	3.075.349.692,00	28.383.014,00	0,92
Puskesmas Patikraja	2.621.778.023,00	2.883.570.439,00	(261.792.416,00)	(9,08)
Puskesmas Pekuncen I	2.841.709.486,00	2.559.528.438,00	282.181.048,00	11,02
Puskesmas Purwojati	2.308.540.359,00	3.473.712.272,00	(1.165.171.913,00)	(33,54)
Puskesmas Purwokerto Barat	1.533.676.482,00	2.056.342.387,00	(522.665.905,00)	(25,42)
Puskesmas Purwokerto Selatan	2.364.019.377,00	1.409.442.451,00	954.576.926,00	67,73
Puskesmas Rawalo	3.393.461.587,00	2.244.602.257,00	1.148.859.330,00	51,18
Puskesmas Somagede	2.138.273.025,00	2.960.957.987,00	(822.684.962,00)	(27,78)
Puskesmas Pekuncen II	1.522.146.888,00	2.038.989.957,00	(516.843.069,00)	(25,35)
Rumah Sakit Mata Purwokerto	7.402.389.531,00	601.820.654,00	6.800.568.877,00	1.130,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	244.127.666.698,84	270.210.697.605,00	(26.083.030.906,16)	(9,65)
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	113.942.863.762,00	117.763.366.988,00	(3.820.503.226,00)	(3,24)
Lokawisata Baturraden	18.900.966.635,00	0,00	18.900.966.635,00	0,00
Jumlah	482.481.589.352,84	485.997.655.186,00	(3.516.065.833,16)	(0,72)

12. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.695.000,00 merupakan penerimaan denda melalui Satuan Polisi Pamong Praja;



13. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapenda dan BKAD sebesar Rp10.641.876,00 terdiri atas:

- c) Pendapatan zakat sebesar Rp8.571.469,00;
- d) Pendapatan Infaq sebesar Rp2.000.000,00;
- e) Pendapatan Shadaqah sebesar Rp70.407,00.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.589.697.751.952,00 yang berarti mencapai 97,89 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.645.583.354.052,00.

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.589.697.751.952,00 dan Rp2.535.638.088.327,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2022 lebih tinggi Rp54.059.663.625,00 atau 2,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2022 dan TA 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Transfer	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.382.649.644.052,00	2.314.527.536.417,00	97,14	2.282.438.497.924,00	1,41
Pendapatan Transfer Antar Daerah	262.933.710.000,00	275.170.215.535,00	104,65	253.199.590.403,00	8,68
	2.645.583.354.052,00	2.589.697.751.952,00	97,89	2.535.638.088.327,00	2,13

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.912.726.855.537,00 atau mencapai 97,15 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.968.848.987.052,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp51.280.979.747,00 atau mencapai 107,31 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp47.788.794.319,00.



Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp51.280.979.747,00 dan Rp56.584.800.161,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 lebih rendah Rp5.303.820.414,00 atau turun 9,37 persen dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Bagi Hasil Pajak</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.898.319.000,00	14.181.806.051,00	143,27	15.505.245.796,00	(8,54)
DBH PPh Pasal 21	29.872.427.229,00	26.893.193.205,00	90,03	33.424.132.989,00	(0,20)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.578.024.251,00	0,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.018.048.090,00	8.627.956.240,00	107,61	7.655.421.376,00	12,70
	47.788.794.319,00	51.280.979.747,00	107,31	56.584.800.161,00	(9,37)

2) Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp3.574.498.957,00 atau mencapai 124,82 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.863.673.000,00.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp3.574.498.957,00 dan Rp2.506.021.548,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 lebih tinggi Rp1.068.477.409,00 atau naik 42,64 persen dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	214.249.000,00	68.880.379,00	32,15	23.835.600,00	188,98
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	394.616.382,00	0,00	60.022.500	557,45
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	195.051.000,00	341.870.609,00	175,27	295.664.861,00	15,63
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	260.292.238,00	0,00	46.112.077,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	55.683.000,00	820.950,00	1,47	1.271.925	(35,46)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	479.864.000,00	549.707.399,00	114,55	721.495.435,00	(23,81)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.357.619.150,00	44,25
	2.863.673.000,00	3.574.498.957,00	124,82	2.506.021.548,00	42,64



3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.280.141.707.164,00 atau mencapai 99,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.289.633.614.000,00.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp1.280.141.707.164,00 dan Rp1.289.633.614.000,00. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum TA 2022 lebih rendah Rp9.491.906.836,00 atau turun 0,74 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.289.633.614.000,00.

Dana Alokasi Umum	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Dana Alokasi Umum	1.289.633.614.000,00	1.280.141.707.164,00	99,26	1.289.633.614.000,00	(0,74)
	1.289.633.614.000,00	1.280.141.707.164,00	99,26	1.289.633.614.000,00	(0,74)

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan DAK pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp577.729.669.669,00 atau mencapai 91,91 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp628.562.905.733,00. Rincian DAK TA 2022 adalah sebagai berikut.

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK Fisik pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp111.991.943.663,00 dan Rp191.690.674.261,00. Dengan demikian, realisasi DAK Fisik pada TA 2022 lebih rendah Rp79.698.730.598,00 atau turun 41,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Realisasi DAK Fisik

	Realisasi (Rp)	
	2022	2021
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.385.455.368,00	174.102.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.211.082.254,00	22.323.215.785,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.100.081.403,00	8.500.836.213,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	305.539.880,00	511.139.251,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	5.290.570.700,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	717.600.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.751.631.111,00	6.488.911.878,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.899.244.200,00	90.318.216.666,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	6.294.340.890,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	755.361.587,00	536.448.665,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	219.065.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.944.236.560,00	5.412.870.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	734.077.600,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.198.963.600,00	11.343.843.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.998.892.050,00	-
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.240.161.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	9.329.931.903,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.465.848.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	9.908.243.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.917.350.000,00	8.800.492.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	6.146.125.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	806.155.760,00	2.857.972.600
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	-	2.794.613.000
Jumlah DAK FISIK	111.991.943.663,00	191.690.674.261,00

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik pada TA 2022 sebesar Rp465.737.726.006,00 atau mencapai 91,65 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp508.170.329.733,00.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp465.737.726.006,00 dan Rp341.414.554.954,00. Dengan demikian, realisasi DAK Non Fisik pada TA 2022 lebih tinggi Rp124.323.171.052,00 atau minus 36,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Realisasi DAK Non Fisik

	Realisasi (Rp)	
	2022	2021
DAK Non Fisik-BOS Reguler	155.012.372.341,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	238.456.070.572,00	286.792.251.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.135.800.000,00	350.100.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	-	20.158.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	19.483.319.000,00	21.394.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.723.916.000,00	7.260.634.461,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	670.592.455,00	112.013.330,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.824.096.320,00	18.444.579.255,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	18.300.729.593,00	3.740.826.538,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	2.475.200.370,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	371.593.425,00	372.462.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	166.736.300,00	451.830.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	191.700.000,00	0,00
Jumlah DAK Non Fisik	465.737.726.006,00	341.414.554.954,00

b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp401.800.680.880,00 atau mencapai 97,10 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp413.800.657.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri atas Dana Penyesuaian dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:



1) Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian pada TA 2022 adalah sebesar Rp30.603.775.000,00 yang berarti mencapai 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp30.603.775.000,00.

Dana Penyesuaian pada TA 2022 dan 2021 terealisasi sebesar Rp30.603.775.000,00 dan Rp19.361.734.000,00. Dengan demikian Dana Penyesuaian pada TA 2022 lebih tinggi Rp11.242.041.000,00 atau tambah 58,06 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

2) Dana Desa

Dana Desa pada TA 2022 adalah sebesar Rp371.196.905.880,00 yang berarti mencapai 96,87 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp383.196.882.000,00.

Dana Desa pada TA 2022 dan 2021 terealisasi sebesar Rp371.196.905.880,00 dan Rp381.247.099.000,00. Dengan demikian Dana Desa pada TA 2022 lebih rendah Rp10.050.193.120,00 atau berkurang 2,64 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2022 adalah sebesar Rp275.170.215.535,00 yang berarti mencapai 104,65 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp262.933.710.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan.

Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2022 dan TA 2021 terealisasi sebesar Rp275.170.215.535,00 dan Rp253.199.590.403,00. Dengan demikian, Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2022 lebih tinggi Rp21.970.625.132,00 atau bertambah 8,68 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	241.145.710.000,00	253.570.782.196,00	105,15	233.070.254.488,00
Bantuan Keuangan	21.788.000.000,00	21.599.433.339,00	99,13	20.129.335.915,00
	262.933.710.000,00	275.170.215.535,00	104,65	253.199.590.403,00



Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

<i>Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi</i>	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kurang Salur 2021 (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	67.815.131.041,00	1.894.803.328,00	69.709.934.369,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.494.820.966,00	1.131.191.568,00	34.626.012.534,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.555.785.910,00	451.270,00	67.556.237.180,00
Pajak Air Permukaan	401.738.679,00	31.749.188,00	433.487.867,00
Pajak Rokok	81.245.110.246,00	-	81.245.110.246,00
Jumlah	250.512.586.842,00	3.058.195.354,00	253.570.782.196,00

Pendapatan Transfer antar Daerah berupa Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan</i>	Realisasi TA 2022 (Rp)
<i>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi</i>	
Bantuan Gubernur bulan September dan Desember 2022	21.599.433.339,00
Jumlah Bantuan Keuangan	21.599.433.339,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 adalah sebesar Rp14.024.437.570,00 yang berarti mencapai 137,32 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp10.213.081.396,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, yaitu Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp14.024.437.570,00 dan Rp190.093.371.910,00. Dengan demikian, Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 lebih rendah Rp176.068.934.340,00 atau turun 92,62 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021. Perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah:</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	30.775.169.520,00	(54,43)
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	159.318.202.390,00	~
Jumlah	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	190.093.371.910,00	(92,62)

a) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2022 adalah sebesar Rp14.024.437.570,00 yang berarti mencapai 137,32 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp10.213.081.396,00.

Pendapatan Hibah-LRA merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Hibah pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp14.024.437.570,00 dan Rp30.775.169.520,00. Dengan demikian, Pendapatan Hibah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.750.731.950,00 atau turun 54,43 persen dibandingkan Pendapatan Hibah pada TA 2021. Rincian dan perbandingan Pendapatan Hibah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Hibah:</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	30.775.169.520,00	(54,43)
Jumlah	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	30.775.169.520,00	(54,43)

1. Hibah dari Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2022 sebesar Rp14.024.437.570,00 terdiri atas penerimaan dari:

- a) Program Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu sebesar Rp5.462.974.006,00.

Dana hibah IPDMIP merupakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas yang merupakan dana pengganti atas pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif



Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh APBD. Dana Hibah IPDMIP digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan sektor irigasi dan pertanian.

Program Hibah IPDMIP di Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Hibah Nomor S-592/MK-7/2017 Tanggal 6 Desember 2017 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-054/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Hibah IPDMIP disalurkan melalui BKAD-PPKD kepada Bappedalitbang, DinpertenKP dan DPU.

- b) Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah APBN sebesar Rp5.819.463.564,00.

Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah sebesar Rp5.819.463.564,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

- c) Hibah air minum APBN sebesar Rp2.742.000.000,00.

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan murni APBN. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Pemkab Banyumas mengalokasikan dana modal APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



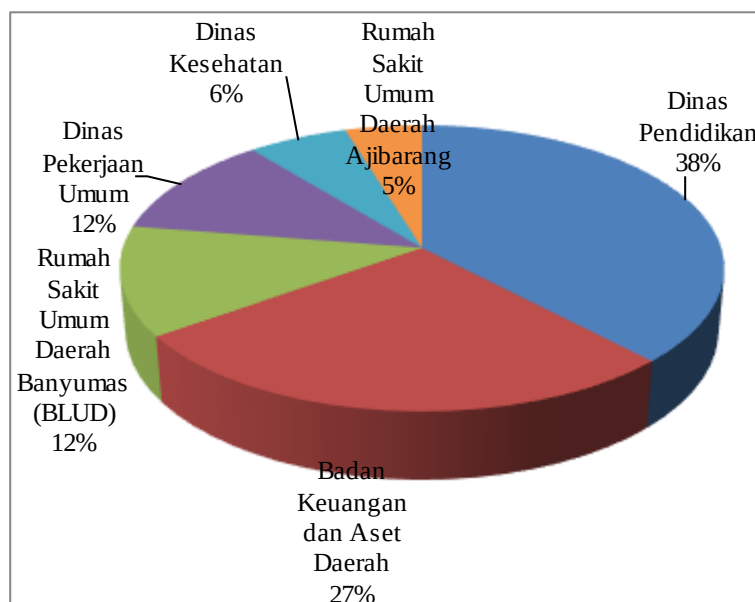
B. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 sebesar Rp2.951.373.406.074,00 yang berarti mencapai 90,03 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.278.251.982.204,00.

Belanja Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja pada TA 2022 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.023.777.454.363,00 atau 38 persen dari total Belanja Pemerintah Daerah.

Komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2022 tergambar pada grafik berikut ini:



Grafik Komposisi Belanja menurut Organisasi TA 2022

Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja-LRA pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.951.373.406.074,00 yang berarti mencapai 90,03 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.278.251.982.204,00. Hal ini berarti realisasi Belanja-LRA pada TA 2022 lebih tinggi Rp146.284.393.336,00 atau 5,21 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja-LRA pada TA 2021 sebesar Rp2.805.089.012.738,00.

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:



Belanja	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	2.698.706.915.123,00	2.444.173.455.628,00	90,57	2.295.095.801.085,00	6,50
Belanja Modal	539.870.327.081,00	479.036.065.598,00	88,73	432.235.246.229,00	10,83
Belanja Tak Terduga	39.674.740.000,00	28.163.884.848,00	70,99	77.757.965.424,00	(63,78)
	3.278.251.982.204,00	2.951.373.406.074,00	90,03	2.805.089.012.738,00	5,21

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.444.173.455.628,00 yang berarti mencapai 90,57 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.698.706.915.123,00.

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Rincian realisasi Belanja Operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.3.

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp149.077.654.543,00,00 atau naik 6,50 persen jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp2.295.095.801.085,00.

Perbandingan realisasi Belanja Operasi TA 2022 dengan anggarannya dan dengan realisasi TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Belanja Operasi:	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	1.581.450.189.632,00	1.451.366.997.587,00	91,77	1.398.098.601.191,00	3,81
Belanja Barang dan Jasa	1.014.347.631.048,00	896.365.360.138,00	88,37	822.140.656.636,00	9,03
Belanja Bunga	10.800.000.006,00	9.322.835.019,00	86,32	570.163.094,00	1.535,12
Belanja Hibah	79.117.824.000,00	78.073.991.484,00	98,68	63.420.758.764,00	23,10
Belanja Bantuan Sosial	12.991.270.437,00	9.044.271.400,00	69,62	10.865.621.400,00	(16,76)
	2.698.706.915.123,00	2.444.173.455.628,00	90,57	2.295.095.801.085,00	6,50

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp1.451.366.997.587,00 yang berarti mencapai 91,77 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.581.450.189.632,00. Realisasi Belanja Pegawai hanya terealisasi 91,77 persen diantaranya karena adanya amanat Kemenkeu untuk mengalokasikan gaji P3K



atas pengangkatan tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan, sementara realisasinya hanya 3 (tiga) bulan. Selain itu, terdapat alokasi Belanja Pegawai untuk CPNS sebesar 100 persen sementara realisasi pembayaran gaji CPNS adalah 80 persen.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp53.268.396.396,00 atau 3,81 persen lebih tinggi dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.398.098.601.191,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Gaji dan Tunjangan ASN	925.005.189.629,00	829.434.215.767,00	89,67	814.242.753.525,00	1,87
Tambahan Penghasilan ASN	147.801.332.674,00	144.622.323.249,00	97,85	129.996.512.198,00	11,25
Tambahan Penghasilan berdasarkan Objek Lainnya ASN	285.888.434.382,00	269.781.685.539,00	94,37	296.501.671.208,00	(9,01)
Gaji dan Tunjangan DPRD	35.441.032.500,00	34.480.505.084,00	97,29	33.718.087.792,00	2,26
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.260.920.086,00	2.157.066.199,00	66,15	1.614.483.490,00	33,61
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.533.120.000,00	1.533.120.000,00	100,00	1.293.120.000,00	18,56
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	182.520.160.361,00	169.358.081.749,00	92,79	120.731.972.978,00	40,28
	1.581.450.189.632,00	1.451.366.997.587,00	91,77	1.398.098.601.191,00	3,81



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Belanja Pegawai</i>	2022			2021		Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
a. Gaji dan Tunjangan ASN						
Belanja Gaji Pokok ASN	703.788.095.864,00	623.752.368.066,00	88,63	616.798.418.892,00		1,13
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	56.211.387.709,00	55.078.806.401,00	97,99	55.277.329.582,00		(0,36)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.374.703.475,00	9.085.062.000,00	96,91	9.176.404.911,00		(1,00)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	47.004.263.426,00	46.092.367.400,00	98,06	42.568.491.600,00		8,28
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.502.626.742,00	9.193.391.850,00	96,75	8.396.457.850,00		9,49
Belanja Tunjangan Beras ASN	33.857.553.802,00	33.199.355.760,00	98,06	32.014.791.300,00		3,70
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.555.231.058,00	6.817.447.324,00	90,23	3.703.600.467,00		84,08
Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.765.880,00	8.370.791,00	25,55	8.390.286,00		(0,23)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.276.013.724,00	41.072.335.396,00	78,57	41.245.853.676,00		(0,42)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.375.185.976,00	1.283.568.711,00	93,34	1.263.334.332,00		1,60
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.027.361.973,00	3.851.142.068,00	95,62	3.789.680.629,00		1,62
	925.005.189.629,00	829.434.215.767,00	89,67	814.242.753.525,00		1,87
b. Tambahan Penghasilan ASN						
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	147.742.332.674,00	144.567.723.249,00	97,85	129.885.836.598,00		11,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	57.275.600,00		0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	59.000.000,00	54.600.000,00	92,54	53.400.000,00		2,25
	147.801.332.674,00	144.622.323.249,00	97,85	129.996.512.198,00		11,25
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Objek Lainnya ASN						
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.892.030.709,00	7.476.714.328,00	75,58	5.535.427.479,00		35,07
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	943.076.522,00	647.040.546,00	68,61	484.814.847,00		33,46
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	264.297.060.000,00	254.624.401.874,00	96,34	284.733.170.882,00		(10,57)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.786.000.000,00	631.642.500,00	16,68	976.947.500,00		(35,35)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.573.622.151,00	1.357.156.291,00	86,24	673.000,00		201.557,70
Belanja Honorarium	5.396.645.000,00	5.044.730.000,00	93,48	4.770.457.500,00		5,75
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	0,00	0,00	180.000,00		(100,00)
	285.888.434.382,00	269.781.685.539,00	94,37	296.501.671.208,00		(9,01)



<i>Belanja Pegawai</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
<i>d.Gaji dan Tunjangan DPRD</i>					
Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.107.960.000,00	0,57
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	149.492.000,00	125.722.940,00	84,10	122.195.220,00	2,89
Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.000.000,00	139.191.240,00	89,23	160.337.880,00	(13,19)
Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	94.878.000,00	0,66
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.606.542.000,00	0,57
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	165.252.144,00	151.641.000,00	91,76	150.910.200,00	0,48
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.289.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.761.200.000,00	0,67
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	2.190.300.000,00	0,67
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.947.014.000,00	13.313.504.904,00	95,46	12.718.189.492,00	4,68
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.080.000.000,00	6.900.000.000,00	97,46	6.804.000.000,00	1,41
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	77.540.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	(100,00)
	35.441.032.500,00	34.480.505.084,00	97,29	33.718.087.792,00	2,26

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 disajikan pada Lampiran V.4.1.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp896.365.360.138,00 yang berarti mencapai 88,37 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.014.347.631.048,00. Hal ini berarti Belanja Barang dan Jasa terjadi kenaikan sebesar Rp74.224.703.502,00 atau naik 9,03 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp822.140.656.636,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 hanya terealisasi 88,37 dari anggarannya diantaranya disebabkan karena efisiensi nilai kontrak pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dari angka Standar Satuan Harga (SSH).



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagaimana pada tabel berikut:

Belanja Barang dan Jasa:	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Pakai Habis	103.828.319.022,00	90.533.800.961,00	87,20	78.091.752.739,00	15,93
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Kantor	224.730.554.237,00	201.419.968.371,00	89,63	218.192.049.313,00	(7,69)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.641.996.112,00	31.001.875.528,00	84,61	26.887.375.485,00	15,30
Belanja Sewa Tanah	192.372.000,00	103.600.000,00	53,85	60.000.000,00	72,67
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.802.045.400,00	2.433.395.276,00	86,84	1.315.252.550,00	85,01
Belanja Sewa Gedung dan	349.060.000,00	269.105.000,00	77,09	185.622.000,00	44,97
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	239.431.000,00	215.686.620,00	90,08	127.750.000,00	68,83
Belanja Jasa Konsultansi	6.268.369.046,00	5.952.911.759,00	94,97	4.690.397.366,00	26,92
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.558.225.000,00	2.091.204.220,00	81,74	2.277.198.710,00	(8,17)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	236.756.224,00	182.551.692,00	77,11	91.791.518,00	98,88
Belanja Kursus/Pelatihan,	3.948.569.000,00	3.639.976.180,00	92,18	2.276.585.000,00	59,89
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.289.627.351,00	2.373.394.001,00	72,15	1.776.851.809,00	33,57
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	228.861.304,00	93.254.500,00	40,75	88.646.898,00	5,20
Belanja Pemeliharaan Tanah	684.671.313,00	676.739.000,00	98,84	296.000.000,00	128,63
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.389.730.210,00	10.694.758.121,00	93,90	9.286.327.878,00	15,17
Belanja Pemeliharaan Gedung dan	16.747.690.317,00	16.498.347.804,00	98,51	12.771.181.548,00	29,18
Belanja Pemeliharaan Jalan,	35.439.780.773,00	35.039.014.240,00	98,87	16.576.559.700,00	111,38
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.000.000,00	41.800.000,00	99,52	302.200.000,00	(86,17)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.354.441.248,00	75.643.635.054,00	82,80	43.262.001.857,00	74,85
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	453.748.671,00	377.846.094,00	83,27	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.498.339.500,00	3.877.890.600,00	86,21	5.767.075.000,00	(32,76)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	216.500.000,00	198.787.503,00	91,82	43.307.166,00	359,02
Belanja Barang dan Jasa BOS	159.340.247.406,00	128.728.340.093,00	80,79	134.091.389.635,00	(4,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.866.295.914,00	284.277.477.521,00	92,04	263.677.140.464,00	7,81
	1.014.347.631.048,00	896.365.360.138,00	88,37	822.140.656.636,00	9,03

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022 disajikan pada Lampiran V.4.2.



c. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 adalah Rp9.322.835.019,00 atau 86,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.800.000.006,00. Belanja Bunga tersebut untuk pembayaran Bunga Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 30/KM.7/2021 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

Berdasarkan Perjanjian Nomor 900/27.2021 tanggal 30 Juli 2021 antara Pemkab Banyumas dengan PT. SMI, Pemkab Banyumas wajib membayar Bunga sebesar 5,66 persen dari pinjaman yang ditarik. Bunga dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum sesuai dengan KMK Nomor 30/KM.07/2021 tentang Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Selain itu, pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama pinjaman.

PT. SMI selaku pemberi pinjaman mensyaratkan alokasi Belanja Bunga selama 12 (dua belas) bulan dalam DPA Kabupaten Banyumas sebagai syarat efektif perjanjian pinjaman. Realisasi Belanja Bunga selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Belanja Bunga Utang Pinjaman
 kepada Lembaga Keuangan Bukan
 Bank (LKBB) :**

	Realisasi TA 2022 (Rp)
Januari	267.957.370,00
Februari	407.785.041,00
Maret	632.413.277,00
April	903.472.943,00
Mei	874.328.654,00
Juni	903.472.943,00
Juli	874.328.654,00
Agustus	903.472.943,00
September	903.472.943,00
Oktober	874.328.654,00
November	903.472.943,00
Desember	874.328.654,00
Jumlah	9.322.835.019,00

d. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp78.073.991.484,00 yang berarti mencapai 98,68 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp79.117.824.000,00.



Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.653.232.720,00 atau naik 23,10 persen dari realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 sebesar Rp63.420.758.764,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 terealisasi 98,68 persen dari anggaran perubahan TA 2022 karena penyaluran hibah uang/Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Sekretariat Daerah terkendala aturan dari Pemerintah Pusat.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Belanja Hibah	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	dari TA 2021 (%)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.200.000.000,00	1.875.565.500,00	85,25	1.127.433.600,00	95,13
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.005.409.000,00	73.286.010.984,00	99,03	59.380.910.164,00	24,63
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	100,00	2.912.415.000,00	-
	79.117.824.000,00	78.073.991.484,00	98,68	63.420.758.764,00	23,10

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.875.565.500,00 terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp716.400.000,00 dan Rp1.159.165.500,00.

- Belanja Hibah Uang kepada Kemenag Kab. Banyumas disalurkan oleh Sekretariat Daerah senilai Rp716.400.000,00 dasar SK Bupati Bms No 900/688/Tahun 2022 tgl 7-11-2022; NPHD No 900/6601/XI/2022 - No B-5018/Kk.11.02/3/Hk.00.03.1/11/2022 tg 16-11-2022;
- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat disalurkan oleh Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.159.165.500,00 untuk Pembangunan Gedung Kantor Permanen Bantuan Rehab Aula Rutan, Gedung Kodim, Kantor Sarpras.



2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum di Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum di Indonesia sebesar Rp73.286.010.984,00 merupakan realisasi pada tiga sub objek yang terdiri atas:

a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp40.479.756.929,00 terbagi menjadi belanja dalam bentuk uang dan barang.

1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 terealisasi sebesar Rp13.281.016.432,00 disalurkan melalui SKPD berikut:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp6.723.916.000,00 antara lain hibah BOP dan kesetaraan;
- Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp4.963.445.705,00 antara lain hibah kepada KONI Kabupaten Banyumas sebesar Rp3.496.305.592,00 dan Gerakan Pramuka Kwarcab Banyumas sebesar Rp1.467.140.113,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp1.593.654.727,00 antara lain untuk Komisi Penanggulangan AIDS sebesar Rp400.000.000,00, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyumas sebesar Rp150.000.000,00, MUI Kabupaten Banyumas sebesar Rp150.000.000,00 dan Baznas Kabupaten Banyumas sebesar Rp893.654.727,00.

2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2022 terealisasi sebesar Rp27.198.740.497,00 dan disalurkan melalui SKPD berikut:

- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sejumlah Rp25.488.740.497,00 antara lain untuk pembangunan tangki septik individual dan komunal DAK Sanitasi, *sharing* program Pamsimas dan perluasan/peningkatan SPAM Desa dan Kecamatan.
- Dinas Lingkungan Hidup sejumlah Rp1.710.000.000,00 antara lain untuk Pekerjaan Pembangunan TPS3R Kelurahan Teluk an. TPS-KSM MULIA SEJATI Kec. Purwokerto Selatan (Swakelola Dana DAK Bidang Sanitasi Th.2022) sesuai Kontrak No. 050/2942/2022 Tgl. 27/06/2022, Pekerjaan Pembangunan TPS3R Kelurahan Kranji Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas sesuai SPK No. 050/2941/2022 Tgl. 27 Juni 2022, Pekerjaan Pembangunan TPS3R Desa Purwojati Kec. Purwojati sesuai SPK No. 050/2943/2022 Tgl. 27 Juni 2022, dan lain sebagainya.



- b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp30.758.692.055,00 terdiri dari belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa.
1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sejumlah Rp23.353.319.000,00 disalurkan oleh SKPD sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp20.783.319.000,00 yang merupakan hibah uang kepada Lembaga Pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Parungkamal dan Taman Kanak Kanak Nurul Islam Plangkapan, Kelompok Bermain Mutiara Hati dkk, Pos Pendidikan Anak Usia Dini Lestari II Banjarparakan dan Pos PAUD Ngesti Utami Wlahar, Taman Kanak-Kanak Diponegoro 28 Pageraji dkk, Yayasan Salsabil Izatul Umat Berdasarkan SK Bupati Banyumas Nomor 900/618/TAHUN 2022 tgl.10 Oktober 2022;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp300.000.000,00 yang merupakan untuk Pembangunan Dapur Sehat Gula Kelapa sesuai NPHD No. 521/5791/2022 tanggal 22 November 2022, SK Bupati Banyumas No. 525/693/Tahun 2022 Tgl. 9 November 2022;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp2.270.000.000,00 antara lain hibah uang kepada Perkumpulan Madrasah Diniyah Takmiliah Mambaul Ulum Ds. Watuagung Kec. Tambak, Yayasan Al Mahmud Lestari Bangsa Kec. Kebasen, Yayasan Ubaidi Usman dan lain sebagainya.
 2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sejumlah Rp7.405.373.055,00 disalurkan oleh:
 - Dinas Pendidikan Rp112.071.000,00 yang merupakan belanja hibah APE DAK PAUD 100% CV.PARADIGMA SCIENTIFIC No.SP 027/5321/2022 Tgl 24-06-2022,BA Pembayaran 900/8441/2022 Tgl 05-09-2022,BA Pemeriksaan Pek 027/7974/2022 Tgl 24-08-2022, BA Serah Terima 027/7975/2022 Tgl 24-08-2022 ;
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Rp49.981.580,00 yang merupakan belanja hibah barang kpd Badan & Lembaga Nirlaba, Sukarela & Sosial yg Telah Memiliki Surat Ket Terdaftar/utk Ds.Cidora Kec.Lumbir SP/Nomor Kontrak: 027/030/2022 TGL 02-09-2022,BAST No :027/032/20222 Tgl 16-09-2022 subkeg.Pengel&Pengemb Bhn Pustaka ;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan Rp1.098.431.575,00 yang merupakan belanja Pengadaan Ternak Kelinci dasar SPK No.027/008/PPKom/VIII/2022 tgl 1 Agustus 2022 , BAC Pemeriksaan Barang No.027/892.1 PB/VIII/2022 TGL 16 Agt 2022 serta BAST No.027/892.2/ST/VIII/2022 tgl 16 Agt 2022, dan lain sebagainya;



- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejumlah Rp6.144.888.900,00 yang merupakan Pengadaan Pupuk NPK sesuai SPK No.027/03/SPK/BUN/VIII/2022 Tgl.1-8-2022, BAPP No.027/13/BAPP/BUN/VIII/2022 Tgl.15-8-2022 dan BASR No.027/16/BAST/BUN/VIII/2022 Tgl.16-8-2022 dan lain sebagainya.
- c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk barang sejumlah Rp2.047.562.000,00 yang disalurkan oleh
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.760.072.000,00 berupa Sumur Resapan Permukiman, Penanganan Kawasan Kumuh dan Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman di Kelurahan dan Kecamatan;
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa KIT Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting Rp287.490.000,00.
- 3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik seluruhnya disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah Rp2.912.415.000,00. Penyaluran Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sejumlah Rp2.912.415.000,00 digunakan untuk pemberian bantuan kepada 9 (sembilan) partai politik. Pada TA 2022, Banparpol dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di kabupaten Banyumas.

Rincian daftar penerima dan besaran Banparpol di Kabupaten Banyumas TA 2022 adalah sebagai berikut:

Partai	Jumlah Penerimaan (Rp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.031.334.000,00
Partai Demokrat	111.696.000,00
Partai Golkar	334.230.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	479.616.000,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	150.897.000,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	203.163.000,00
Partai Gerindra	290.190.000,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	156.552.000,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	154.737.000,00
Jumlah	2.912.415.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp9.044.271.400,00 yang berarti mencapai 69,62 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp12.991.270.437,00.



Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Bantuan Sosial pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.821.350.000,00 atau turun 16,76 persen dari realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2021 sebesar Rp10.865.621.400,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	dari TA 2021 (%)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.467.463.937,00	5.579.271.400,00	58,93	4.609.388.900,00	21,04
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.465.000.000,00	3.465.000.000,00	100,00	6.250.000.000,00	(44,56)
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kelompok	58.806.500,00	-	-	6.232.500,00	(100,00)
	12.991.270.437,00	9.044.271.400,00	69,62	10.865.621.400,00	(16,76)

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan melalui SKPD teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan sosial berupa uang melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp1.767.300.000,00;
2. Bantuan sosial berupa uang bagi penderes dan Masjid Jami , Petugas Kebersihan dan keamanan rumah ibadah melalui Sekretariat Daerah sebesar Rp1.176.400.000,00;
3. Bantuan Barang berupa tenda dan gerobak bagi Pedagang Kaki Lima melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp498.000.000,00;
4. Bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.465.000.000,00;
5. Bantuan sosial berupa uang bagi lansia miskin, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades Kabupaten Banyumas sebesar Rp2.056.200.000,00;
6. Bantuan sosial berupa pengadaan alat bantu (kursi roda) bagi penyandang disabilitas melalui Dinsospermades sebesar Rp43.956.000,00;



7. Bantuan sosial berupa uang bagi korban terdampak TPA Tipar Ajibarang melalui Dinas Lingkungan hidup Sebesar Rp37.415.400,00.

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 adalah sebesar Rp 479.036.065.598,00 yang berarti mencapai 88,73 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp539.870.327.081,00.

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya serta Aset lainnya.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp46.800.819.369,00 atau naik 10,83 persen dari realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp432.235.246.229,00. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal:					
Belanja Modal Tanah	16.750.522.000,00	2.307.762.514,00	13,78	12.781.710.449,00	(81,94)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.797.499.909,00	122.539.063.761,00	87,03	108.280.757.683,00	13,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	238.054.938.600,00	222.410.863.132,00	93,43	203.318.241.966,00	9,39
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.624.348.625,00	118.808.411.347,00	96,10	100.697.645.954,00	17,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.493.017.947,00	11.281.964.844,00	83,61	7.156.890.177,00	57,64
Belanja Modal Aset Lainnya	7.150.000.000,00	1.688.000.000,00	23,61	0,00	0,00
	539.870.327.081,00	479.036.065.598,00	88,73	432.235.246.229,00	10,83

Belanja Modal dan realisasi Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal dijelaskan pada penjelasan mengenai Aset Tetap. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 disajikan pada lampiran V.4.3 dan Lampiran V.4.4.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
A. Modal Tanah:					
Belanja Tanah Persil	3.116.725.000,00	0,00	0,00	(3.116.725.000,00)	0,00
Belanja Tanah Non Persil	1.107.975.000,00	372.892.900,00	33,66	(735.082.100,00)	(66,34)
Belanja Modal Lapangan	12.525.822.000	1.934.869.614,00	15,45	(10.590.952.386,00)	(84,55)
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.750.522.000,00	2.307.762.514,00	13,78	(14.442.759.486,00)	(86,22)
B. Modal Peralatan dan Mesin:					
Belanja Modal Alat Besar Darat	393.500.000,00	391.544.700,00	99,50	(1.955.300,00)	(0,50)
Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	1.239.815.000,00	1.185.271.120,00	95,60	(54.543.880,00)	(4,40)
Bermotor	7.863.000.000,00	7.553.104.250,00	96,06	(309.895.750,00)	(3,94)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak	237.000.000,00	232.625.250,00	98,15	(4.374.750,00)	(1,85)
Belanja Modal Alat Angkutan Apung					
Bermotor	1.340.000.000,00	1.257.979.650,00	93,88	(82.020.350,00)	(6,12)
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	83.146.640,00	79.325.900,00	95,40	(3.820.740,00)	(4,60)
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	31.454.000,00	26.523.585,00	84,32	(4.930.415,00)	(15,68)
Belanja Modal Alat Ukur	234.335.000,00	167.683.544,00	71,56	(66.651.456,00)	(28,44)
Belanja Modal Alat Pengolahan	3.628.594.002,00	3.587.678.030,00	98,87	(40.915.972,00)	(1,13)
Belanja Modal Alat Kantor	1.155.466.010,00	1.106.379.573,00	95,75	(49.086.437,00)	(4,25)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.437.104.895,00	3.962.375.468,00	89,30	(474.729.427,00)	(10,70)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat					
Pejabat	92.744.000,00	68.116.000,00	73,45	(24.628.000,00)	(26,55)
Belanja Modal Alat Studio	828.091.500,00	766.755.700,00	92,59	(61.335.800,00)	(7,41)
Belanja Modal Alat Komunikasi	279.425.000,00	266.135.170,00	95,24	(13.289.830,00)	(4,76)
Belanja Modal Alat Kedokteran	22.074.031.650,00	2.074.602.230,00	9,40	(19.999.429.420,00)	(90,60)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.696.167.000,00	1.492.861.006,00	88,01	(203.305.994,00)	(11,99)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	766.580.000,00	736.087.053,00	96,02	(30.492.947,00)	(3,98)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	23.000.000,00	18.678.500,00	81,21	(4.321.500,00)	(18,79)
Belanja Modal Alat Laboratorium					
Lingkungan Hidup	157.230.000,00	156.007.900,00	99,22	(1.222.100,00)	(0,78)
Belanja Modal Peralatan Laboratorium					
Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium					
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	16.201.111.000,00	15.538.223.703,00	95,91	(662.887.297,00)	(4,09)
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.767.550.500,00	1.513.132.430,00	85,61	(254.418.070,00)	(14,39)
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	694.240.000,00	609.105.460,00	87,74	(85.134.540,00)	(12,26)
Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat SAR	212.000.000,00	210.672.000,00	99,37	(1.328.000,00)	(0,63)
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas					
Darat	80.000.000,00	78.434.820,00	98,04	(1.565.180,00)	(1,96)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	177.949.500,00	173.505.500,00	97,50	(4.444.000,00)	(2,50)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.543.834.647,00	16.996.162.128,00	75,39	(5.547.672.519,00)	(24,61)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	52.560.129.565,00	62.290.093.091,00	118,51	9.729.963.526,00	18,51
	140.797.499.909,00	122.539.063.761,00	87,03	(18.258.436.148,00)	(12,97)
C. Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat					
Kerja	222.425.188.600,00	212.396.788.406,00	95,49	(10.028.400.194,00)	(4,51)
Belanja Modal Candi/Tugu					
Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.268.750.000,00	1.241.772.435,00	97,87	(26.977.565,00)	(2,13)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.361.000.000,00	8.772.302.291,00	0,00	(5.588.697.709,00)	(38,92)
	238.054.938.600,00	222.410.863.132,00	93,43	(51.708.157.734,00)	(21,72)



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
D. Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:					
Belanja Modal Jalan	85.921.487.800,00	84.846.533.350,00	98,75	(1.074.954.450,00)	(1,25)
Belanja Modal Jembatan	12.322.001.450,00	11.542.533.192,00	93,67	(779.468.258,00)	(6,33)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.563.549.000,00	7.370.032.000,00	77,06	(2.193.517.000,00)	(22,94)
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	8.465.934.095,00	8.442.743.872,00	99,73	(23.190.223,00)	(0,27)
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber	418.740.000,00	416.999.000,00	0,00	(1.741.000,00)	(0,42)
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.619.659.280,00	2.559.239.258,00	97,69	(60.420.022,00)	(2,31)
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	63.030.000,00	62.759.000,00	99,57	(271.000,00)	(0,43)
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	3.299.947.000,00	3.020.762.757,00	91,54	(279.184.243,00)	(8,46)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	950.000.000,00	546.808.918,00	0,00	(403.191.082,00)	(42,44)
	123.624.348.625,00	118.808.411.347,00	96,10	(4.815.937.278,00)	(3,90)
E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:					
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	550.000.000,00	547.308.800,00	0,00	(2.691.200,00)	(0,49)
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	14.966.546,00	99,78	(33.454,00)	(0,22)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.717.017.947,00	10.562.536.638,00	0,00	(2.154.481.309,00)	(16,94)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	201.000.000,00	147.152.860,00	73,21	(53.847.140,00)	(26,79)
	13.493.017.947,00	11.281.964.844,00	83,61	(2.211.053.103,00)	(44,44)
F. Belanja Modal Aset Lainnya:					
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.150.000.000,00	1.688.000.000,00	23,61	(5.462.000.000,00)	(76,39)
	7.150.000.000,00	1.688.000.000,00	23,61	(2.211.053.103,00)	(30,92)
Jumlah Belanja Modal	539.870.327.081,00	479.036.065.598,00	88,73	(60.834.261.483,00)	(11,27)

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah, Peralatan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Jaringan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Rekapitulasi Belanja Modal pada TA 2022 disajikan pada Lampiran V.4.4.

3. BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada TA 2022 adalah sebesar Rp28.163.884.848,00 yang berarti mencapai 70,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp39.674.740.000,00.

BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun



anggaran yang bersangkutan. BTT juga dipergunakan untuk pengeluaran atas pengembalian pendapatan yang telah diterima Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

BTT pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp28.163.884.848,00 dan Rp77.757.965.424,00. Dengan demikian, realisasi BTT pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp49.594.080.576,00 atau berkurang 63,78 persen dari realisasi BTT pada TA 2021.

Perbandingan realisasi BTT pada TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Tak Terduga</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Tak Terduga	39.674.740.000,00	28.163.884.848,00	70,99	77.757.965.424,00	(63,78)
	39.674.740.000,00	28.163.884.848,00	70,99	77.757.965.424,00	(63,78)

Realisasi BTT TA 2022 difokuskan untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 serta penanganan dan penanggulangan Inflasi daerah, yaitu sebesar Rp5.912.506.987,00 atau 20,99 persen dari total realisasi BTT TA 2022 sebesar Rp28.163.884.848,00.

Secara keseluruhan, realisasi BTT pada TA 2022 sebesar Rp28.163.884.848,00 digunakan untuk:

1. Pengembalian RTSTLH BTT Atas Nama Enci Haswati, Alamat: 004/002, Pliken Kembaran sebesar Rp15.000.000,00;
2. Pengembalian pembayaran retribusi diproses melalui BKAD Kabupaten Banyumas pemanfaatan barang milik daerah kepada 15 orang penyewa diproses melalui BKAD Kabupaten Banyumas sebesar Rp9.665.600,00;
3. Pengembalian Pembayaran BPHTB yang diproses melalui BKAD Kabupaten Banyumas sebesar Rp89.438.863,00;
4. Realisasi BTT bencana alam non COVID-19 sebesar Rp16.140.982.893,00;
5. Kebutuhan tanggap darurat bencana non alam (penanganan pandemi COVID-19) sebesar Rp5.912.506.987,00;
6. Realisasi BTT Terdampak Inflasi sebesar Rp6.026.290.505,00.

Realisasi BTT pada TA 2022 untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 disalurkan kepada 6 (enam SKPD) melalui BKAD selaku PPKD dengan rincian sebagai berikut:



SKPD	2022	
	RKB	Realisasi
Satuan Polisi Pamong Praja	725.013.600,00	596.397.030,00
Dinas Perhubungan	839.250.000,00	769.717.500,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.530.753.505,00	4.515.753.505,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.796.650.000,00	20.594.222.350,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	155.315.000,00	93.153.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.535.200.000,00	1.495.537.000,00
Restitusi Pajak	0,00	99.104.463,00
Jumlah	32.582.182.105,00	28.163.884.848,00

C. TRANSFER

Transfer pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp649.473.961.099,00 atau 95,79 persen dari anggaran perubahan sebesar Rp678.017.010.000,00.

Transfer terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer pada TA 2022 lebih besar Rp23.678.687.684,00 atau naik 3,78 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp625.795.273.415,00. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Transfer	2022			2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	38.550.000.000,00	32.032.638.219,00	83,09	23.505.816.950,00	36,28
Transfer Bantuan Keuangan	639.467.010.000,00	617.441.322.880,00	96,56	602.289.456.465,00	2,52
	678.017.010.000,00	649.473.961.099,00	95,79	625.795.273.415,00	3,78

1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp32.032.638.219,00 atau mencapai 83,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp38.550.000.000,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.526.821.269,00 atau 36,28 persen jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2021 sebesar Rp23.505.816.950,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2022 sebesar Rp32.032.638.219,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2022 sebesar Rp29.582.380.341,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2022 sebesar Rp2.450.257.878,00. Rincian dan perbandingan Transfer Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut:



<i>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	35.943.564.931,00	29.582.380.341,00	82,30	20.916.759.399,00	41,43
Bagi Hasil Retribusi	2.606.435.069,00	2.450.257.878,00	94,01	2.589.057.551,00	(5,36)
	38.550.000.000,00	32.032.638.219,00	83,09	23.505.816.950,00	36,28

a. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp29.582.380.341,00 merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yang sudah tersalurkan sebesar Rp20.403.080.320,00 dan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2021 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp9.179.300.021,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/676/TAHUN 2022 tanggal 1 November 2022 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 untuk Pemerintah Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

b. Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.450.257.878,00 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk penyaluran sebesar Rp1.480.936.856,00 yang terbagi 2 tahap penyaluran, tahap I sebesar Rp740.468.428,00 dan tahap II sebesar Rp740.468.428,00 Tahun 2022 dan Kurang Salur Bagi Hasil Retribusi TA 2022 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp969.321.022,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/676/TAHUN 2022 tanggal 1 November 2022 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 untuk Pemerintah Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp617.441.322.880,00 atau 96,56 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp639.467.010.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.151.866.415,00 atau naik 2,52 persen dari realisasi TA 2021 sebesar Rp602.289.456.465,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2022 adalah sebagai berikut:



<i>Bantuan Keuangan</i>	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	639.217.010.000,00	617.441.322.880,00	96,59	602.289.456.465,00	2,52
	639.467.010.000,00	617.441.322.880,00	96,56	602.289.456.465,00	2,52

a. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp639.467.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp617.441.322.880,00 yang terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.4/567/TAHUN 2022 tentang Penetapan Besaran ADD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, ADD TA 2022 ditetapkan sebesar Rp137.190.179.000,00 dan seluruhnya telah direalisasikan kepada 301 desa.

Perhitungan besaran ADD per desa merupakan penjumlahan ADD minimal, yaitu sebesar Rp423.861.857,00 per desa, ditambah ADD variabel, yang jumlahnya tergantung pada rasio luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kesulitan Geografis, dan jumlah aparatur di masing-masing desa. Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA 2022 disajikan pada Lampiran V.5.

Rincian besarnya alokasi ADD di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi ADD (Rp)
1	Lumbir	10	4.835.842.487,00
2	Wangon	12	5.521.736.653,00
3	Jatilawang	11	5.025.678.250,00
4	Rawalo	9	4.213.512.801,00
5	Kebasen	12	5.491.824.546,00
6	Kemranjen	15	6.894.115.831,00
7	Sumpiuh	11	5.037.159.464,00
8	Tambak	12	5.418.060.605,00
9	Somagede	9	4.207.202.695,00
10	Kalibagor	12	5.450.816.609,00
11	Banyumas	12	5.356.114.609,00
12	Patikraja	13	5.759.223.013,00
13	Purwojati	10	4.472.134.059,00
14	Ajibarang	15	6.989.389.624,00
15	Gumelar	10	4.898.902.334,00
16	Pekuncen	16	7.284.788.632,00
17	Cilongok	20	9.250.750.316,00
18	Karanglewas	13	5.805.210.705,00
19	Sokaraja	18	7.933.587.023,00
20	Kembaran	16	7.158.423.577,00
21	Sumbang	19	8.678.404.248,00
22	Baturraden	12	5.310.301.180,00
23	Kedungbanteng	14	6.196.999.739,00
JUMLAH		301	137.190.179.000,00

2) Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN

Besaran dana desa untuk masing-masing Desa TA 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/66/2021 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, Dana Desa TA 2022 ditetapkan sebesar Rp383.196.882.000,00 terealisasi sebesar Rp364.922.825.539,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 8 (delapan) tahap, yaitu:

- Tahap I sebesar Rp91.729.045.680,00;
- Tahap II sebesar Rp90.946.419.680,00;
- Tahap III sebesar Rp44.690.583.840,00;
- BLT TW 1 sebesar Rp38.925.900.000,00;
- BLT TW 2 sebesar Rp 38.925.900.000,00;
- BLT TW 3 sebesar Rp 38.925.900.000,00;
- BLT TW 4 sebesar Rp 38.925.900.000,00;
- Realokasi sebesar Rp127.232.800,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan cara disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.



3) Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa TA 2022

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Bankeudes) yang bersumber dari APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp118.829.949.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.054.238.000,00. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Bankeudes) terdiri:

- Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/749/Tahun 2022 Tanggal 21 November 2022 dengan realisasi sebesar Rp26.989.002.000,00;
- Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/171/Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemerintah Desa Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua dengan realisasi sebesar Rp76.407.602.000,00;
- Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/070/Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia dianggarkan dan realisasi sebesar Rp5.667.634.000,00;
- Bantuan Keuangan khusus Desa penyaluran Tahap I pemeliharaan jalan Desa Ajibarang Kulon Nomor 900/171/ Tahun 2022 Tanggal 9 Maret 2022 dengan realisasi sebesar Rp70.000.000,00;
- Pengembalian Dana Bankeudes Desa Ledug Kec. Kembaran Keg. Peningkatan Jalan RW 09 Ds. Ledug TA. 2022 sebesar Rp 80.000.000,00.

D. PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2022 adalah sebesar Rp436.945.123.266,00 yang berarti 100,14 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp436.321.184.496,00.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2022 lebih tinggi Rp123.887.045.287,00 atau naik 39,57 persen dari realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2021 sebesar Rp313.058.077.979,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:



Pembiayaan:	2022			2021	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2021 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	487.825.184.496,00	486.691.123.266,00	99,77	362.806.077.979,00	34,15
Pengeluaran Pembiayaan	51.504.000.000,00	49.746.000.000,00	96,59	49.748.000.000,00	(0,00)
Pembiayaan Netto	436.321.184.496,00	436.945.123.266,00	100,14	313.058.077.979,00	39,57

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada TA 2022 sebesar Rp486.691.123.266,00 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp123.885.045.287,00 atau naik 34,15 persen jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan pada TA 2021 sebesar Rp362.806.077.979,00. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 terdiri atas:

a) Penggunaan SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2022 sebesar Rp369.896.692.236,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2021.

Penetapan penggunaan SILPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp116.794.431.030,00 atau sebesar 99,89 persen dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp116.928.492.260,00. Penerimaan Pinjaman Daerah merupakan pinjaman yang dibiayai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 99,89 persen pada bulan Januari 2022. Penjelasan lebih lanjut mengenai Penerimaan Pinjaman Daerah dapat dilihat pada bagian mengenai Kewajiban Jangka Panjang.

c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tersebut merupakan Penerimaan Kembali atas Dana Bergulir, dimana Penerimaan Kembali Dana Bergulir tidak terealisasi karena belum disepakatinya Peraturan Daerah yang mengatur penarikan dana bergulir di Kabupaten Banyumas.



2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 sebesar Rp49.746.000.000,00 atau mencapai 96,59 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp51.504.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Hal ini berarti realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 lebih rendah Rp2.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp49.748.000.000,00 Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

	2022			2021	(Penurunan) dari Tahun 2021 (%)
<i>Pengeluaran Pembiayaan:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	25.004.000.000,00	24.746.000.000,00	98,97	28.249.000.000,00	(12,40)
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.499.000.000,00	(100,00)
	51.504.000.000,00	49.746.000.000,00	96,59	49.748.000.000,00	(0,00)

a) Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

b) Penyertaan Modal (*Investasi*) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pada BUMD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp25.004.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.746.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Satria
 Alokasi penyertaan modal pada Perumda Tirta Satria ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 – 2022 sebesar paling banyak Rp59.500.000.000,00. Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Satria TA 2022 terealisasi sebesar Rp15.004.000.000,00.
- 2) Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
 Alokasi penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023 paling banyak sebesar Rp23.500.000.000,00 yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:



- a) Paling banyak sebesar Rp5.550.000.000,00 pada tahun 2020;
- b) Paling banyak sebesar Rp5.950.000.000,00 pada tahun 2021;
- c) Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2022;
- d) Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2023.

Penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Tengah pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp6.000.000.000,00

- 3) Penyertaan modal pada Perusda Banyumas Investama Jaya
Alokasi penyertaan modal pada Perusda Banyumas Investama Jaya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal dengan realisasi sebesar Rp4.000.000.000,00.
- 4) Pengembalian sambungan rumah MBR terpasang yang tidak lolos verifikasi sebesar Rp258.000.000,00.

Realisasi pembiayaan penyertaan modal tersebut di atas menambah persentase kepemilikan pada masing-masing BUMD sebagaimana dijelaskan pada pos Investasi Permanen.

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp174.439.185.509,16 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp436.945.123.266,00 sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat SILPA TA 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84.

SILPA TA 2022 tersebut diantaranya merupakan SILPA terikat, yang terdiri atas:

- 1) Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp19.325.817.228,00 yang terdiri atas:
 - a. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2022 sebesar Rp30.520.541.161,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.546.699.839;
 - b. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2022 sebesar Rp14.650.990.206,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.106.898.794;
 - c. Realisasi penyaluran Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) TA 2022 sebesar Rp867.919.050,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.244.014,00;
 - d. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) TA 2022 sebesar Rp19.483.319,00 dan tidak terdapat sisa anggaran.



- e. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA 2022 sebesar Rp6.723.916.000,00 dan tidak terdapat sisa anggaran.
 - f. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya (BOP - MTB) TA. 2022 sebesar Rp662.916.350,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.083.650,00.
 - g. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2022 sebesar Rp254.593.377.086,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.455.040.714,00.
 - h. Sisa penyaluran anggaran Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD TA 2021 sebesar Rp800,00.
 - i. Realisasi penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2022 Rp651.750.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.991.637.500,00.
 - j. Realisasi penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) TA. 2022 sebesar Rp356.188.115,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.611.885,00.
 - k. Realisasi penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) TA. 2022 sebesar Rp361.046.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp32.348.000,00.
 - l. Realisasi penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2022 sebesar Rp191.450.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp250.000,00.
 - m. Realisasi penyaluran Dana PK2UKM TA. 2022 sebesar Rp375.074.650,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp25.725.350,00.
 - n. Sisa anggaran Dana Pelayanan Kepariwisata tahun 2020 sebesar Rp17.276.682,00
- 2) Sisa DAK Fisik sebesar Rp530.870.825,00 yang terdiri atas:
- a. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA 2022 sebesar Rp33.605.091.998,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp397.066.907,00.
 - b. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2022 sebesar Rp12.223.045.548,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.288.000,00.
 - c. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Jalan TA 2022 sebesar Rp23.166.597.535,00 dan terdapat sisa Rp32.366.065,00.
 - d. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum TA 2022 sebesar Rp10.238.895.116,00 dan terdapat sisa Rp1.265.884,00.
 - e. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi TA 2022 sebesar Rp6.452.422.241,00 dan terdapat sisa Rp13.425.759,00.



- f. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan TA 2022 sebesar Rp12.998.890.200,00 dan terdapat sisa Rp 1.850,-
 - g. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi TA 2022 sebesar Rp5.906.170.000,00 dan terdapat sisa sebesar Rp11.180.000,00.
 - h. Realisasi penyaluran DAK Fisik penugasan Bidang Pertanian TA 2022 sebesar Rp6.869.960.200,00 dan terdapat sisa sebesar Rp74.276.360,00.
- 3) Sisa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.201.205.010,00 yang terdiri atas:
- a. Realisasi Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Kinerja tahun lalu Tahun 2022 sebesar Rp19.454.176.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp682.541.000,00.
 - b. Realisasi Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Kinerja tahun berjalan Tahun 2022 sebesar Rp10.350.180.500,-, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp116.877.500,00
 - c. Realisasi Penyaluran Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp1.664.527.545,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp366.685.000,00
 - d. Sisa anggaran DID Tambahan 2020 sebesar Rp35.101.510,00.

Jumlah SILPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84 terdiri atas saldo kas daerah sebagai berikut:

- 1. Kas Daerah sebesar Rp217.220.011.920,00;
- 2. Kas di BLUD sebesar Rp44.601.021.895,84;
- 3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp59.840.341,00;
- 4. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.166.954,00; dan
- 5. Kas Dana BOS sebesar Rp617.896.646,00;

Jika jumlah SILPA per 31 Desember 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84 dibandingkan dengan saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp263.156.533.831,84 terdapat selisih sebesar Rp650.596.075,00. Selisih tersebut merupakan saldo kas yang bukan merupakan SAL yaitu utang PFK pada: (1) Kas Daerah sebesar Rp210.486.065,00; (2) Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.813.912,00; (3) Kas BLUD sebesar Rp246.953.615,00; (4) Kas Lainnya – Kas Dana Bergulir sebesar Rp46.357.432,00; (5) Kas Dana BOS sebesar Rp140.985.051,00

Lihat penjelasannya pada penjelasan atas Laporan Arus Kas.



5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2021 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022.

B. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SILPA sebesar Rp262.505.937.756,84 berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Dari target Pendapatan sebesar Rp3.519.947.807.708,00, terealisasi sebesar Rp3.426.408.181.663,84 sehingga terdapat kelebihan penerimaan dari target Pendapatan sebesar Rp93.539.626.044,16;
2. Dari anggaran Belanja sebesar Rp3.956.268.992.204,00 terealisasi sebesar Rp3.600.847.367.173,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp355.421.625.031,00. Sisa Belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih anggaran Belanja Operasi sebesar Rp254.533.459.495,00;
 - b. Selisih lebih anggaran Belanja Modal sebesar Rp60.834.261.483,00;
 - c. Selisih lebih anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.510.855.152,00;
 - d. Selisih lebih anggaran Belanja Transfer sebesar Rp 28.543.048.901,00.
3. Terdapat kekurangan Pembiayaan Netto sebesar Rp623.938.770,00 yang berasal dari selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 1.134.061.230,00 dan selisih kurang Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1.758.000.000,00.

C. Saldo Anggaran Lebih Akhir

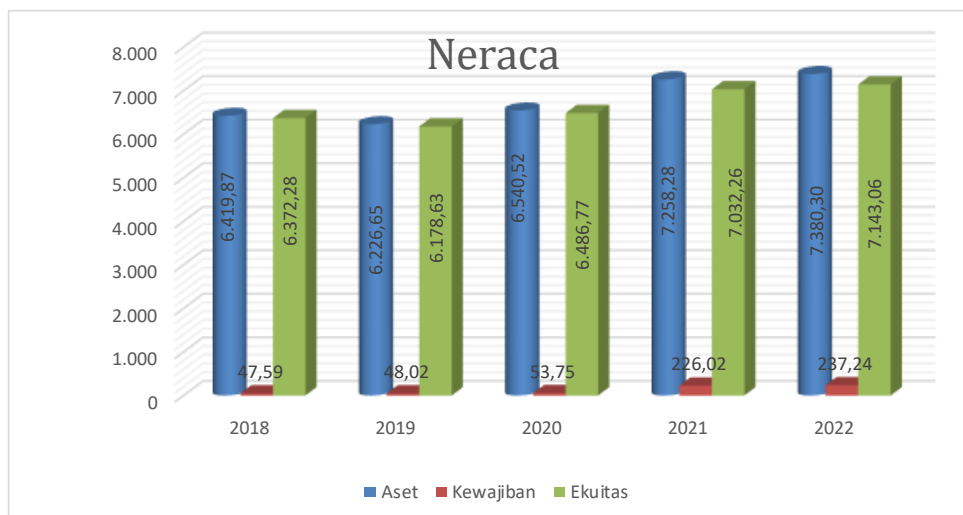
Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp262.505.937.756,84 dan Rp369.896.692.236,00. Dengan demikian, SAL Akhir Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp107.390.754.479,88 atau 29.03 persen dari SAL Akhir Tahun 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00.



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir untuk Kabupaten Banyumas disajikan pada grafik berikut ini:



**Grafik Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca
Tahun 2018-2022**

A. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp370.845.818.651,66 dan Rp540.897.867.968,85. Dengan demikian, Aset Lancar per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp170.052.049.317,19 atau minus 31,44 persen dari Aset Lancar per 31 Desember 2021.

Aset Lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri atas rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	217.430.497.985,00	261.966.442.541,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.166.954,00	4.996.932,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	65.654.253,00	82.901.960,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	44.847.975.510,84	106.418.860.864,00
Kas Dana BOS	758.881.697,00	1.917.315.972,00
Kas Lainnya	46.357.432,00	444.098.358,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pendapatan	139.700.638.058,32	205.559.066.270,35
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(88.177.503.399,79)	(87.710.501.874,00)
Beban Dibayar di Muka	129.153.288,00	175.561.357,50
Persediaan	56.036.996.873,29	52.039.125.588,00
	370.845.818.651,66	540.897.867.968,85

Untuk penjelasan saldo Kas lihat pula pada Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp217.430.497.985,00 dan Rp261.966.442.541,00. Dengan demikian, Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp44.535.944.556,00 atau minus 17,00 persen dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah:		
1) Rekening Giro	217.430.497.985,00	261.966.442.541,00
2) Rekening Deposito	-	-
	217.430.497.985,00	261.966.442.541,00

Dari jumlah Kas Daerah tersebut, sebesar Rp217.220.011.920,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sedangkan sisanya sebesar Rp210.486.065,00 merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri atas Utang PFK PPh 21 pada BUD sebesar Rp209.622.650,00 dan penambahan Utang PFK bunga deposito jaminan pertambahan tahun 2022 sebesar Rp863.415,00. Saldo Kas Daerah terdiri atas rekening giro dengan rincian sebagai berikut.

a. Rekening Giro

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut.



Rekening Giro:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000103	217.430.497.985,00	261.962.120.448,00
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000100	-	-
Bank BRI Cab. Purwokerto No. 00000077-01-000069-300	-	-
Bank BRI Cab. Ajibarang No. 00000151-01-000012-301	-	3.007.027,00
Bank Jateng PBB Online	-	-
Bank Jateng Non PBB Online	-	-
Bank BNI Pajak Online	-	-
Bank Jateng Cab. Purwokerto No. 1-003-013681	-	1.315.066,00
	217.430.497.985,00	261.966.442.541,00

Penggunaan rekening kas daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-000103 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp217.430.497.985,00.
- 2) Rekening giro Bank BRI Cabang Ajibarang A/C No. 00000151-01-000012-301 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening pembantu penerimaan daerah. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.
- 3) Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-013681 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening Dana Cadangan. Saldo pada rekening Dana Cadangan yang merupakan Kas di Kas Daerah adalah Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp0,00.

Rekening milik Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 900/819/TAHUN 2021 tentang Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Banyumas. Sejak berlakunya Keputusan Bupati tersebut maka rekening pembantu penerimaan daerah yang pada TA 2019 merupakan bagian dari rekening BUD menjadi rekening penerimaan milik Bapenda yaitu:

- 1) Rekening giro Bank Jateng PBB Online A/C No. 1-003-00084-4. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.
- 2) Rekening giro Bank Jateng Non PBB A/C No. 1-002-00953-6. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.
- 3) Rekening Bank BNI Pajak Online Cabang Purwokerto A/C No. 2-202-15710-8. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.



- b. Deposito
Saldo deposito per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.
Mengenai pokok dan bunga deposito jaminan pertambangan dapat dilihat di penjelasan mengenai Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp7.166.954,00 dan Rp4.996.932,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.170.022,00 atau naik 43,43 persen jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 merupakan penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

<i>Kas di Bendahara Penerimaan:</i>	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Bapenda	6.371.954,00	4.996.932,00
Dinporabudpar	795.000,00	-
Jumlah	7.166.954,00	4.996.932,00

Kas di Bendahara Penerimaan Bapenda sebesar Rp6.371.954,00 merupakan Kas di rekening, dari jumlah tersebut Rp6.371.945,00 merupakan pokok PBB sebesar Rp 5.504.653,00 denda PBB sebesar Rp 867.282,00 dan Rp19,00 merupakan Jasa Giro pada BNI yang baru dimutasikan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2022, dan Kas di Bendahara Penerimaan Dinporabudpar sebesar Rp795.000,00 merupakan Kas Tunai dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Rekening Bendahara Penerimaan dan dari jumlah tersebut disetorkan tanggal 2 Januari 2023.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp65.654.253,00 dan Rp82.901.960,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp17.247.707,00 atau minus 20,80 persen dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021. Penurunan Kas di Bendahara Pengeluaran disebabkan transaksi pembayaran LS sudah terbayarkan semua kepada penerima sebelum tanggal 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran SKPD, sebagai berikut.



<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dindik	2.849.928,00	-
Dinperindag	-	15.309.720,00
BKAD	279.639,00	-
Dinkanak	-	-
DLH	-	1.558.402,00
Dinporabudpar	-	961.738,00
Kecamatan Banyumas	2.576.345,00	-
Kecamatan Kalibagor	-	71.820,00
Kecamatan Karanglewas	-	9.641.282,00
Kecamatan Kebasen	108.000,00	-
Kecamatan Sokaraja	-	55.187.598,00
Kecamatan Sumbang	-	171.400,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	600,00	-
Kecamatan Purwokerto Utara	59.839.741,00	-
Jumlah	65.654.253,00	82.901.960,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp65.654.253,00 terdiri atas SAL sebesar Rp59.840.341,00 dan bukan SAL yang merupakan Utang PFK sebesar Rp5.813.912,00.

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp59.840.341,00 berasal dari sisa UP/TU TA 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor kembali ke Kas Daerah pada Kecamatan Purwokerto Utara sebesar Rp59.839.741,00 dan Kecamatan Purwokerto Selatan sebesar Rp600,00. Sisa UP/TU TA 2022 tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada awal tahun 2023.

Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan Mutasi Kas Sisa UP/TU Tahun 2021 per 31 Desember 2022 disajikan di Lampiran V.6, Lampiran V.6.1 dan Lampiran V.6.2.

- b. Kas yang bukan SAL yang merupakan Utang PFK sebesar Rp5.813.912,00 yang terdiri atas:
 - 1) Pajak TA 2022 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2022 pada Dindik sebesar Rp2.849.928,00;
 - 2) Kas pada rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.963.984,00 yang berasal dari pencairan SP2D-LS untuk pembayaran Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja non ASN dan Utang Iuran Jaminan Kematian non ASN yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diberikan kepada penerima, yakni pada SKPD:
 - a) Kecamatan Banyumas sebesar Rp2.576.345,00;
 - b) Kecamatan Kebasen sebesar Rp108.000,00;
 - c) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp279.639,00.

Utang PFK tersebut seluruhnya telah disetorkan pada tahun 2023. Rincian mengenai Utang PFK per jenis per SKPD dapat dilihat di bagian Utang PFK, disajikan pada Lampiran V.6.3.



4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp44.847.975.510,84 dan Rp106.418.860.864,00. Dengan demikian, Kas di BLUD per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp61.570.885.353,16 atau minus 57,86 persen dari Kas di BLUD per 31 Desember 2021.

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.847.975.510,84 merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp44.601.021.895,84 dan kas bukan SAL sebesar Rp246.953.615,00.

- a. Kas di BLUD yang merupakan SAL sebesar Rp44.601.021.895,84 meliputi:
 - 1) Saldo kas RSUD Banyumas sebesar Rp16.777.176.472,84;
 - 2) Saldo kas RSUD Ajibarang sebesar Rp16.706.035.026,00;
 - 3) Saldo kas RS Khusus Mata sebesar Rp278.848.936,00;
 - 4) Saldo kas BLUD Pariwisata sebesar Rp4.668.785.998,00;
 - 5) Saldo kas BLUD pada 43 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebesar Rp6.170.175.463,00.
- b. Kas di BLUD bukan SAL sebesar Rp246.953.615,00 terdiri atas:
 - 1) Uang titipan pasien pada RSUD Banyumas sebesar Rp219.519.511,00.
 - 2) Pajak TA 2022 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2022 pada BLUD Pariwisata sebesar Rp27.434.104,00;

Daftar Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022 disajikan dalam Lampiran V.7.

5. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp805.239.129,00 dan Rp2.361.414.330,00. Dengan demikian, Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.556.175.201,00 atau minus 65,90 persen dari Kas Dana BOS per 31 Desember 2021, Kas Lainnya terdiri dari :

- a. Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp758.881.697,00 dan Rp1.917.315.972,00. Dengan demikian, Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.158.434.275,00 atau minus 60,42 persen dari Kas Dana BOS per 31 Desember 2021.

Kas Dana BOS sebesar Rp758.881.697,00 merupakan saldo dana BOS pada SD dan SMP Negeri yang berasal dari penerimaan dana BOS dan penerimaan non-APBD lainnya. Jumlah tersebut terdiri atas:

- 1) Saldo Dana BOS pada SD Negeri sebesar Rp257.436.744,00;
- 2) Saldo Dana BOS pada SMP Negeri sebesar Rp501.444.953,00.



Saldo Kas Dana BOS tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp617.699.912,00 dan Utang PFK sebesar Rp141.181.785,00. Kas Dana BOS yang merupakan Utang PFK sebesar Rp140.985.051,00 seluruhnya merupakan pemungutan pajak TA 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Negara.

Nomor rekening dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/14/Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas.

- b. Saldo Rekening Kas Lainnya sebesar Rp46.357.432,00 adalah Pendapatan Dana Bergulir sebesar Rp46.357.432,00 merupakan akumulasi pendapatan jasa giro atas rekening pengelolaan pokok dan rekening bunga dana bergulir pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penambahan saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir periode Januari-November 2022 dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp121.033.366,00;
 - 2) Penambahan saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir periode bulan desember 2022 dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp8.418.913,00;
 - 3) Penambahan Saldo jasa giro atas rekening bunga dana bergulir dengan nomor rekening 01.12.02447 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp108.765,00.
 - 4) Penarikan saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir Tahun 2021 dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp440.883.584,00;
 - 5) Penarikan saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir periode Januari 2022 sampai dengan November 2022 dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp121.033.366,00;
 - 6) Penambahan saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir Tahun Anggaran 2022 dengan nomor rekening 2-003-12410-0 pada Bank Jateng Purwokerto sebesar Rp34.614.980,00.

6. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00. Pemkab Banyumas tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

7. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp139.700.638.058,32 dan Rp205.559.066.270,35. Piutang per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp65.858.428.212,03 atau minus 32,04 persen dari Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021.



Rincian Piutang Pendapatan disajikan dalam tabel berikut:

<i>Piutang Pendapatan</i>	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Piutang Pajak	109.612.917.952,20	107.116.128.772,20	2.496.789.180,00	2,33
Piutang Retribusi	3.013.570.774,00	2.117.023.536,00	896.547.238,00	42,35
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	378.058.239,15	(378.058.239,15)	(100,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.246.180.538,12	78.460.102.653,00	(55.213.922.114,88)	(70,37)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	8.628.957.788,00	(8.628.957.788,00)	(100,00)
Piutang Transfer Antar Daerah	3.785.256.768,00	3.058.195.354,00	727.061.414,00	23,77
Piutang Lainnya	42.712.026,00	5.800.599.928,00	(5.757.887.902,00)	(99,26)
Jumlah	139.700.638.058,32	205.559.066.270,35	(65.858.428.212,03)	(32,04)

Nilai Piutang periode tahun 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp88.177.503.399,79 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp139.700.638.058,32 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp51.523.134.658,53. Rincian untuk masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

<i>Penyisihan Piutang Pendapatan</i>	31 Desember 2022		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak	109.612.917.952,20	83.770.619.952,34	25.842.297.999,86
Piutang Retribusi	3.013.570.774,00	1.674.119.139,70	1.339.451.634,30
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.246.180.538,12	2.732.764.307,75	20.513.416.230,37
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	3.785.256.768,00	-	3.785.256.768,00
Piutang Lainnya	42.712.026,00	-	42.712.026,00
Jumlah	139.700.638.058,32	88.177.503.399,79	51.523.134.658,53

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp109.612.917.952,20 dan Rp107.116.128.772,20. Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.496.789.180,00 atau 2,33 persen dari Piutang Pajak per 31 Desember 2021. Rincian Piutang Pajak disajikan dalam tabel berikut:

<i>Piutang Pajak</i>	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-	0,00
Piutang Pajak Reklame	439.528.655,00	413.037.180,00	26.491.475,00	6,41
Piutang Pajak Air Tanah	462.906.951,20	449.280.951,20	13.626.000,00	3,03
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	108.145.477.505,00	105.688.805.800,00	2.456.671.705,00	2,32
Piutang BPHTB	556.332.121,00	556.332.121,00	-	0,00
Jumlah	109.612.917.952,20	107.116.128.772,20	2.496.789.180,00	2,33



Nilai Piutang Pajak periode tahun 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp25.842.297.999,86 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp109.612.917.952,20 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp83.770.619.952,34. Rincian untuk masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-
Piutang Pajak Reklame	439.528.655,00	225.231.827,24	214.296.827,76
Piutang Pajak Air Tanah	462.906.951,20	235.375.149,95	227.531.801,25
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	108.145.477.505,00	82.745.008.134,15	25.400.469.370,85
Piutang BPHTB	556.332.121,00	556.332.121,00	-
Jumlah	109.612.917.952,20	83.770.619.952,34	25.842.297.999,86

Penjelasan untuk masing-masing Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp8.672.720,00 merupakan tagihan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah. Untuk tahun pajak setelah tahun 2009 tidak terdapat piutang dikarenakan untuk pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan mekanisme *self assessment* sehingga tidak terdapat ketetapan yang belum dibayar;
- 2) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp439.528.655,00 terdiri dari ketetapan pajak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 yang belum dibayarkan;
- 3) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp462.906.951,20 merupakan ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang belum dibayarkan;
- 4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp108.145.477.505,00 terdiri atas tagihan PBB-P2 yang merupakan pengalihan dari Direktorat Pajak Kementerian Keuangan untuk tahun pajak 2012 dan sebelumnya serta piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemkab Banyumas mulai tahun pajak 2013. Mutasinya sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Tahun Pajak	Tahun 2001 s.d. 2012	Tahun 2013 - 2021	Jumlah
Pelimpahan dari KPP	44.141.191.361,00	-	44.141.191.361,00
Penerbitan SKP	-	-	-
SK Cleansing	9.969.240.057,00	-	9.969.240.057,00
Tahun 2013	-	58.135.009.776,00	58.135.009.776,00
Tahun 2014	-	40.082.440.780,00	40.082.440.780,00
Tahun 2015	-	45.743.403.840,00	45.743.403.840,00
Tahun 2016	-	49.233.309.911,00	49.233.309.911,00
Tahun 2017	-	54.712.158.583,00	54.712.158.583,00
Tahun 2018	-	54.998.698.263,00	54.998.698.263,00
Tahun 2019	-	55.439.651.736,00	55.439.651.736,00
Tahun 2020	-	66.999.137.036,00	66.999.137.036,00
Tahun 2021	-	67.024.527.362,00	67.024.527.362,00
Tahun 2022	-	67.260.699.037,00	67.260.699.037,00
	54.110.431.418,00	559.629.036.324,00	613.739.467.742,00
Penerimaan Kas Daerah:			
Tahun 2013	1.700.837.407,00	49.008.100.950,00	50.708.938.357,00
Tahun 2014	356.231.678,00	36.165.804.052,00	36.522.035.730,00
Tahun 2015	279.818.835,00	40.846.181.575,00	41.126.000.410,00
Tahun 2016	199.139.690,00	44.609.905.952,00	44.809.045.642,00
Tahun 2017	432.982.605,00	48.032.251.507,00	48.465.234.112,00
Tahun 2018	-	47.829.608.748,00	47.829.608.748,00
Tahun 2019	3.574.463.380,00	49.732.368.922,00	53.306.832.302,00
Tahun 2020	70.555.475,00	57.351.188.102,00	57.421.743.577,00
Tahun 2021	4.134.479.525,00	56.466.044.502,00	60.600.524.027,00
Tahun 2022	668.818.096,00	64.135.209.236,00	64.804.027.332,00
	11.417.326.691,00	494.176.663.546,00	505.593.990.237,00
		-	-
Saldo Piutang	42.693.104.727,00	65.452.372.778,00	108.145.477.505,00

Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB-P2 yang diterbitkan pada TA 2022 sebesar Rp67.024.527.362,00.

Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 semula merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Mulai 1 Januari 2013, PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah pada Pemkab Banyumas dilakukan melalui 2 (dua) dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan Pemkab Banyumas, yakni:

- 1) BAST tanggal 5 Januari 2013 berupa penyerahan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB.
- 2) BAST tanggal 8 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 sebesar Rp44.141.191.361,00 dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung.

Dari jumlah Piutang PBB-P2 yang diserahkan, Piutang tahun 2001 sebesar Rp10.220.120.998,00 telah diusulkan penghapusan piutang kepada Menteri



Kuangan melalui surat Nomor SP-3775/WPJ/32/KP/01/2012 tanggal 6 Agustus 2012. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, belum ada keputusan dari Menteri Keuangan atas usulan penghapusan piutang tersebut.

Berdasarkan Basis Data PBB-P2 pada BAST tanggal 5 Januari 2013, piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp108.145.477.505,00 sehingga berbeda dengan yang dinyatakan di dalam BAST tanggal 5 Januari 2013.

Untuk memastikan wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012, diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 900/359/tahun 2018 Tentang Penetapan Piutang PBB-P2 Hasil *Cleansing* PBB-P2 tahun pajak 2002-2012. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp43.890.310.420,00 dengan demikian jumlah piutang PBB-P2 pelimpahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp49.247.573.041,00.

- 5) Piutang BPHTB sebesar Rp556.332.121,00 seluruhnya merupakan sisa tagihan BPHTB yang semula merupakan piutang Pemerintah Pusat. Mulai TA 2011, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan pengalihan kewenangan tersebut, dialihkan pula tagihan-tagihan yang belum dibayar. Penambahan Piutang BPHTB pada TA 2022 merupakan koreksi atas perhitungan Piutang BPHTB tahun sebelumnya.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp3.013.570.774,00 dan Rp2.117.023.536,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp896.547.238,00 atau 42,35 persen dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2021. Rincian Piutang Retribusi disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Retribusi	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	863.524.303,00	882.524.303,00	(19.000.000,00)	(2,15)
Retribusi Pelayanan Pasar	307.304.395,00	308.609.395,00	(1.305.000,00)	(0,42)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	808.213.805,00	241.674.138,00	566.539.667,00	234,42
Piutang Retribusi Teminal	157.478.500,00	157.478.500,00	-	-
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	352.775.000,00	281.775.000,00	71.000.000,00	25,20
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	517.880.021,00	238.567.450,00	279.312.571,00	117,08
Piutang Retribusi Izin Gangguan	6.394.750,00	6.394.750,00	-	-
Jumlah	3.013.570.774,00	2.117.023.536,00	896.547.238,00	42,35

Nilai Piutang Retribusi periode Tahun 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.272.629.376,10 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.013.570.774,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.740.941.397,90. Rincian untuk masing-masing Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:



<i>Piutang Retribusi</i>	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	863.524.303,00	768.603.553,00	94.920.750,00
Retribusi Pelayanan Pasar	307.304.395,00	295.401.895,00	11.902.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	808.213.805,00	142.371.893,15	665.841.911,85
Piutang Retribusi Terminal	157.478.500,00	157.478.500,00	-
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	352.775.000,00	175.138.750,00	177.636.250,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	517.880.021,00	128.729.798,55	389.150.222,45
Piutang Retribusi Izin Gangguan	6.394.750,00	6.394.750,00	-
Jumlah	3.013.570.774,00	1.674.119.139,70	1.339.451.634,30

Berikut penjelasan untuk masing-masing Piutang Retribusi.

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp863.524.303,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari kekurangan penyetoran berdasarkan perjanjian pengelolaan parkir dengan pihak ketiga sampai dengan TA 2022;
- 2) Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp307.304.395,00 merupakan tagihan Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri atas tunggakan bea penggantian bangunan kios lantai 2 Pasar Wage Purwokerto, tunggakan retribusi lavatori Pasar Wage Purwokerto dan tunggakan PT Matahari Putra;
- 3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp808.213.805,00 terdiri atas:
 - Piutang Retribusi Sewa Tanah/IPTPD berada pada DPMPTSP sebesar Rp14.261.200,00.
 - Piutang Retribusi Sewa Tanah/Bangunan Kios pada Dinporabudpar sebesar Rp30.948.500,00.
 - Sisanya sebesar Rp763.004.105,00 merupakan Piutang Retribusi tanah eks-bengkok yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut:

<i>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	2022 (Rp)
Kecamatan Purwokerto Barat	173.071.597,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	396.795.075,00
Kecamatan Purwokerto Timur	182.445.968,00
Kecamatan Purwokerto Utara	7.666.465,00
Kecamatan Sumpiuh	3.025.000,00
Jumlah	763.004.105,00

- 4) Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp157.478.500,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari perjanjian sewa pengelolaan sarana di terminal sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp137.778.800,00 dan kekurangan setor tahun 2016 sebesar Rp19.699.700,00;
- 5) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp517.880.021,00 merupakan tagihan Retribusi IMB pada DPMPTSP sampai dengan TA 2022;



- 6) Piutang Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp6.394.750,00 merupakan tagihan Retribusi Ijin Gangguan pada DPMPTSP sampai dengan TA 2022;
- 7) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp352.775.000,00 merupakan tagihan Tempat Khusus Parkir pada Dinperindag sampai dengan TA 2022.

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp23.246.180.538,12 dan Rp78.460.102.653,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp55.213.922.114,88 atau minus 70,37 persen dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	1.661.823,12	-	1.661.823,12	-
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	202.500.000,00	202.500.000,00	-	-
	36.695.664,00	36.698.864,00	(3.200,00)	(0,01)
Piutang Denda Retribusi				
Piutang BLUD	23.005.323.051,00	78.220.903.789,00	(55.215.580.738,00)	(70,59)
Jumlah	23.246.180.538,12	78.460.102.653,00	(55.213.922.114,88)	(70,37)

Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah periode 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp20.848.997.025,72 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.246.180.538,12 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.397.183.512,40. Rincian untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

Piutang Lain Lain PAD yang Sah	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	1.661.823,12	-	1.661.823,12
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	202.500.000,00	20.250.000,00	182.250.000,00
Piutang Denda Retribusi	36.695.664,00	33.888.839,00	2.806.825,00
Piutang BLUD	23.005.323.051,00	2.678.625.468,75	20.326.697.582,25
Jumlah	23.246.180.538,12	2.732.764.307,75	20.513.416.230,37

Penjelasan untuk masing-masing piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:



- 1) Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah adalah bunga jasa giro TDF yang masih di Rekening BI sebesar Rp1.661.823,12.
- 2) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Sebesar Rp202.500.000,00 dari kegiatan yang putus kontrak, pada Dinas Pekerjaan Umum.
- 3) Piutang Denda Retribusi
Piutang Denda Retribusi sebesar Rp36.695.664,00 merupakan denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinhub yang sampai pada 31 Desember 2022 belum terdapat pelunasan.
- 4) Piutang BLUD
Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp23.005.323.051,00 dan Rp78.220.903.789,00. Piutang BLUD Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp55.215.580.738,00 atau turun 70,59 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Piutang BLUD per UPT dalam tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Piutang BLUD</i>	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	16.454.000,00	22.668.210,00	(6.214.210,00)	(27,41)
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	0,00	0,00	-	-
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	112.454.700,00	151.836.594,00	(39.381.894,00)	(25,94)
Puskesmas Ajibarang I	0,00	27.126.825,00	(27.126.825,00)	(100,00)
Puskesmas Ajibarang II	0,00	15.642.125,00	(15.642.125,00)	(100,00)
Puskesmas Banyumas	0,00	23.025.000,00	(23.025.000,00)	(100,00)
Puskesmas Baturraden I	2.440.000,00	14.945.000,00	(12.505.000,00)	(83,67)
Puskesmas Baturraden II	945.000,00	4.125.000,00	(3.180.000,00)	(77,09)
Puskesmas Cilongok I	0,00	33.664.500,00	(33.664.500,00)	(100,00)
Puskesmas Cilongok II	10.634.725,00	43.081.075,00	(32.446.350,00)	(75,31)
Puskesmas Gumelar	45.350.000,00	58.465.275,00	(13.115.275,00)	(22,43)
Puskesmas Jatilawang	42.559.000,00	68.633.825,00	(26.074.825,00)	(37,99)
Puskesmas Kalibagor	6.785.000,00	12.166.000,00	(5.381.000,00)	(44,23)
Puskesmas Karanglewas	0,00	14.140.000,00	(14.140.000,00)	(100,00)
Puskesmas Kebasen	45.778.000,00	39.210.100,00	6.567.900,00	16,75
Puskesmas Kedungbanteng	0,00	30.046.325,00	(30.046.325,00)	(100,00)
Puskesmas Kembaran I	8.644.725,00	9.538.075,00	(893.350,00)	(9,37)
Puskesmas Kembaran II	0,00	4.969.585,00	(4.969.585,00)	(100,00)
Puskesmas Kemranjen I	0,00	29.815.500,00	(29.815.500,00)	(100,00)
Puskesmas Kemranjen II	17.930.000,00	15.946.425,00	1.983.575,00	12,44
Puskesmas Lumbir	51.431.950,00	100.234.625,00	(48.802.675,00)	(48,69)
Puskesmas Patikraja	11.655.000,00	41.363.675,00	(29.708.675,00)	(71,82)
Puskesmas Pekuncen I	5.560.000,00	25.440.000,00	(19.880.000,00)	(78,14)
Puskesmas Pekuncen II	0,00	0,00	-	-
Puskesmas Purwojati	31.210.525,00	65.349.625,00	(34.139.100,00)	(52,24)
Puskesmas Purwokerto Barat	630.000,00	5.789.000,00	(5.159.000,00)	(89,12)
Puskesmas Purwokerto Selatan	4.915.000,00	2.070.000,00	2.845.000,00	137,44
Puskesmas Purwokerto Timur I	3.428.000,00	2.666.000,00	762.000,00	28,58
Puskesmas Purwokerto Timur II	0,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)	(100,00)
Puskesmas Purwokerto Utara I	2.584.000,00	1.780.000,00	804.000,00	45,17
Puskesmas Purwokerto Utara II	0,00	5.958.000,00	(5.958.000,00)	(100,00)
Puskesmas Rawalo	36.627.000,00	62.180.624,00	(25.553.624,00)	(41,10)
Puskesmas Sokaraja I	23.575.000,00	3.939.000,00	19.636.000,00	498,50
Puskesmas Sokaraja II	62.000,00	7.110.000,00	(7.048.000,00)	(99,13)
Puskesmas Somagede	0,00	21.975.000,00	(21.975.000,00)	(100,00)
Puskesmas Sumbang I	700.000,00	13.877.675,00	(13.177.675,00)	(94,96)
Puskesmas Sumbang II	141.000,00	11.496.500,00	(11.355.500,00)	(98,77)
Puskesmas Sumpiuh I	0,00	90.925.050,00	(90.925.050,00)	(100,00)
Puskesmas Sumpiuh II	10.751.000,00	9.887.200,00	863.800,00	8,74
Puskesmas Tambak I	0,00	49.020.850,00	(49.020.850,00)	(100,00)
Puskesmas Tambak II	1.272.000,00	26.912.750,00	(25.640.750,00)	(95,27)
Puskesmas Wangon I	56.125.000,00	120.347.225,00	(64.222.225,00)	(53,36)
Puskesmas Wangon II	0,00	18.115.025,00	(18.115.025,00)	(100,00)
Rumah Sakit Mata Purwokerto	0,00	365.575.400,00	(365.575.400,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	15.541.236.296,00	30.274.852.112,00	(14.733.615.816,00)	(48,67)
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	6.913.444.130,00	46.273.823.014,00	(39.360.378.884,00)	(85,06)
Lokawisata Baturraden	0,00	0,00	-	-
Jumlah	23.005.323.051,00	78.220.903.789,00	(55.215.580.738,00)	(70,59)



d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp8.628.957.788,00. Dengan demikian, Piutang Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp8.628.957.788,00 atau minus 100 persen dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Pengakuan Piutang Pendapatan berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
DBH PBB	-	3.835.154.044,00	(3.835.154.044,00)	(100,00)
DBH PPh Pasal 21	-	3.528.808.894,00	(3.528.808.894,00)	(100,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	962.080.315,00	(962.080.315,00)	(100,00)
DBH CHT	-	200.959.641,00	(200.959.641,00)	(100,00)
DBH SDA Minyak Bumi	-	-	-	-
DBH SDA Gas Bumi	-	-	-	-
DBH SDA Mineral dan Batubara-	-	21.056.077,00	(21.056.077,00)	(100,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas	-	16.716.989,00	(16.716.989,00)	(100,00)
DBH SDA Kehutanan-PSDH	-	64.181.828,00	(64.181.828,00)	(100,00)
DBH SDA Perikanan	-	-	-	-
Jumlah	-	8.628.957.788,00	(8.628.957.788,00)	(100,00)

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp0,00 dari sebelumnya sebesar Rp8.628.957.788,00 dikarenakan penyesuaian dari diterbitkannya PMK Nomor 127/PMK.07/2021 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2022. Adapun realisasi penyaluran DBH Kurang bayar yang terlihat pada aplikasi SIMTRADA sesuai dan sama dengan nilai yang sudah ditetapkan di PMK tersebut. Rincian komponen perhitungan kurang bayar DBH yang meliputi saldo awal 2021, penyesuaian, penetapan, pelunasan dan Sisa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

NAMA	Saldo awal Kurang Bayar Tahun 2021	Penyesuaian	Penetapan Kurang bayar No. 127/PMK.07/2022	Pelunasan 2022		Total Pelunasan Kurang bayar	Total sisa Kurang bayar
				Pengurangan Nomor 37/KM.7/2022	Pengurangan KMK Nomor 29/KM.7/2022		
Piutang Bagi Hasil Pajak							
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	3.835.154.044	188.704.993	3.646.449.051	3.646.449.051		3.646.449.051	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	3.528.808.894	1.494.757.237	2.034.051.657		2.034.051.657	2.034.051.657	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	962.080.315	-537.082.357	1.499.162.672	592.477.409	906.685.263	1.499.162.672	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	200.959.641	-408.948.509	609.908.150	609.908.150		609.908.150	-
Jumlah						-	-
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak						-	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	-	-49.718.379	49.718.379	49.718.379		49.718.379	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	-	-191.192.382	191.192.382	191.192.382		191.192.382	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	21.056.077	-138.765.111	159.821.188	159.821.188		159.821.188	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	16.716.989	-125.905.620	142.622.609	142.622.609		142.622.609	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	64.181.828	-4.997.571	69.179.399	69.179.399		69.179.399	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	-	-	-			-	-
Jumlah	8.628.957.788	226.852.301	8.402.105.487	5.461.368.567	2.940.736.920	8.402.105.487	0

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa piutang tersebut berasal Pemerintah Pusat yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap piutang transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.



e. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.785.256.768,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Banyumas dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.955.617.734,00	1.894.803.328,00	60.814.406,00	3,21
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.057.569.133,00	1.131.191.568,00	(73.622.435,00)	(6,51)
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	706.266.190,00	451.270,00	705.814.920,00	156.406,35
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	65.803.711,00	31.749.188,00	34.054.523,00	107,26
Jumlah	3.785.256.768,00	3.058.195.354,00	727.061.414,00	23,77

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa Piutang tersebut berasal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap Piutang Transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

f. Piutang Lain-Lain

Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp42.712.026,00 adalah piutang hibah dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP (*Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program*) Rp42.712.026,00 yang dilaksanakan di tahun 2022 tetapi belum di usulkan permintaan penyaluran, karena kegiatan tersebut dilaksanakan bulan Desember 2022, sehingga permintaan penyaluran baru dilaksanakan tahun 2022 dan Piutang Lainnya pada RSUD Banyumas Rp2.035.852,00 adalah recall obat ditarik penyedia sampai dengan akhir 31 Desember 2022 belum dikembalikan.

Hibah IPDMIP adalah hibah dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Di Kabupaten Banyumas, kegiatan IPDMIP dilaksanakan oleh Bapedalitbang, DPU dan DinpertainKP.

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp88.177.503.399,79 dan Rp87.710.501.874,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp467.001.525,79 atau 0,53 persen dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih :	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2021 (%)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	83.770.619.952,34	82.337.557.379,00	1.433.062.573,34	1,74
Penyisihan Piutang Retribusi	1.674.119.139,70	1.490.489.969,35	183.629.170,35	12,32
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.732.764.307,75	3.882.454.525,65	(1.149.690.217,90)	-29,61
Jumlah	88.177.503.399,79	87.710.501.874,00	467.001.525,79	0,53

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan SKPD dan jenis piutang adalah sebagai berikut:

SKPD	Penyisihan Piutang (Rp)			
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Lain-lain PAD yang sah	Jumlah
DPMPTSP	-	149.328.748,55	-	149.328.748,55
DPU	-	-	20.250.000,00	20.250.000,00
Dinpertankp	-	-	-	-
Dinporabudpar	-	5.411.125,00	-	5.411.125,00
Bappenda	83.770.619.952,34	-	-	83.770.619.952,34
Dinhub	-	926.082.053,00	33.888.839,00	959.970.892,00
Dinperindag	-	470.540.645,00	-	470.540.645,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-
Satpol PP	-	-	-	-
Kec. Purwokerto Barat	-	29.747.211,10	-	29.747.211,10
Kec. Purwokerto Utara	-	651.576,25	-	651.576,25
Kec. Purwokerto Timur	-	66.620.472,25	-	66.620.472,25
Kec. Purwokerto Selatan	-	25.586.058,55	-	25.586.058,55
Kec. Sumpiuh	-	151.250,00	-	151.250,00
RSUD Banyumas	-	-	2.210.612.735,50	2.210.612.735,50
RSUD Ajibarang	-	-	440.480.602,00	440.480.602,00
BLUD UPT Dinkes	-	-	27.532.131,25	27.532.131,25
JUMLAH	83.770.619.952,34	1.674.119.139,70	2.732.764.307,75	88.177.503.399,79

9. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp129.153.288,00 dan Rp175.561.357,50. Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.408.069,50 atau minus 26,43 persen dari Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021.



Beban Dibayar Dimuka :	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2021(Rp)	%
Dinperindag	77.175.000,00	84.337.807,50	(7.162.807,50)	(8,49)
Dinkominfo	37.580.049,00	91.223.550,00	(53.643.501,00)	(58,80)
RSUD Banyumas	13.160.852,00	0,00	13.160.852,00	100,00
Puskesmas Purwojati	172.200,00	0,00	172.200,00	100,00
Puskesmas Rawalo	540.346,00	0,00	540.346,00	100,00
Puskesmas Ajibarang I	457.792,00	0,00	457.792,00	100,00
Puskesmas Lumbir	67.049,00	0,00	67.049,00	100,00
Jumlah	129.153.288,00	175.561.357,50	(46.408.069,50)	(26,43)

- a) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Dinperindag sebesar Rp77.175.000,00 adalah beban premi asuransi dibayar dimuka selama 6 (enam) bulan atas Polis untuk 8 (delapan) pasar. Premi asuransi kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dibayarkan pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan SP2D Nomor 11463/LS/2022. Nilai premi seluruhnya adalah sebesar Rp154.350.000,00 dengan periode pertanggungan 12 (dua belas) bulan, mulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 1 Juli 2023. Rincian perhitungan Beban Dibayar di Muka untuk masing-masing objek pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

No	Objek	Besarnya Premi	Jangka Waktu	Premi per bulan	Premi dibayar di muka (6 bulan)
1	Pasar Sumpiuh	16.200.000,00	12 bulan	1.350.000,00	8.100.000,00
2	Pasar Jatilawang	14.400.000,00	12 bulan	1.200.000,00	7.200.000,00
3	Pasar Ajibarang	13.500.000,00	12 bulan	1.125.000,00	6.750.000,00
4	Pasar Sokaraja	13.500.000,00	12 bulan	1.125.000,00	6.750.000,00
5	Pasar Wangon	13.500.000,00	12 bulan	1.125.000,00	6.750.000,00
6	Pasar Wage	36.000.000,00	12 bulan	3.000.000,00	18.000.000,00
7	Pasar Manis	20.250.000,00	12 bulan	1.687.500,00	10.125.000,00
8	Pasar Banyumas	27.000.000,00	12 bulan	2.250.000,00	13.500.000,00
JUMLAH		154.350.000,00			77.175.000,00

- b) Saldo beban dibayar di Muka pada Dinkominfo sebesar Rp37.580.049,00 merupakan pembayaran operasional SMS Gateway, perpanjangan domain dan operasional Google Maps untuk penggunaan tahun 2022 selama 1 bulan dengan rincian sebagai berikut:



Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Premi per bulan/hari	Premi dibayar di muka
Perpanjangan Domain 2022	15.151.500.00	12 bulan	1.262.625.00	15.151.500.00
Operasional Google Maps 2022	69.776.376.00	1 bulan	22.428.549.00	22.428.549.00
	84.927.876.00			37.580.049.00

- c) Saldo Beban Dibayar di Muka pada RSUD Banyumas sebesar Rp13.160.852,00 adalah Sewa Gedung dan Bangunan untuk Gudang Aset selama 6 (enam) bulan atas Sewa untuk 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 November 2023 sebesar Rp11.125.000,00 dan Beban Dibayar di Muka yang terjadi akibat adanya penarikan obat (retur) karena berisiko mengandung cemaran Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dimana sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada penggantian dari pihak penyedia sebesar Rp2.035.852,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Sewa per bulan	Beban dibayar di muka
Gedung dan Bangunan	13.350.000.00	12 bulan	1.112.500.00	11.125.000.00
Persediaan Obat		-	-	2.035.852.00
JUMLAH	13.350.000.00			13.160.852.00

- d) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Puskesmas Purwojati sebesar Rp172.200,00 adalah Beban Dibayar di Muka yang terjadi akibat adanya penarikan obat (retur) karena berisiko mengandung cemaran Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dimana sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada penggantian dari pihak penyedia baik berupa uang maupun dalam bentuk barang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Sewa/Premi per bulan	Beban dibayar di muka
1	Persediaan Obat	229.600.00	-	-	172.200.00
	JUMLAH	229.600.00	-	-	172.200.00

- e) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Puskesmas Rawalo sebesar Rp540.346,00 adalah Beban Dibayar di Muka yang terjadi akibat adanya penarikan obat (retur) karena beresiko mengandung cemaran Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dimana sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada penggantian dari pihak penyedia baik berupa uang maupun dalam bentuk barang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



No	Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Sewa/Premi per bulan	Beban Dibayar Dimuka
1	Persediaan Obat	1.466.542.00	-	-	540.346.00
JUMLAH		1.466.542.00	-	-	540.346.00

- f) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Puskesmas Ajibarang I sebesar Rp457.792,00 adalah Beban Dibayar di Muka yang terjadi akibat adanya penarikan obat (retur) karena beresiko mengandung cemaran Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dimana sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada penggantian dari pihak penyedia baik berupa uang maupun dalam bentuk barang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Sewa/Premi per bulan	Beban dibayar di muka
1	Persediaan Obat	497.600.00	-	-	457.792.00
JUMLAH		497.600.00	-	-	457.792.00

- g) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Puskesmas Lumbir sebesar Rp67.049,00 adalah Beban Dibayar di Muka yang terjadi akibat adanya penarikan obat (retur) karena beresiko mengandung cemaran Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dimana sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada penggantian dari pihak penyedia baik berupa uang maupun dalam bentuk barang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Sewa/Premi per bulan	Beban dibayar di muka
1	Persediaan Obat	430.470.00	-	-	67.049.00
JUMLAH		430.470.00	-	-	67.049.00

10. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp56.036.996.873,29 dan Rp52.039.125.588,00. Persediaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.997.871.285,29 minus 7,68 persen dari Tahun 2021. Rincian persediaan disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Persediaan	Persediaan (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	(%)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	647.844.231,00	950.081.037,00	(302.236.806,00)	(31,81)
Bahan Kimia	98.230.711,00	620.489.276,00	(522.258.565,00)	(84,17)
Bahan Bakar dan Pelumas	161.967.800,00	78.038.000,00	83.929.800,00	107,55
Bahan/Bibit Tanaman	18.362.000,00	126.135.000,00	(107.773.000,00)	(85,44)
Isi Tabung Gas	21.005.000,00	350.000,00	20.655.000,00	5.901,43
Bahan Lainnya	2.145.771.774,00	1.642.750.224,00	503.021.550,00	30,62
Suku Cadang Alat Kedokteran	364.263.326,00	307.970.543,00	56.292.783,00	18,28
Alat Tulis Kantor	5.463.740.836,00	5.866.774.488,00	(403.033.652,00)	(6,87)
Kertas dan Cover	429.053.433,00	452.628.326,00	(23.574.893,00)	(5,21)
Bahan Cetak	1.702.611.887,00	1.568.195.476,00	134.416.411,00	8,57
Benda Pos	9.231.000,00	9.040.000,00	191.000,00	2,11
Bahan Komputer	465.383.797,00	281.621.872,00	183.761.925,00	65,25
Perabot Kantor	586.668.966,00	893.809.733,00	(307.140.767,00)	(34,36)
Alat Listrik	743.357.025,00	766.498.568,00	(23.141.543,00)	(3,02)
Perlengkapan Dinas	192.900.600,00	395.714.500,00	(202.813.900,00)	(51,25)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	497.416.653,00	288.346.271,00	209.070.382,00	72,51
Obat	30.575.143.103,53	32.546.926.626,00	(1.971.783.522,47)	(6,06)
Obat-obatan Lainnya	10.942.184.578,00	4.876.015.165,00	6.066.169.413,00	124,41
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	529.616.844,00	121.401.000,00	408.215.844,00	336,25
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	100,00
Natura	380.287.108,76	213.161.433,00	167.125.675,76	78,40
Pakan	55.858.800,00	33.178.050,00	22.680.750,00	68,36
Suku Cadang Lainnya	4.575.000,00	-	4.575.000,00	100,00
Natura dan Pakan Lainnya	1.522.400,00	-	1.522.400,00	100,00
TOTAL	56.036.996.873,29	52.039.125.588,00	3.997.871.285,29	7,68

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD.

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Daftar Barang Persediaan per 31 Desember 2022 disajikan di Lampiran V.8.A

Selain persediaan yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2022, terdapat persediaan vaksin Covid-19. Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut:



a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 dan 2022 masing-masing sebanyak 0 dosis dan 93.754 dosis, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 206.400 dosis, telah digunakan sebanyak 206.400 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2022 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 2.201.854 dosis, telah digunakan sebanyak 2.107.405 dosis, dikembalikan sebanyak 663 dosis dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluwarsa) sebanyak 32 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2022 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 93.754 dosis. Rincian vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran V.8.B

b. Bahan Habis Pakai (BHP) dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2021 dan 2022 masing-masing terdiri dari 0 item dan 408 item dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima BHP dari Kemenkes. Pada posisi per 31 Desember 2022 tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2022 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2022 Kabupaten Banyumas menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 3.708.855 item, telah digunakan sebanyak 3.300.830 item. Pada posisi per 31 Desember 2022 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 408.025 item. Rincian BHP untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran V.8.C

Selain itu, di luar saldo Persediaan per 31 Desember 2022, terdapat persediaan rusak/kedaluwarsa yang tidak dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2022, yaitu Persediaan Bahan Obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Persediaan Bahan Obat-obatan</i>	Nilai per 31 Desember 2022
<i>Kadaluarsa</i>	(Rp)
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	747.452,00
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	0,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	8.427.164,00
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0,00
Puskesmas Ajibarang I	12.824.191,00
Puskesmas Ajibarang II	3.247.763,00
Puskesmas Banyumas	4.042.641,00
Puskesmas Baturraden I	16.145.614,00
Puskesmas Baturraden II	0,00
Puskesmas Cilongok I	0,00
Puskesmas Cilongok II	0,00
Puskesmas Gumelar	2.522.558,00
Puskesmas Jatilawang	0,00
Puskesmas Kalibagor	0,00
Puskesmas Karanglewas	5.485.588,00
Puskesmas Kebasen	3.821.541,00
Puskesmas Kedungbanteng	1.453.241,00
Puskesmas Kembaran I	6.060.409,00
Puskesmas Kembaran II	395.680,00
Puskesmas Kemranjen I	1.387.314,00
Puskesmas Kemranjen II	4.753.833,00
Puskesmas Lumbir	Rp 5,824,937
Puskesmas Patikraja	6.921.152,00
Puskesmas Pekuncen I	10.860.912,00
Puskesmas Purwojati	6.171.158,00
Puskesmas Purwokerto Barat	4.192.894,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	0,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	Rp 2,405,768,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	0,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	4.488.192,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	1.136.994,00
Puskesmas Rawalo	864.668,00
Puskesmas Sokaraja I	3.196.635,00
Puskesmas Sokaraja II	3.002.787,00
Puskesmas Somagede	0,00
Puskesmas Sumbang I	0,00
Puskesmas Sumbang II	3.961.850,00
Puskesmas Sumpiuh I	16.707.898,00
Puskesmas Sumpiuh II	3.033.798,00
Puskesmas Tambak I	10.816.863,00
Puskesmas Tambak II	2.344.850,00
Puskesmas Wangon I	6.176.604,00
Puskesmas Wangon II	5.412.412,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	47.765.536,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	209.700.526,00
Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto	0,00
Dinkes (UPKF dan Pkm Pekuncen II)	5.169.667,00
Jumlah	423.240.385,00



B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp425.916.693.914,23 dan Rp393.551.925.711,97. Dengan demikian, saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp32.364.768.202,26 atau 8,22 persen dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021.

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan dana Pemkab Banyumas dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

<i>Investasi Jangka Panjang</i>	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1. Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	11.723.859.678,00	11.744.434.705,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.485.645.906,20)	(4.366.379.866,65)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)	7.238.213.771,80	7.378.054.838,35
2. Investasi Permanen	418.678.480.142,43	386.173.870.873,62
	425.916.693.914,23	393.551.925.711,97

1. Investasi Non Permanen

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 merupakan nilai penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk program dana bergulir dengan rincian mutasi sebagai berikut:

<i>Investasi Non Permanen</i>	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dana Bergulir	11.723.859.678,00	11.744.434.705,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.485.645.906,20)	(4.366.379.866,65)
Jumlah Bersih	7.238.213.771,80	7.378.054.838,35

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.723.859.678,00. Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp7.238.213.771,80 yang berasal dari nilai bruto Rp11.723.859.678,00 dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.485.645.906,20.

Rincian komponen Dana Bergulir sebesar Rp11.723.859.678,00 adalah sebagai berikut:

<i>Dana Bergulir</i>	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)
Pada Bank Jateng	309.985.604,00	344.537.085,00	(34.551.481,00)
Pada PT BPR BKK	11.413.874.074,00	11.399.897.620,00	13.976.454,00
Jumlah Bersih	11.723.859.678,00	11.744.434.705,00	(20.575.027,00)

- Program Dana Bergulir melalui Bank Jateng Cabang Purwokerto selaku *channelling agency*, dengan jumlah dana sebesar Rp309.985.604,00. Saldo Dana Bergulir tersebut berasal dari program dana bergulir tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp310.313.631,00 00 dikurangi pengembalian jasa giro bunga pokok Tahun 2011



yang sudah masuk RKUD dan diakui sebagai pendapatan lain-lain sebesar Rp34.551.481,00 dan ditambah tunggakan bunga dana bergulir sebesar Rp34.223.454,00.

Saldo dana bergulir yang diterima dan disetor kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pencairan	Pengembalian	Sisa	Tunggakan Bunga	Jumlah Dana Bergulir
2002	18,000,000.00	7,900,000.00	10,100,000.00	-	-
2003	200,000,000.00	156,350,000.00	43,650,000.00	-	-
2004	50,000,000.00	40,716,700.00	9,283,300.00	-	-
2005	116,000,000.00	103,719,669.00	12,280,331.00	-	-
2006	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-
2007	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-
Sub total	619,000,000.00	308,686,369.00	310,313,631.00	-	-
2011	-	34,551,481.00	- 34,551,481.00	-	-
Total	619,000,000.00	343,237,850.00	275,762,150.00	34,223,454.00	309,985,604.00

Rincian saldo dana bergulir sebesar Rp309.985.604,00 terdiri atas:

- 1) Angsuran pokok dana bergulir sebesar Rp199.422.531,00 yang berada di rekening Bank Jateng;
- 2) Tunggakan pokok dana bergulir yang masih berada di masyarakat sebesar Rp110.954.599,00;
- 3) Tunggakan bunga sebesar Rp34.223.454,00.
Tunggakan pokok dan tunggakan bunga tersebut seluruhnya dalam status macet.
- 4) Pengakuan atas pengembalian Jasa giro Pokok pada rekening Bank Jateng pada tahun 2011 mengurangi nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp34.551.481,00.

Rincian perkembangan dana bergulir PKMK Kabupaten Banyumas pada PT. Bank BPD Jateng Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Perjanjian Kredit	Plafon	Saldo Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga
Tahun 2003	35,000,000.00	29,324,500.00	29,024,500.00	14,871,489.00
Tahun 2005	66,000,000.00	20,045,831.00	18,216,663.00	5,568,673.00
Tahun 2006	135,000,000.00	54,730,437.00	51,530,437.00	10,949,996.00
Tahun 2007	30,000,000.00	14,982,999.00	12,182,999.00	2,833,296.00
Jumlah	266,000,000.00	119,083,767.00	110,954,599.00	34,223,454.00

- b. Program dana bergulir melalui PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) tahun 2022 sebesar Rp11.723.859.678,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp20.575.027,00 dari Dana Bergulir tahun 2021 sebesar Rp11.744.434.705,00.

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp4.485.645.906,20 dan Rp4.366.379.866,65. Dengan demikian, Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp119.266.039,55 atau naik 2,73 persen dari TA 2021.



Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih diterapkan mulai TA 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Mulai TA 2014 sampai dengan TA 2018, pembentukan dana bergulir tidak tertagih didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas.

Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuk Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan persentase tertentu dikalikan jumlah dana bergulir sesuai dengan status perguliran (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet, Bermasalah).

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.485.645.906,20 terdiri atas:

Kelompok Dana Bergulir	Pokok	Bunga	Jumlah Bruto	Peny. Tdk Tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Dana Bergulir melalui Bank Jateng					
Macet	110.954.599,00	34.223.454,00	145.178.053,00	90%	130.660.247,70
Jumlah	110.954.599,00	34.223.454,00	145.178.053,00		130.660.247,70
Dana Bergulir melalui PD BPR BKK Purwokerto					
Lancar	1.343.822.568	76.008	1.343.898.576,00	5,0%	67.194.928,80
Kurang Lancar	82.000.195	1.878.661	83.878.856,00	10%	8.387.885,60
Diragukan	239.785.040	7.358.380	247.143.420,00	50%	123.571.710,00
Macet	4.121.671.860	495.918.289	4.617.590.149,00	90%	4.155.831.134,10
Jumlah	5.787.279.663,00	505.231.338,00	6.292.511.001,00		4.354.985.658,50
Jumlah Tidak Tert	5.898.234.262,00	539.454.792,00	6.437.689.054,00		4.485.645.906,20

3. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp418.678.480.142,43 dan Rp386.173.870.873,62. Dengan demikian, Investasi Permanen per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp32.504.609.268,81 atau 8,42 persen dari Investasi Permanen per 31 Desember 2021.

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*).



Metode biaya diterapkan untuk Investasi Permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada BUMD yang terkait.

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penilaian investasi disajikan sebesar investasi awal ditambah proporsi bagian laba Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Daerah.

Rincian atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

<i>Investasi Permanen</i>	Metode Pencatatan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tambah/(Kurang) (Rp)
PT. Bank BPD Jateng (Perseroda)	Biaya	54.419.000.000,00	48.419.000.000,00	6.000.000.000,00
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	Biaya	17.255.640.178,72	17.255.640.178,72	-
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	Ekuitas	96.499.636.205,75	90.448.382.398,75	6.051.253.807,00
Perumdam Tirta Satria	Ekuitas	240.464.635.424,54	223.386.862.713,79	17.077.772.710,75
PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Biaya	444.000.000,00	444.000.000,00	-
PT. BIJ (Perseroda)	Ekuitas	7.164.802.772,42	3.794.415.035,36	3.370.387.737,06
Perumda Pasar Satria	Ekuitas	2.430.765.561,00	2.425.570.547,00	5.195.014,00
		418.678.480.142,43	386.173.870.873,62	32.504.609.268,81

- a. Pada tahun 2022 terjadi penambahan investasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng (BPD) (Persero) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp6.000.000.000,00. PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) berkedudukan di Semarang dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 9.000.000 (empat juta) lembar saham Seri A dan 1.000.000 (satu juta) lembar saham Seri B. Dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00.

Berdasarkan hasil RUPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham pada Bank Jateng, yaitu sebesar 50,04 persen pada TA 2022, sedangkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas. Pemda Kabupaten Banyumas terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai pemilik dari 54.419 lembar Saham Atas Nama yang seluruhnya bernilai Rp54.419.000.000,00 atau dengan persentase kepemilikan sebesar 1,23 persen.

Pada TA 2022, PT. Bank BPD Jateng (Persero) mencatat laba bersih sebesar Rp1.677.183.000.000,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. Bank BPD Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



- b. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan konsolidasi atau penggabungan 29 PD. BKK di Jawa Tengah dimana PD BKK Purwokerto Selatan termasuk di dalamnya.

Modal dasar PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), rincian modal dasar dan modal disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah sebagai berikut:

	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
<i>Investasi Permanen</i>					
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)					
Pemkab Banyumas	31.268.840.000.00	3.38	12.250.000.000.00	3.34	19.018.840.000.00
Pemkab Lainnya	421.902.760.000.00	45.62	168.010.000.000.00	45.84	253.892.760.000.00
Pemprov Jateng	471.668.400.000.00	51.00	186.290.000.000.00	50.82	285.378.400.000.00
	924.840.000.000.00	100.00	366.550.000.000.00	100.00	558.290.000.000.00

Pada tahun 2018, proporsi modal disetor PD BKK Purwokerto Selatan oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar 49 persen. Akibat adanya peleburan (konsolidasi) PD BKK Purwokerto Selatan menjadi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) pada tahun 2019, proporsi modal disetor Pemkab Banyumas berkurang menjadi 3,46 persen. Perubahan porsi kepemilikan ini mengakibatkan perubahan metode penilaian investasi, yang pada awalnya menggunakan metode ekuitas menjadi menggunakan metode biaya sejak tahun 2019.

Pada TA 2022, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp46.835.526.063,00 (*Audited*) namun tidak membagikan dividen kepada pemilik. Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00059/2.0282/AU.2/07/0182-1/1/III/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pada TA 2022, Pemkab Banyumas tidak menambah penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan, modal dasar PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00. Investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terdiri atas saham dengan persentase 53,52 persen dengan rincian sebagai berikut:



	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
<i>Investasi Permanen</i>					
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)					
Pemprov Jateng	89.250.000.000,00	51,00	23.260.000.000,00	48,70	65.990.000.000,00
Pemkab Banyumas	85.750.000.000,00	49,00	24.500.000.000,00	51,30	61.250.000.000,00
	175.000.000.000,00	100,00	47.760.000.000,00	100,00	127.240.000.000,00

Perkembangan nilai investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	90.448.382.398,75
Dikurangi:		
- Penerimaan deviden tahun 2022	Rp	8.269.629.645,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2022 (<i>Audited</i>):	Rp	14.320.883.452,00
51,30% x Rp27.915.952.150,00		
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	96.499.636.205,75

Pada TA 2022 PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp27.915.952.150,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Sarastanto dan rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00025/2.1137/AU.2/07/1326-1/1/II/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- d. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, PDAM Tirta Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria. Modal dasar Perumdam Tirta Satria ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00. Pemkab Banyumas memiliki 100 persen saham Perumdam Tirta Satria.

Perkembangan nilai investasi pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Saldo per 31 Desember 2021	Rp	223.386.862.713,79
Dikurangi:		
- Bonus, Tantiem, Tanggungjawab Sosial	Rp	544.588.581,72
- Pengembalian penyertaan modal tahun 2022	Rp	258.000.000,00
- Penerimaan Dividen Tahun 2022	Rp	4.000.000.000,00
Ditambah:		
- Penambahan penyertaan modal	Rp	15.004.000.000,00
- Bagian laba tahun 2022 (<i>Audited</i>): 100,00% x Rp6.876.361.292,47	Rp	6.876.361.292,47
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	240.464.635.424,54

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/696 Tahun 2022 tentang Penetapan Dana Pembangunan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan/atau Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah atas Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun Buku 2014-2021, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria memiliki kewajiban menyetorkan Dana Pembangunan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan/atau Dividen Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan total nilai sebesar Rp18.931.880.194,85 yang harus dibayarkan dengan besaran dan batas waktu setor sebagai berikut:

- Tahun 2022 disetorkan sebesar Rp4.000.000.000,00 paling lambat 30 November 2022;
- Tahun 2023 disetorkan sebesar Rp4.000.000.000,00 paling lambat 30 November 2023;
- Tahun 2024 disetorkan sebesar Rp4.000.000.000,00 paling lambat 30 November 2024;
- Tahun 2025 disetorkan sebesar Rp6.931.880.194,85 paling lambat 30 November 2025;

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria telah menyetorkan Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan nomor bukti 2022/11/001095 tanggal 22 November 2022.

Pada TA 2022 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas mencatat laba bersih sebesar Rp6.876.361.292,47 (*Audited*). Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria telah diaudit oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00113/2.1065/AU.2/04/1217-1/1/III/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemkab/kota se-Jawa Tengah dan PT. Bank BPD Jateng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan disetor oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar Rp444.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemkab Banyumas tidak menambah penyertaan modal.



- f. PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ) adalah BUMD yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah industri, kelistrikan dan kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya beralih badan hukumnya menjadi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019, modal dasar PT. BIJ (Perseroda) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00. Pemegang saham PT. BIJ (Perseroda) adalah Pemkab Banyumas dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Gotong Royong. Rincian modal disetor PT. BIJ (Perseroda) adalah sebagai berikut.

<i>Investasi Permanen</i>	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BIJ (Perseroda)					
KPN Gotong Royong	10.000.000.00	0.10	10.000.000.00	0.14	-
Pemkab Banyumas	9.990.000.000.00	99.90	7.000.000.000.00	99.86	2.990.000.000.00
	10.000.000.000.00	100.00	7.010.000.000.00	100.00	2.990.000.000.00

Dengan persentase kepemilikan sebesar 99,86 persen, perkembangan nilai investasi Pemkab Banyumas pada PT. BIJ (Perseroda) selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021	3.794.415.035,36
Dikurangi:	
- Pembagian deviden Tahun 2022	50.000.000,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai investasi tahun sebelumnya	973.848.537,09
Ditambah:	
- Bagian laba tahun 2022 (Audited): 99,86% x Rp16.200.716,00	16.178.035,00
- Tambahan penyertaan modal 2022	Rp 4.000.000.000,00
- Koreksi ekuitas penambahan nilai investasi dari piutang deviden	378.058.239,15
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 7.164.802.772,42

Telah dilakukan koreksi ekuitas pengurangan nilai investasi dari kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp973.848.573,09 dan koreksi ekuitas penambahan nilai investasi dari piutang deviden PT. BIJ atas laba tahun 2014-2019 sebesar Rp378.058.239,15.

Pada Tahun 2022 PT. BIJ telah menyetorkan Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp50.000.000,00 yang merupakan pembayaran bagian dividen atas laba tahun 2014-2019 dengan nomor bukti 2022/10/001185 tanggal 25 Oktober 2022.

Pada TA 2022 PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp16.200.716,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. BIJ telah diaudit oleh



KAP Roni Pupung dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00089/2.1353/AU.2/11/1484-2/1/III/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- g. Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas merupakan BUMD yang berperan dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. PD. Pasar Satria ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka PD Pasar Satria diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perubahan ini juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2019 tentang Perumda Pasar Satria, modal dasar Perumda Pasar Satria ditetapkan sebesar Rp337.692.558.438,00. Perkembangan nilai investasi pada Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas selama 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		2.425.570.547,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2022 (<i>Audited</i>):		
100% x Rp5.195.014,00	Rp	5.195.014,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.430.765.561,00

Pada TA 2022 Perumda Pasar Satria mencatat laba bersih sebesar Rp5.195.014,00 (*Audited*). Laporan Keuangan Perumda Pasar Satria telah diaudit oleh KAP Roni Pupung dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00121/2.1353/AU.2/05/1484-1/1/III/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.



C. ASET TETAP

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemkab Banyumas berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.431.300.779.065,84, dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.196.704.702.964,72 mengalami kenaikan sebesar Rp234.596.076.101,12 atau 7,79 persen dari tahun 2021, nilai tersebut sudah termasuk akumulasi penyusutan.

Rincian Aset Tetap berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.9. Sedangkan mutasi Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	3.450.040.187.351,87	144.801.348.816,00	3.594.841.536.167,87
Peralatan dan Mesin	1.236.320.901.236,11	145.017.011.916,00	1.381.337.913.152,11
Gedung dan Bangunan	1.850.601.192.656,14	286.834.234.410,01	2.137.435.427.066,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.676.435.728.540,00	229.019.990.857,00	2.905.455.719.397,00
Aset Tetap Lainnya	100.876.757.746,27	890.641.757,00	101.767.399.503,27
Konstruksi dalam Pengerjaan	206.555.843.236,00	(125.913.542.211,00)	80.642.301.025,00
Akumulasi Penyusutan	(3.324.125.907.801,67)	(446.053.609.443,89)	(3.770.179.517.245,56)
Jumlah	6.196.704.702.964,72	234.596.076.101,12	6.431.300.779.065,84

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp680.649.685.545,01 terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan Aset Tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
A. Penambahan Aset Tetap							
1 Aset yang berasal dari donasi/hibah	36.309.039.114,00	21.940.578.936,00	5.339.589.757,02	39.569.867.971,00	30.000.000,00	-	103.189.075.778,02
2 Aset yang berasal dari BOS	-	16.669.785.409,00	74.729.000,00	-	182.465.818,00	-	16.926.980.227,00
3 Belanja Modal	1.294.889.314,00	41.860.692.012,00	151.058.147.268,00	114.445.041.515,00	548.598.800,00	68.499.250.778,00	377.706.619.687,00
4 Belanja Non Modal	21.185.388,00	540.433.018,00	10.672.128.740,99	25.382.422.818,00	50.450.000,00	666.147.650,00	37.332.767.614,99
5 Belanja Modal BLUD	-	62.661.723.311,00	7.220.664.516,00	154.595.250,00	146.167.000,00	1.512.981.000,00	71.696.131.077,00
6 Belanja Non Modal BLUD	-	11.000.000,00	1.333.745.080,00	291.931.728,00	-	-	1.636.676.808,00
7 Belanja Non Modal BOS	-	699.861.069,00	431.564.750,00	19.000.000,00	2.750.000,00	-	1.153.175.819,00
8 KDP Telah Selesai Menjadi Aset	-	1.257.979.650,00	90.510.209.808,00	47.060.196.200,00	-	-	138.828.385.658,00
9 Mutasi Dalam SKPD	25.762.990.090,00	14.419.248.302,50	33.248.387.421,00	5.499.803.655,00	28.050.000,00	-	78.958.479.468,50
10 Mutasi dari SKPD lain	2.590.865.388,00	8.270.830.280,70	178.490.969.576,00	-	-	-	189.352.665.244,70
11 Pemecahan Data	-	-	431.208.326,00	-	-	-	431.208.326,00
12 Penggabungan Data	1.811.325.303,00	-	40.832.337.020,00	8.744.042.011,00	-	-	51.387.704.334,00
13 Aset yang berasal dari BOP	-	66.069.410,00	25.714.500,00	-	-	-	91.783.910,00
14 Reklasifikasi dari Ekstrakomptable	-	-	18.872.000,00	868.109.100,00	-	-	886.981.100,00
15 Inventarisasi	1.274.000.000,00	142.180.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.417.180.000,00
16 Aset yang berasal dari dana BTT	-	48.750.000,00	-	-	-	-	48.750.000,00
17 Reklas Aset	-	4.081.950.002,00	3.571.459.775,00	2.108.179.000,00	-	-	9.761.588.777,00
18 Penilaian	110.993.000.000,00	-	28.833.222.000,00	-	-	-	139.826.222.000,00
19 Reklasifikasi ke Aset Tetap	-	-	259.176.000,00	-	-	-	259.176.000,00
20 Koreksi BMD	-	156.600.000,00	125.653.118,00	6.564.263.035,00	-	-	6.846.516.153,00
Jumlah Mutasi Bertambah	180.057.294.597,00	172.827.681.400,20	552.478.778.656,01	250.707.452.283,00	988.481.618,00	70.678.379.428,00	1.227.738.067.982,21
B. Pengurangan Aset Tetap							
1 Penghapusan Aset Tetap	-	4.106.202.966,00	3.343.509.233,00	59.735.000,00	68.914.861,00	-	7.578.362.060,00
2 KDP Telah Selesai Menjadi Aset	-	-	-	-	-	138.828.385.658,00	138.828.385.658,00
3 Mutasi Ke SKPD lain	2.590.865.388,00	8.270.830.280,70	178.490.969.576,00	-	-	-	189.352.665.244,70
4 Mutasi Dalam SKPD	25.762.990.090,00	14.419.248.302,50	33.248.387.421,00	5.499.803.655,00	28.050.000,00	-	78.958.479.468,50
5 Pemecahan Data	-	-	431.208.326,00	-	-	-	431.208.326,00
6 Penggabungan Data	1.811.325.303,00	-	40.832.337.020,00	8.744.042.011,00	-	-	51.387.704.334,00
7 Reklas Persediaan	-	57.757.480,00	-	-	875.000,00	-	58.632.480,00
8 Reklas Aset	-	-	9.009.479.552,00	752.109.225,00	-	-	9.761.588.777,00
9 Koreksi Pencatatan	5.090.765.000,00	800.030.455,00	163.000.000,00	67.508.500,00	-	56.796.000,00	6.178.099.955,00
10 Koreksi BMD	-	156.600.000,00	125.653.118,00	6.564.263.035,00	-	-	6.846.516.153,00
11 Hutang PEN	-	-	-	-	-	57.706.739.981,00	57.706.739.981,00
Jumlah Mutasi Berkurang	35.255.945.781,00	27.810.669.484,20	265.644.544.246,00	21.687.461.426,00	97.839.861,00	196.591.921.639,00	547.088.382.437,20
Jumlah Mutasi Bersih	144.801.348.816,00	145.017.011.916,00	286.834.234.410,01	229.019.990.857,00	890.641.757,00	(125.913.542.211,00)	680.649.685.545,01



a. Penambahan Aset Tetap

1) Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah

Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi tahun 2022. Penambahan hibah tersebut meliputi kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.869.668.114,00	-	989.990.000,00	7.615.379.200,00	-	38.475.037.314,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	73.350.000,00	-	31.922.288.771,00	-	31.995.638.771,00
Dinas Kesehatan	-	14.207.620.932,00	-	-	-	14.207.620.932,00
Dinas Pendidikan	150.000.000,00	5.560.578.828,00	3.380.463.457,02	32.200.000,00	-	9.123.242.285,02
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	-	859.815.776,00	-	-	-	859.815.776,00
Inspektorat Daerah	-	8.499.000,00	-	-	-	8.499.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	394.799.100,00	-	-	-	394.799.100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Kecamatan Ajibarang	-	950.000,00	-	-	-	950.000,00
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	451.738.300,00	47.970.000,00	-	-	499.708.300,00
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden	-	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang	-	365.727.000,00	-	-	-	365.727.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	-	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	6.289.371.000,00	-	866.166.300,00	-	-	7.155.537.300,00
Jumlah	36.309.039.114,00	21.940.578.936,00	5.339.589.757,02	39.569.867.971,00	30.000.000,00	103.189.075.778,02

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset tetap yang berasal dari donasi/hibah adalah sebagai berikut :

- Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berasal dari pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Banyumas berupa tanah yang digunakan untuk ruang terbuka hijau di kawasan perumahan sebesar Rp29.869.668.114,00, berupa bangunan yang merupakan bangunan fasum di kawasan perumahan sebesar Rp989.990.000,00, berupa jalan dan drainase di kawasan perumahan sebesar Rp7.615.379.200,00.
- Pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa 1 (satu) unit kendaraan station wagon dengan nopol B 1412 DQ sebesar Rp47.350.000,00, 1 (satu) unit kendaraan pick up dengan nopol B 9099 DQ sebesar Rp26.000.000,00, beberapa ruas jalan di kawasan Kabupaten Banyumas sebesar



Rp13.940.878.100,00 dengan nomor BAST 11/BAST/Bb7.6/2022. Berupa jalan Sudirman, jalan Sunan Bonang, jalan Sunan Ampel yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas sebesar Rp17.981.410.671,00 dengan nomor BAST 23/BAST/Bb7.6/2022.

- c. Pada Dinas Kesehatan berupa 1 unit kendaraan station wagon dengan nopol R 27 A yang berasal dari Bank Jateng dengan nilai sebesar Rp326.900.000,00, berupa 5 (lima) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nilai sebesar Rp152.680.000,00 yang berasal dari Bank BRI. Berupa 1 (satu) unit station wagon sebesar Rp45.500.000,00, berupa 11 (sebelas) unit kendaraan ambulance sebesar Rp3.447.300.000,00, berupa 74 (tujuh puluh empat) unit sepeda motor sebesar Rp507.800.000,00, berupa alat-alat kesehatan sebesar Rp9.727.440.932,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI untuk didistribusikan ke puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- d. Pada Dinas Pendidikan berupa tanah untuk perluasan sekolah sebesar Rp150.000.000,00 di SMP Negeri 3 Sumbang yang berasal dari Komite Sekolah. Berupa peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah pada lingkungan Dinas Pendidikan sebesar Rp5.560.578.828,00 yang berasal dari komite sekolah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berupa bangunan dan gedung pendidikan di sekolah-sekolah pada lingkungan Dinas Pendidikan sebesar Rp3.380.463.457,02 yang berasal dari Komite Sekolah. Berupa pengerasan jalan masuk sekolah sebesar Rp32.200.000,00 di SMP Negeri 3 Sumbang yang berasal dari Komite Sekolah.
- e. Pada RSUD Banyumas berupa 4 (empat) unit *oxygen concentrator* sebesar Rp76.000.000,00 berasal dari Kementerian Kesehatan RI. Berupa 2 (dua) unit *air purifier* sebesar Rp5.198.000,00 berasal dari CV. Prima Seda. Berupa alat-alat kesehatan sebesar Rp102.731.890,00 berasal dari PT. Romora Jaya Pratama. Berupa 5 (lima) unit *high flow nasal cannula* sebesar Rp325.000.000,00 berasal dari Kementerian Kesehatan RI. Berupa 1 (satu) unit *bedside monitor* sebesar Rp195.000.000,00 berasal dari PT. Indomedik Niaga Perkasa. Berupa *patient monitor*, *syringe pump* dan *infusion pump* sebesar Rp155.885.886,00 yang berasal dari PT. Internusa Dua Medika.
- f. Pada Inspektorat Daerah berupa 1 (satu) unit laptop sebesar Rp8.499.000,00 yang merupakan hadiah dari BKK Purwokerto.
- g. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa 13 (tiga belas) unit sepeda motor sebesar Rp200.440.700,00, 7 (tujuh) unit *personal computer* sebesar Rp134.482.700,00 yang berasal dari Kementerian Pertanian RI. Berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit *personal computer* sebesar Rp59.875.700,00 yang berasal dari Kementerian Pertanian RI.
- h. Pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa 10 (sepuluh) unit sepeda sebesar Rp15.000.000,00 yang berasal dari Bank Jateng.
- i. Pada Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Purwokerto Kidul berupa 1 (satu) set alat musik gamelan laras pelog sebesar Rp30.000.000,00 yang berasal dari pensiunan/mantan lurah.



- j. Pada Kecamatan Ajibarang berupa 1 (satu) buah kursi roda sebesar Rp950.000,00 yang berasal dari dokter.
 - k. Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa 16 (enam belas) unit *personal computer* sebesar Rp171.384.970,00, 2 (dua) buah laptop sebesar Rp18.000.000,00, 15 (lima belas) unit printer sebesar Rp37.243.330,00, peralatan mesin lain sebesar Rp225.110.000,00, dan berupa *backdrop* pelayanan di MPP sebesar Rp47.970.000,00 yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
 - l. Pada BLUD UPTD Lokawisata Baturraden berupa 2 (dua) buah kursi roda sebesar Rp 2.500.000,00 yang berasal dari JP Insurance.
 - m. Pada RSUD Ajibarang berupa 3 (tiga) unit *High Flow Canul* sebesar Rp365.727.000,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - n. Pada Puskesmas Purwokerto Selatan berupa bangunan gedung eks. Kantor Polsek Purwokerto Selatan sebesar Rp55.000.000,00 yang berasal dari Polresta Kabupaten Banyumas.
 - o. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa tanah yang terletak di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas sebesar Rp6.289.371.000,00, bangunan gedung sebesar Rp866.166.300,00 yang akan digunakan untuk pengembangan RSUD Banyumas berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BOS TA 2022.

Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Belanja Modal BOS TA 2022 sebesar Rp16.926.980.227,00 berada pada Dinas Pendidikan, yang diperoleh dari belanja modal BOS sebesar Rp27.558.698.766,00 dikurangi dengan aset ekstrakomptabel sebesar Rp10.631.718.539,00. Selain itu terdapat pergeseran antar jenis aset dari belanja modal, secara rinci untuk masing-masing jenis aset yang dapat dilihat pada tabel berikut:

<i>Uraian</i>	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Belanja Modal BOS	-	16.996.162.128,00	-	-	10.562.536.638,00	-	27.558.698.766,00
Aset Tetap	-	16.669.785.409,00	74.729.000,00	-	182.465.818,00	-	16.926.980.227,00
Aset Ekstrakomptabel	-	-	602.936.305,00	-	-	10.028.782.234,00	10.631.718.539,00
Sub Total	-	16.669.785.409,00	677.665.305,00	-	182.465.818,00	10.028.782.234,00	27.558.698.766,00
Selisih	-	326.376.719,00	(677.665.305,00)	-	10.380.070.820,00	(10.028.782.234,00)	-

3) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal APBD TA 2022.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal APBD TA 2022 sebesar Rp377.706.619.687,00, yang diperoleh dari belanja modal sebesar Rp378.033.009.672,00 dikurangi dengan aset ekstrakomptabel sebesar Rp311.423.439,00 dan reklasifikasi menjadi aset tidak berwujud sebesar Rp14.966.546,00. Selain itu terdapat juga pergeseran antar jenis aset tetap dari belanja modal, secara rinci untuk masing-masing jenis aset dapat dilihat dalam lampiran V.4.4.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Uraian</i>	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	ATB	Jumlah
Belanja Modal APBD	2.307.762.514,00	43.252.808.542,00	213.638.560.841,00	118.261.602.429,00	572.275.346,00			378.033.009.672,00
Aset Tetap	1.294.889.314,00	41.860.692.012,00	151.058.147.268,00	114.445.041.515,00	548.598.800,00	68.499.250.778,00		377.706.619.687,00
Aset Tidak Berwujud							14.966.546,00	14.966.546,00
Aset Ekstrakomptabel	-	168.240.690,00	90.182.461,00	44.290.288,00	8.710.000,00	-	-	311.423.439,00
Sub Total	1.294.889.314,00	42.028.932.702,00	151.148.329.729,00	114.489.331.803,00	557.308.800,00	68.499.250.778,00	14.966.546,00	378.033.009.672,00
Selisih	1.012.873.200,00	1.223.875.840,00	62.490.231.112,00	3.772.270.626,00	14.966.546,00	(68.499.250.778,00)	(14.966.546,00)	-

4) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2022

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal TA 2022 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp37.332.767.614,99 terdiri dari kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
Sekretariat DPRD	-	-	675.194.333,00	-	-	-	675.194.333,00
Sekretariat Daerah	-	-	67.377.000,00	-	-	-	67.377.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	1.307.814.779,00	24.618.101.075,00	-	616.444.150,00	26.542.360.004,00
Dinas Perhubungan	-	202.399.918,00	471.784.299,00	-	-	-	674.184.217,00
Dinas Kesehatan	-	76.560.000,00	-	-	-	-	76.560.000,00
Dinas Pendidikan	-	9.820.000,00	120.121.838,00	-	-	-	129.941.838,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.755.000,00	161.500.000,00	-	-	-	163.255.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	68.192.000,00	241.995.000,00	-	-	-	310.187.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	23.783.200,00	-	-	-	23.783.200,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	-	-	287.220.260,00	-	-	-	287.220.260,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	3.960.148.305,00	13.993.000,00	-	49.703.500,00	4.023.844.805,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	52.600.000,00	-	-	-	-	52.600.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.185.388,00	-	429.057.712,00	-	-	-	450.243.100,00
Badan Pendapatan Daerah	-	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Inspektorat Daerah	-	-	19.702.500,00	-	-	-	19.702.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	11.700.000,00	472.117.748,81	-	50.450.000,00	-	534.267.748,81
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	129.613.000,00	-	-	-	129.613.000,00
Badan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	189.386.600,00	-	-	-	189.386.600,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	220.578.658,18	-	-	-	220.578.658,18
Kecamatan Banyumas	-	49.795.000,00	-	-	-	-	49.795.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	4.500.000,00	203.098.000,00	-	-	-	207.598.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	18.700.000,00	155.050.000,00	-	-	-	173.750.000,00
Kecamatan Patikraja	-	-	14.245.000,00	-	-	-	14.245.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	-	123.150.000,00	-	-	-	123.150.000,00
Kecamatan Tambak	-	-	329.150.000,00	-	-	-	329.150.000,00
Kecamatan Sokaraja	-	-	268.918.508,00	-	-	-	268.918.508,00
Kecamatan Kembaran	-	-	20.787.000,00	-	-	-	20.787.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	-	12.008.500,00	21.000.000,00	251.091.473,00	-	-	284.099.973,00
Kecamatan Purwokerto Utara	-	-	224.785.000,00	-	-	-	224.785.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	3.175.000,00	170.370.000,00	82.471.000,00	-	-	256.016.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	-	79.300.000,00	401.966.270,00	-	-	481.266.270,00
Kecamatan Cilongok	-	-	149.500.000,00	-	-	-	149.500.000,00
Kecamatan Pekuncen	-	-	12.090.000,00	14.800.000,00	-	-	26.890.000,00
Kecamatan Gumelar	-	-	19.460.000,00	-	-	-	19.460.000,00
Kecamatan Purwojati	-	-	12.600.000,00	-	-	-	12.600.000,00
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	24.227.600,00	91.230.000,00	-	-	-	115.457.600,00
	21.185.388	540.433.018	10.672.128.741	25.382.422.818	50.450.000	666.147.650	37.332.767.614,99



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

5) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BLUD TA 2022.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2022 sebesar Rp71.696.131.077,00 adalah sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	47.882.581.353,00	3.401.820.091,00	136.252.500,00	-	-	51.420.653.944,00
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden	2.614.480.981,00	2.746.700.007,00	18.342.750,00	146.167.000,00	-	5.525.690.738,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	9.572.599.934,00	962.449.418,00	-	-	1.512.981.000,00	12.048.030.352,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	25.579.600,00	-	-	-	-	25.579.600,00
Puskesmas Banyumas	29.718.340,00	-	-	-	-	29.718.340,00
Puskesmas Kebasen	38.100.000,00	-	-	-	-	38.100.000,00
Puskesmas Patikraja	130.445.000,00	-	-	-	-	130.445.000,00
Puskesmas Sumpiuh II	26.950.000,00	-	-	-	-	26.950.000,00
Puskesmas Kemranjen I	5.117.000,00	-	-	-	-	5.117.000,00
Puskesmas Kemranjen II	11.545.000,00	-	-	-	-	11.545.000,00
Puskesmas Tambak I	47.550.000,00	-	-	-	-	47.550.000,00
Puskesmas Tambak II	4.570.000,00	-	-	-	-	4.570.000,00
Puskesmas Sokaraja I	9.362.385,00	-	-	-	-	9.362.385,00
Puskesmas Sokaraja II	13.934.653,00	-	-	-	-	13.934.653,00
Puskesmas Kembaran I	28.976.000,00	-	-	-	-	28.976.000,00
Puskesmas Sumbang I	28.676.051,00	-	-	-	-	28.676.051,00
Puskesmas Sumbang II	23.684.400,00	-	-	-	-	23.684.400,00
Puskesmas Kalibagor	55.198.889,00	-	-	-	-	55.198.889,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	9.350.000,00	-	-	-	-	9.350.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	7.063.000,00	-	-	-	-	7.063.000,00
Puskesmas Kedungbanteng	386.295.609,00	-	-	-	-	386.295.609,00
Puskesmas Karanglewas	72.321.000,00	-	-	-	-	72.321.000,00
Puskesmas Ajibarang I	17.047.000,00	108.800.000,00	-	-	-	125.847.000,00
Puskesmas Ajibarang II	19.586.000,00	-	-	-	-	19.586.000,00
Puskesmas Cilongok I	161.274.350,00	-	-	-	-	161.274.350,00
Puskesmas Cilongok II	124.669.000,00	-	-	-	-	124.669.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	276.343.670,00	-	-	-	-	276.343.670,00
Puskesmas Somagede	192.456.497,00	-	-	-	-	192.456.497,00
Puskesmas Purwokerto Barat	48.449.391,00	-	-	-	-	48.449.391,00
Puskesmas Sumpiuh I	6.839.250,00	-	-	-	-	6.839.250,00
Puskesmas Baturraden II	36.515.000,00	895.000,00	-	-	-	37.410.000,00
Puskesmas Baturraden I	555.000,00	-	-	-	-	555.000,00
Puskesmas Gumelar	3.822.125,00	-	-	-	-	3.822.125,00
Puskesmas Jatilawang	147.426.175,00	-	-	-	-	147.426.175,00
Puskesmas Wangon I	53.288.000,00	-	-	-	-	53.288.000,00
Puskesmas Wangon II	2.787.500,00	-	-	-	-	2.787.500,00
Puskesmas Lumbir	24.299.000,00	-	-	-	-	24.299.000,00
Puskesmas Rawalo	161.797.600,00	-	-	-	-	161.797.600,00
Puskesmas Purwojati	19.500.000,00	-	-	-	-	19.500.000,00
Puskesmas Pekuncen II	2.519.922,00	-	-	-	-	2.519.922,00
Puskesmas Pekuncen I	113.150.000,00	-	-	-	-	113.150.000,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	176.027.250,00	-	-	-	-	176.027.250,00
Laboratorium Kesehatan	24.771.386,00	-	-	-	-	24.771.386,00
	62.661.723.311	7.220.664.516	154.595.250	146.167.000	1.512.981.000	71.696.131.077

Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Belanja Modal BLUD TA 2022 sebesar Rp71.696.131.077,00, yang diperoleh dari belanja modal BLUD sebesar Rp71.756.357.160,00 dikurangi dengan aset ekstrakomptabel sebesar Rp60.226.083,00. Selain itu terdapat pergeseran antar jenis aset dari belanja modal, secara rinci untuk masing-masing jenis aset yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

<i>Uraian</i>	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Belanja Modal BLUD	-	62.290.093.091,00	8.772.302.291,00	546.808.918,00	147.152.860,00	-	71.756.357.160,00
Aset Tetap	-	62.661.723.311,00	7.220.664.516,00	154.595.250,00	146.167.000,00	1.512.981.000,00	71.696.131.077,00
Aset Ekstrakomptabel	-	47.292.340,00	8.557.883,00	3.390.000,00	985.860,00	-	60.226.083,00
Sub Total	-	62.709.015.651,00	7.229.222.399,00	157.985.250,00	147.152.860,00	1.512.981.000,00	71.756.357.160,00
Selisih	-	(418.922.560,00)	1.543.079.892,00	388.823.668,00	-	(1.512.981.000,00)	-

6) Penambahan Aset dari Belanja Non Modal BLUD TA 2022

Rincian penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BLUD TA 2022 sebesar Rp1.636.676.808,00 terdiri dari kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden	-	1.333.745.080,00	291.931.728,00	1.625.676.808,00
Puskesmas Jatilawang	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
Jumlah	11.000.000,00	1.333.745.080,00	291.931.728,00	1.636.676.808,00

7) Penambahan Aset dari Belanja Non Modal BOS TA 2022

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BOS TA 2022 sebesar Rp1.153.175.819,00 berada pada Dinas Pendidikan.

8) KDP yang telah selesai pengerjaannya

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari KDP yang telah selesai pengerjaannya sebesar Rp138.828.385.658,00, terdiri dari kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	337.809.000,00	337.809.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	42.463.077.950,00	46.698.887.200,00	89.161.965.150,00
Dinas Perhubungan	1.257.979.650,00	980.040.201,00	-	2.238.019.851,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-	14.907.012.407,00	-	14.907.012.407,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	-	-	23.500.000,00	23.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	30.647.098.250,00	-	30.647.098.250,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	-	1.512.981.000,00	-	1.512.981.000,00
Jumlah	1.257.979.650,00	90.510.209.808,00	47.060.196.200,00	138.828.385.658,00



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

9) Mutasi Dalam SKPD

Penambahan aset tetap karena mutasi dalam SKPD merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD kepada UPT di bawahnya sebesar Rp78.958.479.468,50 dengan rincian sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Dinas Kesehatan		260.500.000,00				260.500.000,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat		6.800.000,00				6.800.000,00
Laboratorium Kesehatan		218.452.000,00				218.452.000,00
Puskesmas Banyumas		69.573.422,00	188.193.000,00			257.766.422,00
Puskesmas Somagede		412.700.000,00				412.700.000,00
Puskesmas Kebasen		192.470.350,00				192.470.350,00
Puskesmas Patikraja		345.200.000,00	185.000.000,00			530.200.000,00
Puskesmas Sumpiuh I		643.343.820,00	73.000.000,00			716.343.820,00
Puskesmas Sumpiuh II		25.400.000,00	9.500.000,00			34.900.000,00
Puskesmas Kemranjen I		185.670.350,00	189.000.000,00			374.670.350,00
Puskesmas Kemranjen II		185.670.350,00	490.665.900,00	287.500.000,00		963.836.250,00
Puskesmas Tambak I		797.670.350,00				797.670.350,00
Puskesmas Tambak II		167.773.422,00				167.773.422,00
Puskesmas Sokaraja I		223.043.772,00		300.067.000,00		523.110.772,00
Puskesmas Sokaraja II		69.573.422,00	196.663.000,00	249.700.000,00		515.936.422,00
Puskesmas Kembaran I		34.200.000,00		313.457.000,00		347.657.000,00
Puskesmas Kembaran II		87.773.422,00	189.000.000,00			276.773.422,00
Puskesmas Sumbang I		25.200.000,00				25.200.000,00
Puskesmas Sumbang II		418.200.000,00	74.000.000,00			492.200.000,00
Puskesmas Kalibagor		18.400.000,00				18.400.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat		352.200.000,00				352.200.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan		25.200.000,00				25.200.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara I		64.973.424,00				64.973.424,00
Puskesmas Purwokerto Utara II		27.600.000,00				27.600.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I		32.200.000,00				32.200.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II		32.200.000,00	94.325.000,00			126.525.000,00
Puskesmas Baturraden I		27.400.000,00		293.664.000,00		321.064.000,00
Puskesmas Baturraden II		62.773.422,00		287.500.000,00		350.273.422,00
Puskesmas Kedungbanteng	1.058.638.000,00	181.962.650,00	4.892.124.930,00	287.500.000,00		6.420.225.580,00
Puskesmas Karanglewas		55.773.422,00				55.773.422,00
Puskesmas Ajibarang I		489.720.350,00				489.720.350,00
Puskesmas Ajibarang II		253.400.000,00	49.250.000,00			302.650.000,00
Puskesmas Cilongok I		18.400.000,00				18.400.000,00
Puskesmas Cilongok II		96.573.422,00		313.295.700,00		409.869.122,00
Puskesmas Pekuncen I		580.870.350,00				580.870.350,00
Puskesmas Gumelar		795.670.350,00	538.083.300,00			1.333.753.650,00
Puskesmas Jatilawang		27.400.000,00				27.400.000,00
Puskesmas Wangon I		192.470.350,00				192.470.350,00
Puskesmas Wangon II		582.470.350,00	169.587.000,00	309.245.100,00		1.061.302.450,00
Puskesmas Lumbir		712.650.000,00	464.651.000,00	314.387.000,00		1.491.688.000,00
Puskesmas Rawalo		185.670.350,00				185.670.350,00
Puskesmas Purwojati		253.400.000,00				253.400.000,00
Puskesmas Pekuncen II	960.000.000,00	13.485.830,00	596.730.194,00			1.570.216.024,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto		6.800.000,00	27.859.750,00	457.000.000,00		491.659.750,00
Dinas Pendidikan		547.145.393,00				547.145.393,00
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden	23.744.352.090,00	94.568.436,50	24.820.754.347,00	2.086.487.855,00	28.050.000,00	50.774.212.728,50
Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)		4.318.655.523,00				4.318.655.523,00
Jumlah	25.762.990.090,00	14.419.248.302,50	33.248.387.421,00	5.499.803.655,00		78.958.479.468,50



10) Mutasi dari SKPD lain

Penambahan aset tetap yang berasal mutase dari SKPD lain sebesar Rp1.227.738.067.982,21, terdiri dari kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

0	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
0 Sekretariat Daerah		1.707.368.994,00	49.760.585,00	1.757.129.579,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			74.187.000,00	74.187.000,00
Dinas Pekerjaan Umum		290.625.532,00		290.625.532,00
Dinas Perhubungan	720.500.000,00	310.720.000,00	448.354.249,00	1.479.574.249,00
Dinas Kesehatan		217.000.000,00		217.000.000,00
Puskesmas Banyumas		3.000.000,00		3.000.000,00
Puskesmas Somagede		36.680.000,00		36.680.000,00
Puskesmas Kemranjen I		2.250.000,00		2.250.000,00
Puskesmas Kemranjen II		128.530.000,00		128.530.000,00
Puskesmas Tambak I		2.250.000,00		2.250.000,00
Puskesmas Tambak II		3.750.000,00		3.750.000,00
Puskesmas Sokaraja II		148.896.187,00		148.896.187,00
Puskesmas Kalibagor		2.250.000,00		2.250.000,00
Puskesmas Karanglewas		66.000.000,00		66.000.000,00
Puskesmas Ajibarang I		154.403.699,60		154.403.699,60
Puskesmas Cilongok I		3.750.000,00		3.750.000,00
Puskesmas Cilongok II		750.000,00		750.000,00
Puskesmas Gumelar		3.000.000,00		3.000.000,00
Puskesmas Jatilawang		1.500.000,00		1.500.000,00
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini	928.000.000,00	235.375.662,00	2.740.470.500,00	3.903.846.162,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas		33.880.834,00		33.880.834,00
Dinas Pendidikan	350.000.000,00	67.190.000,00	628.000.000,00	1.045.190.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata		47.325.000,00	198.165.000,00	245.490.000,00
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden			168.610.519.500,00	168.610.519.500,00
Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat dan Desa		68.240.000,00		68.240.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		17.920.000,00		17.920.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		44.195.419,10	198.387.000,00	242.582.419,10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.920.000,00		17.920.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	202.400.000,00			202.400.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.185.388,00	206.665.000,00	15.042.563,00	242.892.951,00
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		198.000.000,00		198.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		227.464.840,00		227.464.840,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah		91.600.000,00		91.600.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	77.578.000,00	1.186.004.532,00		1.263.582.532,00
Inspektorat Daerah		225.000.000,00	389.919.300,00	614.919.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		629.825.000,00		629.825.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		195.000.000,00		195.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91.480.000,00	244.445.000,00	3.302.121.000,00	3.638.046.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		409.200.000,00	58.722.900,00	467.922.900,00
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia		34.546.569,00		34.546.569,00



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika		97.170.000,00	939.934.100,00	1.037.104.100,00
Kecamatan Banyumas		35.948.405,00	128.359.000,00	164.307.405,00
Kecamatan Kebasen		53.760.000,00		53.760.000,00
Kecamatan Sumpiuh		167.337.000,00		167.337.000,00
Kecamatan Kemranjen		35.840.000,00		35.840.000,00
Kecamatan Sokaraja		35.840.000,00		35.840.000,00
Kecamatan Kembaran		17.920.000,00		17.920.000,00
Kecamatan Sumbang		17.920.000,00	214.298.400,00	232.218.400,00
Kecamatan Kalibagor		51.513.256,00	39.519.479,00	91.032.735,00
Kecamatan Purwokerto Barat		69.869.351,00		69.869.351,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	199.722.000,00	71.395.000,00		271.117.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara		35.650.000,00		35.650.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur		53.475.000,00	133.944.000,00	187.419.000,00
Kecamatan Baturraden		35.650.000,00		35.650.000,00
Kecamatan Kedungbanteng		35.650.000,00		35.650.000,00
Kecamatan Karanglewas		14.550.000,00		14.550.000,00
Kecamatan Ajibarang		17.920.000,00		17.920.000,00
Kecamatan Pekuncen		35.840.000,00		35.840.000,00
Kecamatan Gumelar		35.650.000,00		35.650.000,00
Kecamatan Jatilawang		17.825.000,00	98.922.000,00	116.747.000,00
Kecamatan Wangon		35.840.000,00		35.840.000,00
Kecamatan Lumbir		17.920.000,00	132.850.000,00	150.770.000,00
Kecamatan Rawalo		17.825.000,00	89.493.000,00	107.318.000,00
Jumlah	2.590.865.388,00	8.270.830.280,70	178.490.969.576,00	189.352.665.244,70

11) Pemecahan Data

Penambahan aset yang berasal dari Pemecahan Data sebesar Rp431.208.326,00 dengan kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Lingkungan Hidup	94.000.000,00	94.000.000,00
Kecamatan Kalibagor	337.208.326,00	337.208.326,00
Jumlah	431.208.326,00	431.208.326,00



12) Penggabungan Data

Penambahan aset yang berasal dari Penggabungan Data sebesar Rp51.387.704.334,00 dengan kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
0 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.921.760,00		497.113.000,00	43.214.000,00	548.248.760,00
0 Dinas Pekerjaan Umum				8.659.723.011,00	8.659.723.011,00
Dinas Kesehatan		6.021.998.000,00			6.021.998.000,00
Puskesmas Somagede		37.125.000,00			37.125.000,00
Puskesmas Sokaraja I		119.095.000,00			119.095.000,00
Puskesmas Sokaraja II		4.341.913.000,00			4.341.913.000,00
Puskesmas Sumbang II		55.630.000,00			55.630.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I		778.361.775,00			778.361.775,00
Puskesmas Cilongok I	148.710.101,00	395.505.000,00			544.215.101,00
Puskesmas Jatilawang		4.482.663.500,00			4.482.663.500,00
Puskesmas Rawalo		59.800.000,00			59.800.000,00
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini		72.462.000,00			72.462.000,00
Dinas Pendidikan		87.440.950,00			87.440.950,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		70.709.000,00			70.709.000,00
Dinas Perikanan dan Peternakan		114.284.100,00		41.105.000,00	155.389.100,00
Inspektorat Daerah		205.485.000,00			205.485.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.454.971.442,00	18.670.166.025,00			20.125.137.467,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		522.699.000,00			522.699.000,00
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		2.973.510.135,00			2.973.510.135,00
Kecamatan Sumpiuh		604.579.000,00			604.579.000,00
Kecamatan Kemranjen		126.930.000,00			126.930.000,00
Kecamatan Tambak		10.000.000,00			10.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat		151.750.000,00			151.750.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	199.722.000,00	18.420.000,00			218.142.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur		322.637.000,00			322.637.000,00
Kecamatan Kedungbanteng		8.946.810,00			8.946.810,00
Kecamatan Gumelar		22.985.725,00			22.985.725,00
Kecamatan Jatilawang		27.900.000,00			27.900.000,00
Kecamatan Wangon		29.753.000,00			29.753.000,00
Kecamatan Rawalo		2.475.000,00			2.475.000,00
0 Jumlah	1.811.325.303,00	-	40.832.337.020,00	8.744.042.011,00	51.387.704.334,00

13) Penambahan Aset dari Belanja BOP TA 2022

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja BOP TA 2022 sebesar Rp91.783.910,00 berada pada Dinas Pendidikan.

14) Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel

Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel sebesar Rp886.981.100,00 terdiri dari kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Dinas Kesehatan	9.500.000,00	868.109.100,00	877.609.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	9.372.000,00	-	9.372.000,00
Jumlah	18.872.000,00	868.109.100,00	886.981.100,00



15) Penambahan Aset yang berasal dari hasil inventarisasi

Penambahan aset yang berasal dari hasil inventarisasi sebesar Rp1.417.180.000,00 dengan kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	2.980.000,00	-	2.980.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pengurus Barang Pengelola)	1.274.000.000,00	139.200.000,00	1.000.000,00	1.414.200.000,00
Jumlah	1.274.000.000,00	142.180.000,00	1.000.000,00	1.417.180.000,00

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset tetap yang berasal dari hasil inventarisasi adalah sebagai berikut :

- Pada Dinas Pendidikan terdapat pada SD Negeri Dawuhan berupa 1 (satu) unit meeting port dan 1 (satu) set papan nama sekolah yang sebelumnya belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang sebesar Rp2.980.000,00.
- Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa tanah eks. kantor koperasi sebesar Rp1.274.000.000,00 untuk nilai tanah berdasarkan nilai NJOP di tahun 2022. Berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Mitsubishi L300 dengan nopol R 9505 PH sebesar Rp134.200.000,00 dan 1 (satu) unit sepeda motor astrea dengan nopol R 9809 BH sebesar Rp5.000.000,00. Berupa 1 (satu) unit bangunan gedung eks Koperasi yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan sebesar Rp1.000.000,00.

16) Penambahan Aset dari BTT

Penambahan aset yang berasal dari BTT sebesar Rp48.750.000,00 berupa peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berupa 1 (satu) unit *Distometer* sebesar Rp15.000.000,00, berupa 1 (satu) unit *Drone* sebesar Rp25.000.000,00, berupa 1 (satu) unit mesin gerinda sebesar Rp1.290.000,00, berupa *camera* elektronik sebesar Rp1.975.000,00, berupa 1 (satu) unit gerobak dorong sebesar Rp1.360.000,00, berupa 1 (satu) unit digital LED sebesar Rp4.125.000,00.



17) Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset merupakan reklasifikasi jenis aset pada SKPD tersebut. Transaksi ini tidak mempengaruhi saldo secara keseluruhan tetapi mengubah nilai pada masing-masing jenis aset tetap. Reklasifikasi aset sebesar Rp9.761.588.777,00 terdapat pada kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	2.070.679.000,00	2.070.679.000,00
Dinas Perhubungan	99.669.000,00	-	-	99.669.000,00
Dinas Pendidikan	-	-	37.500.000,00	37.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	3.828.053.052,00	3.003.562.500,00	-	6.831.615.552,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	69.685.000,00	-	-	69.685.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.760.300,00	-	3.760.300,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	29.943.000,00	-	29.943.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	24.757.950,00	496.237.975,00	-	520.995.925,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	59.785.000,00	37.956.000,00	-	97.741.000,00
Jumlah	4.081.950.002,00	3.571.459.775,00	2.108.179.000,00	9.761.588.777,00

18) Penambahan Aset Tetap dari Penilaian

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari penilaian merupakan hasil penilaian Aset Tetap dari Aset Kemitraan yang telah diserahkan dari pihak ketiga ke SKPD pada TA 2022 sebesar Rp139.826.222.000,00 terdapat pada kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Perhubungan			4.005.725.000,00	4.005.725.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.993.000.000,00		24.827.497.000,00	135.820.497.000,00
Jumlah	110.993.000.000,00	-	28.833.222.000,00	139.826.222.000,00

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset tetap yang berasal dari hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Pada Dinas Perhubungan berupa bangunan gedung di kompleks terminal Wangon sebesar Rp4.005.725.000,00.
- Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah di kompleks Pasar Wage sebesar Rp86.662.000.000,00, berupa bangunan gedung di kompleks Pasar Wage sebesar Rp7.551.410.000,00, berupa tanah di kompleks Pasar dan Terminal Wangon sebesar Rp24.331.000.000,00, berupa bangunan gedung di kompleks Pasar Wangon sebesar Rp17.276.087.000,00.

19) Penambahan Aset Tetap karena Reklasifikasi dari Aset Lain-lain

Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi dari aset lain-lain berupa bangunan dan gedung sebesar Rp259.176.000,00 pada RSUD Banyumas



20) Koreksi BMD

Koreksi BMD senilai Rp6.846.516.153,00 merupakan koreksi objek barang pada jenis aset yang sama terdapat kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Sekretariat Daerah	40.500.000,00	-	-	40.500.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	742.626.923,00	742.626.923,00
Dinas Perhubungan	-	-	5.162.445.312,00	5.162.445.312,00
Dinas Pendidikan	16.375.000,00	125.653.118,00	9.000.000,00	151.028.118,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	34.190.000,00	-	-	34.190.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.450.000,00	-	-	7.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	294.026.000,00	294.026.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	-	35.654.000,00	35.654.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	-	530.800,00	530.800,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	-	19.980.000,00	19.980.000,00
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	38.085.000,00	-	-	38.085.000,00
Jumlah	156.600.000,00	125.653.118,00	6.564.263.035,00	6.846.516.153,00

b. Pengurangan Aset Tetap

1) Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap dilakukan terhadap aset-aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati senilai Rp7.578.362.060,00.

2) Pengurangan karena KDP telah selesai pengerjaannya

Pengurangan karena KDP telah selesai sebesar Rp138.828.385.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

	KDP	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	337.809.000,00	337.809.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	89.161.965.150,00	89.161.965.150,00
Dinas Perhubungan	2.238.019.851,00	2.238.019.851,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan	14.907.012.407,00	14.907.012.407,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	23.500.000,00	23.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.647.098.250,00	30.647.098.250,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	1.512.981.000,00	1.512.981.000,00
Jumlah	138.828.385.658,00	138.828.385.658,00

3) Pengurangan Aset Tetap karena Mutasi dari SKPD Lain



Rincian pengurangan aset tetap karena mutasi dari SKPD lain sebesar Rp189.352.665.244,70 merupakan pengurangan aset di SKPD yang dikarenakan mutasi dari SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4) Pengurangan Aset Tetap karena Mutasi dalam SKPD

Pengurangan aset tetap karena mutasi dalam SKPD merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD kepada UPT di bawahnya sebesar Rp78.958.479.468,50 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Dinas Kesehatan	2.018.638.000,00	9.184.893.120,00	8.007.902.880,00	3.413.315.800,00	-	22.624.749.800,00
Dinas Pendidikan	-	547.145.393,00	-	-	-	547.145.393,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	23.744.352.090,00	94.568.436,50	24.820.754.347,00	2.086.487.855,00	28.050.000,00	50.774.212.728,50
Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	4.318.655.523,00	-	-	-	4.318.655.523,00
BLUD UPTD Lokawisata Baturraden	-	-	-	-	-	-
Puskesmas Patikraja	-	83.500.000,00	-	-	-	83.500.000,00
Puskesmas Kemranjen I	-	110.000.000,00	-	-	-	110.000.000,00
Puskesmas Kembaran I	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
Puskesmas Baturraden I	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
Puskesmas Pekuncen I	-	66.485.830,00	419.730.194,00	-	-	486.216.024,00
Jumlah	25.762.990.090,00	14.419.248.302,50	33.248.387.421,00	5.499.803.655,00	28.050.000,00	78.958.479.468,50

5) Pengurangan Aset Tetap karena Pemecahan Data

Pengurangan aset tetap karena Pemecahan Data sebesar Rp431.208.326,00 dengan rincian kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Lingkungan Hidup	94.000.000,00	94.000.000,00
Kecamatan Kalibagor	337.208.326,00	337.208.326,00
Jumlah	431.208.326,00	431.208.326,00



6) Pengurangan Aset Tetap karena Penggabungan Data

Pengurangan aset tetap karena Penggabungan Data sebesar Rp51.387.704.334,00 dengan rincian kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Tanah	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.921.760,00	497.113.000,00	43.214.000,00	548.248.760,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	8.659.723.011,00	8.659.723.011,00
Dinas Kesehatan	-	6.021.998.000,00	-	6.021.998.000,00
Puskesmas Somagede	-	37.125.000,00	-	37.125.000,00
Puskesmas Sokaraja I	-	119.095.000,00	-	119.095.000,00
Puskesmas Sokaraja II	-	4.341.913.000,00	-	4.341.913.000,00
Puskesmas Sumbang II	-	55.630.000,00	-	55.630.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	-	778.361.775,00	-	778.361.775,00
Puskesmas Cilongok I	148.710.101,00	395.505.000,00	-	544.215.101,00
Puskesmas Jatilawang	-	4.482.663.500,00	-	4.482.663.500,00
Puskesmas Rawalo	-	59.800.000,00	-	59.800.000,00
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini	-	72.462.000,00	-	72.462.000,00
Dinas Pendidikan	-	87.440.950,00	-	87.440.950,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	70.709.000,00	-	70.709.000,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	-	114.284.100,00	41.105.000,00	155.389.100,00
Inspektorat Daerah	-	205.485.000,00	-	205.485.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.454.971.442,00	18.670.166.025,00	-	20.125.137.467,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	522.699.000,00	-	522.699.000,00
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	-	2.973.510.135,00	-	2.973.510.135,00
Kecamatan Sumpiuh	-	604.579.000,00	-	604.579.000,00
Kecamatan Kemranjen	-	126.930.000,00	-	126.930.000,00
Kecamatan Tambak	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	-	151.750.000,00	-	151.750.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	199.722.000,00	18.420.000,00	-	218.142.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	322.637.000,00	-	322.637.000,00
Kecamatan Kedungbanteng	-	8.946.810,00	-	8.946.810,00
Kecamatan Gumelar	-	22.985.725,00	-	22.985.725,00
Kecamatan Jatilawang	-	27.900.000,00	-	27.900.000,00
Kecamatan Wangon	-	29.753.000,00	-	29.753.000,00
Kecamatan Rawalo	-	2.475.000,00	-	2.475.000,00
Jumlah	1.811.325.303,00	40.832.337.020,00	8.744.042.011,00	51.387.704.334,00

7) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi menjadi Barang Persediaan

Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi menjadi barang persediaan sebesar Rp58.632.480,00 dengan rincian kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum	40.490.000,00	-	40.490.000,00
Dinas Pendidikan	8.100.000,00	-	8.100.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.135.000,00	-	3.135.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga,	-	875.000,00	875.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.296.480,00	-	1.296.480,00
BLUD UPTD Lokawisata	4.150.000,00	-	4.150.000,00
Puskesmas Lumbir	586.000,00	-	586.000,00
Jumlah	57.757.480,00	875.000,00	58.632.480,00



8) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap

Reklasifikasi Aset merupakan reklasifikasi jenis aset pada SKPD tersebut. Reklasifikasi aset sebesar Rp9.761.588.777,00 terdapat pada kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.070.679.000,00	-	2.070.679.000,00
Dinas Perhubungan	-	99.669.000,00	99.669.000,00
Dinas Pendidikan	37.500.000,00	-	37.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	6.831.615.552,00	-	6.831.615.552,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	69.685.000,00	-	69.685.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.760.300,00	3.760.300,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	29.943.000,00	29.943.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	520.995.925,00	520.995.925,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	-	97.741.000,00	97.741.000,00
Jumlah	9.009.479.552,00	752.109.225,00	9.761.588.777,00

9) Pengurangan karena koreksi Pencatatan

Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pencatatan senilai Rp6.178.099.955,00 merupakan koreksi terhadap nilai barang yang sebelumnya telah tercatat. Koreksi Ekuitas terdapat pada kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	56.796.000,00	56.796.000,00
Dinas Kesehatan	-	212.000.000,00	-	-	-	212.000.000,00
Dinas Pendidikan	-	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	-	84.045.455,00	-	-	-	84.045.455,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	-	-	-	67.508.500,00	-	67.508.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.966.465.000,00	-	-	-	-	4.966.465.000,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Puskesmas Banyumas	124.300.000,00	19.000.000,00	63.000.000,00	-	-	206.300.000,00
Puskesmas Kebasen	-	22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00
Puskesmas Patikraja	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Puskesmas Sumpiuh II	-	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
Puskesmas Kemranjen I	-	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00
Puskesmas Kemranjen II	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
Puskesmas Tambak I	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
Puskesmas Tambak II	-	8.685.000,00	-	-	-	8.685.000,00
Puskesmas Sokaraja I	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
Puskesmas Sokaraja II	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Puskesmas Kembaran I	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00
Puskesmas Sumbang I	-	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Puskesmas Sumbang II	-	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	-	17.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	-	15.500.000,00	-	-	-	15.500.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	-	22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	-	22.500.000,00	-	-	-	22.500.000,00
Puskesmas Kedungbanteng	-	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
Puskesmas Ajibarang I	-	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
Puskesmas Ajibarang II	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
Puskesmas Cilongok I	-	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Puskesmas Cilongok II	-	16.700.000,00	-	-	-	16.700.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	-	20.300.000,00	-	-	-	20.300.000,00
Puskesmas Somagede	-	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
Puskesmas Sumpiuh I	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Puskesmas Baturraden II	-	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
Puskesmas Gumelar	-	8.500.000,00	-	-	-	8.500.000,00
Puskesmas Jatilawang	-	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00
Puskesmas Wangon I	-	19.300.000,00	-	-	-	19.300.000,00
Puskesmas Wangon II	-	25.500.000,00	-	-	-	25.500.000,00
Puskesmas Lumbir	-	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00
Puskesmas Rawalo	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00
Puskesmas Purwojati	-	17.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00
Puskesmas Pekuncen I	-	13.000.000,00	-	-	-	13.000.000,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Laboratorium Kesehatan	-	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
Jumlah	5.090.765.000,00	800.030.455,00	163.000.000,00	67.508.500,00	56.796.000,00	6.178.099.955,00



10) Pengurangan Aset Tetap karena Koreksi BMD

Koreksi BMD senilai Rp6.846.516.153,00 merupakan koreksi objek barang pada jenis aset tetap yang sama terdapat pada kelompok aset dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Sekretariat Daerah	40.500.000,00	-	-	40.500.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	742.626.923,00	742.626.923,00
Dinas Perhubungan	-	-	5.162.445.312,00	5.162.445.312,00
Dinas Pendidikan	16.375.000,00	125.653.118,00	9.000.000,00	151.028.118,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	34.190.000,00	-	-	34.190.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.450.000,00	-	-	7.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	294.026.000,00	294.026.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	-	35.654.000,00	35.654.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	-	530.800,00	530.800,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	-	19.980.000,00	19.980.000,00
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	38.085.000,00	-	-	38.085.000,00
Jumlah	156.600.000,00	125.653.118,00	6.564.263.035,00	6.846.516.153,00

11) Pengurangan Aset Tetap karena Hutang PEN

Pengurangan aset tetap karena hutang PEN merupakan pengurangan aset tetap yang telah diakui pada TA 2021 sebesar Rp57.706.739.981,00 terdapat pada kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

SKPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Lingkungan Hidup	7.305.608.310,00	7.305.608.310,00
Dinas Pekerjaan Umum	43.686.338.008,00	43.686.338.008,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	6.714.793.663,00	6.714.793.663,00
Jumlah	57.706.739.981,00	57.706.739.981,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp3.594.841.536.167,87 dan Rp3.450.040.187.351,87. Dengan demikian, Tanah per 31



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Desember 2022 bertambah sebesar Rp144.801.348.816,00 atau naik 4,20 persen dari Tahun 2021.

Rincian Aset Tetap Tanah berdasarkan Sub Rincian Objek Kelompok Tanah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL	39.057.403.693,00	39.181.703.693,00
2	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	333.286.455.012,00	227.217.714.624,00
3	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	215.785.382.101,00	207.728.851.481,00
4	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	1.344.609.000,00	1.344.609.000,00
5	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	4.777.533.709,00	3.404.630.909,00
6	TANAH PERSIL LAINNYA	5.843.122.082,00	5.843.122.082,00
7	TANAH BASAH	463.203.280,00	438.870.000,00
8	TANAH KERING	260.979.808.730,00	259.527.837.288,00
9	TANAH PERKEBUNAN	456.282.171,00	456.282.171,00
10	TANAH HUTAN	57.791.740.978,00	57.791.740.978,00
11	TANAH PERTANIAN	162.161.328.765,00	162.173.948.765,00
12	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	42.538.742.769,00	42.467.855.959,00
13	TANAH LAPANGAN PARKIR	26.363.520,00	26.363.520,00
14	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	532.961.542,00	532.961.542,00
15	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN	100.325.000,00	100.325.000,00
16	TANAH UNTUK JALAN	2.298.420.829.359,87	2.272.227.978.661,87
17	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	66.337.942.661,00	66.337.942.661,00
18	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	2.420.277.880,00	2.733.560.577,00
19	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN	56.335.400,00	56.335.400,00
20	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	197.924.162,00	197.924.162,00
21	TANAH UNTUK MAKAM	47.935.604.607,00	47.879.804.511,00
22	TANAH UNTUK TAMAN	3.082.509.244,00	-
23	TANAH KAMPUNG	43.464.271.862,00	44.604.381.727,00
24	LAPANGAN LAINNYA	7.780.578.640,00	7.765.442.640,00
Jumlah		3.594.841.536.167,87	3.450.040.187.351,87

Tanah dan bangunan Pasar Sangkalputung berlokasi di Jalan Menteri Supeno Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai barang milik daerah Kabupaten Banyumas dengan pengguna barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, terdiri dari:

- 1) KIB A Tanah tercatat seluas 2.850 m2 dengan nilai perolehan Rp51.187.964,00
- 2) KIB C Gedung dan Bangunan tercatat seluas 1.819,88 m2 dengan nilai perolehan Rp1.292.554.930,00

Pasar Sangkalputung pindah ke lokasi saat ini pada tanggal 24 Mei 1984, dari sebelumnya berlokasi di persimpangan antara Jalan Pekaja dan Jalan Karangkedawung Sokaraja.

Pada tahun 2010 bangunan Pasar Sangkalputung terbakar, sehingga Bangunan Pasar Sangkalputung yang saat ini berdiri dan tercatat sebagai barang milik daerah adalah



bangunan yang diperoleh melalui pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 dan 2011, sedangkan mengenai perolehan tanah Pasar Sangkalputung masih dalam penelusuran.

Pada tanggal 21 Juni 2021 Sdr. Hendro Pudjisantoso mengirimkan surat kepada Bupati Banyumas perihal Kepemilikan Tanah Pasar Sangkalputung yang berisi:

- 1) Bahwa Pasar Sangkalputung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berdiri di atas lahan miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Tahun 2007 dengan luas 1.277 m² atas nama Hendro Pudjisantoso;
- 2) Sdr. Hendro Pudjisantoso menanyakan ketegasan kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Selain surat tersebut, Sdr. Hendro Pudjisantoso juga mengirimkan Somasi I pada tanggal 9 Januari 2023, Somasi II dan terakhir pada tanggal 18 Januari 2023 dan Jawaban Tanggapan Somasi tanggal 1 Februari 2023.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menindaklanjuti surat dan Somasi Sdr Hendro Pudjisantoso dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) rapat koordinasi pada tanggal 2 Juni 2022 untuk membahas penyelesaian tanah Pasar Sangkalputung yang terbit SHM Nomor 0196 atas nama Hendro Pudjisantoso di Ruang Rapat BKAD Kabupaten Banyumas;
- 2) mengirimkan surat Sekretaris Daerah Kab. Banyumas nomor 593/4838/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas pendaftaran Sertifikat Hak Milik Nomor 01961 Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor berkas 133330/2022 NTPN 820220905524255 tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01961 Tahun 2007 dengan luas 1.277 m² adalah benar atas nama pemegang hak Hendro Pudjisantoso dan masih aktif;
- 3) mengirimkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas Nomor 031/0723/XI/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Informasi Warkah Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban;
- 4) melakukan penelusuran riwayat kepemilikan tanah Pasar Sangkalputung termasuk asal usul pengelolaan Pasar Sangkalputung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sebelumnya merupakan Pasar Desa;

Sdr. Hendro Pudjisantoso melalui Sdr. Bambang Pudjianto selaku kuasa hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan nomor perkara : 11/Pdt.G/2023/PN.Bms tanggal 13 Maret 2023, yang antara lain berisi gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk:



- 1) menyerahkan Tanah SHM Nomor 01961 atas nama Hendro Pudjisantoso dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun;
- 2) membayar kerugian immaterial sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- 3) membayar kerugian materiil Rp12.119.368.500,- (dua belas milyar serratus Sembilan belas juta tiga ratur enam puluh delapan lima ratus rupiah).

Terhadap gugatan tersebut, telah dilaksanakan sidang dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas sebanyak 3 kali pada tanggal 28 Maret 2023, 6 April 2023 dan 4 Mei 2023.

2. Peralatan dan Mesin

Paralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.381.337.913.152,11 dan Rp1.236.320.901.236,11. Dengan demikian, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp145.017.011.916,00 atau naik 11,73 persen dari Tahun 2021.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	ALAT BESAR	41.391.623.869,00	36.482.119.710,00
2	ALAT ANGKUTAN	188.216.727.827,00	176.905.220.193,00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	13.053.188.842,00	12.374.423.007,00
4	ALAT PERTANIAN	6.341.286.951,00	6.184.988.169,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	384.872.079.309,75	359.062.202.217,75
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	44.175.770.531,00	40.705.399.261,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	344.544.495.638,30	289.193.680.737,30
8	ALAT LABORATORIUM	96.085.547.005,20	88.142.012.872,20
9	ALAT PERSENJATAAN	2.706.159.299,00	1.994.615.099,00
10	KOMPUTER	227.040.364.878,86	194.750.809.623,86
11	ALAT EKSPLORASI	18.589.744,00	2.843.000,00
12	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	129.625.000,00	34.825.000,00
13	ALAT KESELAMATAN KERJA	6.671.130.820,00	5.383.825.192,00
14	ALAT PERAGA	114.332.050,00	59.664.000,00
15	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	733.110.140,00	711.940.750,00
16	RAMBU - RAMBU	17.797.077.517,00	17.410.527.779,00
17	PERALATAN OLAH RAGA	7.446.803.730,00	6.921.804.625,00
Jumlah		1.381.337.913.152,11	1.236.320.901.236,11



3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.137.435.427.066,15 dan Rp1.850.601.192.656,14. Dengan demikian, Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp286.834.234.410,01 atau naik 15,50 persen dari Tahun 2021.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG	2.042.023.055.889,13	1.828.832.998.636,14
2	MONUMEN	12.981.077.576,00	14.607.468.776,00
3	BANGUNAN MENARA	68.549.852.950,00	757.950.000,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	13.881.440.651,02	6.402.775.244,00
Jumlah		2.137.435.427.066,15	1.850.601.192.656,14

4. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.905.455.719.397,00 dan Rp2.676.435.728.540,00. Dengan demikian, Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp220.019.990.857,00 atau bertambah 8,56 persen dari Tahun 2021.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	JALAN DAN JEMBATAN	2.181.572.664.384,81	1.988.143.888.258,81
2	BANGUNAN AIR	641.455.691.180,19	614.700.600.038,19
3	INSTALASI	41.054.698.833,00	39.890.528.410,00
4	JARINGAN	41.372.664.999,00	33.700.711.833,00
Jumlah		2.905.455.719.397,00	2.676.435.728.540,00

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp101.767.399.503,27 dan Rp100.876.757.746,27. Dengan demikian, Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp890.641.757 atau naik 0,88 persen dari Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	87.646.749.552,27	87.595.357.595,27
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	12.433.329.958,00	11.790.697.158,00
3	HEWAN	721.527.441,00	721.527.441,00
4	BIOTA PERAIRAN	165.369.454,00	165.369.454,00
5	TANAMAN	798.153.098,00	601.536.098,00
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	2.270.000,00	2.270.000,00
Jumlah		101.767.399.503,27	100.876.757.746,27



6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp80.642.301.025,00 dan Rp206.555.843.236,00. Dengan demikian, Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp 125.913.542.211,00 atau turun 60,96 persen dari Tahun 2021.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.810.564.865,00	2.810.564.865,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	76.360.564.760,00	162.507.101.408,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	-	29.386.972.900,00
4	Dinas Perhubungan	73.458.000,00	73.458.000,00
5	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	10.505.892.163,00
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	89.500.000,00	113.000.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	868.767.400,00	819.063.900,00
8	Kecamatan Sumpiuh	439.446.000,00	339.790.000,00
Jumlah		80.642.301.025,00	206.555.843.236,00

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp3.770.179.517.245,56 dan Rp3.324.125.907.801,67. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp446.053.609.443,89 atau naik 14,42 persen dari tahun 2021.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2021.

Akumulasi Penyusutan	Saldo, 31 Des. 2022 (Rp)	Saldo, 31 Des. 2021 (Rp)	Mutasi Penyusutan TA 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.074.215.926.291,11	955.508.235.453,11	118.707.690.838,00
Bangunan dan Gedung	588.709.242.134,00	521.439.785.196,00	67.269.456.938,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.095.482.778.955,45	1.836.665.592.870,56	258.817.186.084,89
Aset Tetap Lainnya	11.771.569.865,00	10.512.294.282,00	1.259.275.583,00
Jumlah	3.770.179.517.245,56	3.324.125.907.801,67	446.053.609.443,89



Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 sebesar Rp446.053.609.443,89 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Penghapusan	Reklasifikasi Aset	Koreksi Ekuitas	Jumlah
Peralatan dan Mesin	122.212.521.262,00	(4.035.727.566,00)	1.304.787.311,00		119.481.581.007,00
Bangunan dan Gedung	67.823.185.163,00	(1.039.939.695,00)	374.802.805,00		67.158.048.273,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.837.488.643,96	(59.735.000,00)	463.649.308,00	77.182.635.747,93	263.424.038.699,89
Aset Tetap Lainnya	1.259.275.583,00	-			1.259.275.583,00
Jumlah	377.132.470.651,96	(5.135.402.261,00)	2.143.239.424,00	77.182.635.747,93	451.322.943.562,89

Jenis Aset	Penambahan Aset dari Reklasifikasi Aset Lainnya	Pecah Gabung BMD Masuk	Pecah Gabung BMD Keluar	Jumlah
Peralatan dan Mesin		138.055.250,00	(911.945.419,00)	118.707.690.838,00
Bangunan dan Gedung	93.124.420,00	7.436.654.726,00	(7.418.370.481,00)	67.269.456.938,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		7.192.580.007,00	(11.799.432.622,00)	258.817.186.084,89
Aset Tetap Lainnya				1.259.275.583,00
Jumlah	93.124.420,00	14.767.289.983,00	(20.129.748.522,00)	446.053.609.443,89

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022 disajikan dalam Lampiran V.10.

8. Properti Investasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021 mengatur bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

Akun Properti Investasi baru akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 setelah Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan perubahan kebijakan akuntansi dan melaksanakan inventarisasi aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.



D. DANA CADANGAN

Dana Cadangan Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 yang rencananya akan disisihkan dari APBD dan dipenuhi secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) APBD TA 2021 sebesar Rp20.000.000.000;
- 2) APBD TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 3) APBD TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

E. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp107.234.795.268,50 dan Rp107.128.534.984,50. Dengan demikian, Aset Lainnya per 31 Desember 2022 bertambah Rp106.260.284,00 atau 0,099 persen dari Tahun 2021.

Nilai Aset Lainnya merupakan nilai kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	758.550.000,00	758.550.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72.985.149.000,00	82.767.544.715,00
Aset Tidak Berwujud	1.507.797.656,00	56.372.910,00
Aset Lain-lain	97.138.992.712,82	91.973.019.469,82
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(65.155.694.100,32)	(68.426.952.110,32)
	107.234.795.268,50	107.128.534.984,50

1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pemkab Banyumas memiliki Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp758.550.000,00. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut merupakan pelimpahan dari Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah melewati batas waktu Ketetapan Pembayaran Ganti Rugi dengan rincian sebagai berikut:



SKPD dan Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Sekretariat DPRD		
<i>Tuntutan Ganti Rugi atas anggota DPRD</i>	736.150.000,00	736.150.000,00
Sekretariat Daerah		
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	2.700.000,00	2.700.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	19.700.000,00	19.700.000,00
Jumlah	758.550.000,00	758.550.000,00

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 Nomor 72/LHPt/XVIII.SMG/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, jumlah TGR yang sudah penetapan adalah sebesar Rp758.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat DPRD

Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan LHP BPK RI No. 124/E/XIV/4/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas LKPD Kabupaten Banyumas TA 2005 dengan jumlah kerugian sebesar Rp1.515.850.000,00. Terhadap TGR tersebut telah diterbitkan 25 Keputusan Bupati Banyumas tanggal 20 Juni 2008 tentang pembebanan Ganti Rugi kepada 25 orang yang memberikan batas waktu pembayaran ganti rugi paling lambat dua tahun setelah tanggal Keputusan Bupati tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp779.700.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp736.150.000,00;

No.	Nama	Sisa Uang yg Belum disetor	Keterangan
1	dr. Tri Waluyo Basuki	168.100.000	Meninggal dunia
2	Yuhri Nurfian Al Kelik	20.650.000	Meninggal dunia
3	Sunarto Arief	8.000.000	
4	Drs. Muke M. Saleh	17.200.000	Meninggal dunia
5	M. Mas'ud, BA	18.000.000	
6	Drs. Moetia Harjatmo	48.000.000	
7	HM. Bachir Suhaemi	32.000.000	
8	Wardoyo	10.200.000	
9	Sardjono, SH	17.200.000	
10	R. Suparto	18.200.000	Meninggal dunia
11	Wiwit Kunsetiaty	16.200.000	
12	Manap Hadi Martono	162.200.000	
13	Darsono Rowi	18.200.000	
14	Siswojo	17.500.000	Meninggal dunia
15	Hj. Wasitah	12.200.000	
16	Sukirlan	17.600.000	
17	Achmad Sudirto	18.200.000	
18	Achmad Khaerun	13.600.000	Meninggal dunia
19	Drs. Anfatoni	15.200.000	Meninggal dunia



No.	Nama	Sisa Uang yg Belum disetor	Keterangan
20	Ny. Sulastri	15.500.000	
21	Achmad Daldiri	17.200.000	
22	Eniyati	15.800.000	
23	Sarkum Heriyanto	18.200.000	Meninggal dunia
24	J. Mudjijo	10.000.000	
25	Suratno	10.800.000	
26	Sobirin, S.Ag.	200.000	
	Jumlah	736.150.000	

b) Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat Daerah

Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan LHP Bawasda tanggal 4 April 2007 No. 790/023/KS/IV/2006 sehubungan kehilangan kendaraan roda dua milik Pemkab Banyumas dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp5.200.000,00 atasnama Suharyanto, B.Sc mantan kasubag program kerja bagian pengendalian pembangunan Setda Kabupaten Banyumas. Atas temuan tersebut yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 23 Maret 2006. Sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.500.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp2.700.000,00;

c) Tuntutan ganti rugi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TGR pada DinpertenKP An. Suharto, Petugas Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluh Pertanian Danaraja Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/110/KS/X/2011 tanggal 15 November 2011. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp9.500.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/488/2016 tanggal 7 Juni 2016 telah dilakukan pengembalian sebesar Rp2.500.000,00 pada tahun 2021, sehingga terdapat sisa TGR sebesar Rp7.000.000,00.

TGR pada DinpertenKP An. Suharto, Penyuluh Pertanian pada BP3K Kecamatan Rawalo, ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/046/KHS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp12.700.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/489/2016 tanggal 7 Juni 2016 belum dilakukan pengembalian, sehingga tagihan masih tetap sebesar Rp12.700.000,00.



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp55.936.846.000,00 dan Rp61.877.241.717,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Bangunan Pasar dan Renovasi Term. Wangon	-	904.718.615,00
Bangunan Kompleks Kebondalem	72.985.149.000,00	72.985.149.000,00
Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage	-	8.877.677.102,00
Akumulasi Penyusutan	(17.048.303.000,00)	(20.890.303.000,00)
Jumlah	55.936.846.000,00	61.877.241.717,00

Aset Kemitraan sebelum Amortisasi Penyusutan sebesar Rp72.985.149.000,00 terdiri atas:

a. Tanah dan Bangunan Kebondalem sebesar Rp72.985.149.000,00

Tanah dan Bangunan Kebondalem merupakan kerja sama pembangunan dan pengelolaan komplek pertokoan Kebondalem Purwokerto dengan pola kerja sama Bangun Serah Kelola antara Pemkab Banyumas dengan PB Bali CV dan PT Graha Cipta Guna. Kerja sama tersebut diatur dalam perjanjian tanggal 22 Januari 1980, 21 Desember 1982, 7 Maret 1986, 21 Maret 1988, dan 25 April 1988.

Total nilai aset kemitraan per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.985.149.000,00 merupakan nilai aset yang masih dalam status kerja sama, dari total aset yang dikerjasamakan sejak awal senilai Rp80.320.643.000,00 dikurangi bangunan senilai Rp7.335.494.000,00 yang telah selesai masa perpanjangannya dan telah direklasifikasi menjadi aset Bangunan dan Gedung.

Nilai aset awal sebesar Rp80.320.643.000,00 dihitung berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel. Penilaian tersebut meliputi tanah dengan nilai Rp55.936.846.000,00 dan bangunan dengan nilai Rp24.383.797.000,00.

Terkait dengan perjanjian kerja sama bangun serah kelola tersebut, telah terjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi. Lihat penjelasan pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.507.797.656,00 dan Rp56.372.910,00. Dengan demikian, Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp1.451.424.746,00 atau naik 2.574,68 persen dari Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021.



Aset Tidak Berwujud dengan nilai sebesar Rp1.507.797.656,00 merupakan nilai bersih dari Aset Tidak Berwujud lainnya berupa *software* pada beberapa SKPD sebesar Rp4.268.336.190,00 setelah dikurangi dengan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.760.538.534,00. Adapun rincian rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Lainnya tahun 2022 di Lampiran V.12 dan Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 disajikan di Lampiran V.13. dan tabel berikut ini:

SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Dinas Pendidikan	642.767.530,00	639.861.280,00	2.906.250,00
Dinas Kesehatan	64.600.000,00	64.600.000,00	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini	8.690.000,00	8.690.000,00	-
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	26.500.000,00	26.500.000,00	-
Puskesmas Banyumas	17.000.000,00	17.000.000,00	-
Puskesmas Gumelar	4.900.000,00	4.900.000,00	-
Puskesmas Kebasen	9.075.000,00	9.075.000,00	-
Puskesmas Purwokerto Barat	15.430.000,00	15.430.000,00	-
Puskesmas Rawalo	9.850.000,00	9.850.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	411.234.000,00	411.234.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	1.703.850.000,00	226.850.000,00	1.477.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	90.604.000,00	90.604.000,00	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.500.000,00	17.500.000,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja	16.300.000,00	16.300.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	12.600.000,00	12.600.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.635.000,00	9.790.000,00	9.845.000,00
Dinas Perhubungan	136.032.500,00	136.032.500,00	-
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	61.300.000,00	61.300.000,00	-
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	69.269.241,00	51.222.835,00	18.046.406,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.567.100,00	38.567.100,00	-
Sekretariat Daerah	124.370.000,00	124.370.000,00	-
Kecamatan Kemranjen	12.430.000,00	12.430.000,00	-
Kecamatan Purwokerto Selatan	7.100.000,00	7.100.000,00	-
Kecamatan Sumpiuh	12.540.000,00	12.540.000,00	-
Kecamatan Tambak	12.900.000,00	12.900.000,00	-
Badan Pendapatan Daerah	308.180.819,00	308.180.819,00	-
Badan Keuangan dan Aset Daerah	146.911.000,00	146.911.000,00	-
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.200.000,00	258.200.000,00	-
Jumlah	4.268.336.190,00	2.760.538.534,00	1.507.797.656,00

4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp97.138.992.712,82 dan Rp91.973.019.469,82. Dengan demikian, Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp5.165.972.643,00 atau turun 5,62 persen dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2021.



Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp97.138.992.712,82 adalah nilai dari Barang Rusak Berat sebesar Rp90.180.996.053,82 ditambah Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp105.977.064,00 dan Rp6.852.019.595,00 Pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Aset Lain-lain:	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi	31 Desember 2022 (Rp)
Barang rusak berat	91.867.042.405,82	(1.686.046.352,00)	90.180.996.053,82
Kas yang dibatasi penggunaannya	105.977.064,00	-	105.977.064,00
Pokok TDF		6.852.019.595,00	6.852.019.595,00
	91.973.019.469,82	5.165.973.243,00	97.138.992.712,82

Kas yang dibatasi penggunaannya berupa Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan sebesar Rp105.977.064,00 merupakan pokok dan bunga atas Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan pokok TDF sebesar Rp6.852.019.595,00.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp65.155.694.100,32 dan Rp68.426.952.110,32. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp3.271.258.010,00 atau turun 4,78 persen dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh mutasi sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	17.048.303.000,00	20.890.303.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	48.107.391.100,32	47.536.649.110,32
Jumlah	65.155.694.100,32	68.426.952.110,32



Keterangan Mutasi	Nilai (Rp)
Penghapusan	(728.181.877,00)
Koreksi Aset Lain-lain	(156.043.351,00)
Reklasifikasi Aset Lain-lain	(93.124.420,00)
Tahun Berjalan	1.548.091.638,00
Koreksi Aset Kemitraan	(3.842.000.000,00)
	(3.271.258.010,00)

Daftar saldo Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan dalam Lampiran V.11.

F. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp237.238.139.802,33 dan Rp226.020.632.393,00. Dengan demikian, Kewajiban per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp11.217.507.409 atau 4,96 persen dari Tahun 2021.

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemkab Banyumas terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban:	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	51.868.107.152,33	157.445.030.773,00
Kewajiban Jangka Panjang	185.370.032.650,00	68.575.601.620,00
	237.238.139.802,33	226.020.632.393,00

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp51.868.107.152,33 dan Rp157.445.030.773,00. Dengan demikian, Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp105.576.923.620,67 atau minus 67,06 persen dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021.

Akun Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	707.251.723,00	599.803.097,00
Utang Bunga	1.142.286.024,00	792.987.786,00
Utang Pajak	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pendapatan Diterima di Muka	1.293.714.622,33	825.003.177,00
Utang Belanja	34.857.276.716,00	141.396.400.421,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.367.578.067,00	2.330.836.292,00
	51.868.107.152,33	157.445.030.773,00

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar dan Rp707.251.723,00 dan Rp599.803.097,00. Dengan demikian, Utang PFK per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp107.448.626,00 atau 17,91% persen dari Utang PFK per 31 Desember 2021.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.

Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada BUD, BLUD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo dan mutasi utang PFK TA 2022 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Utang PFK:	31 Desember 2021	Reklasifikasi Masuk/(Keluar)	Penerimaan 2022	Pengeluaran 2022	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Utang PFK pada BUD:					
<i>Pajak atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan:</i>					
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	41.044.896.902,00	41.044.896.902,00	-
Utang IWP	-	-	55.956.665.671,00	55.956.665.671,00	-
Utang PPh Pasal 21	170.833.406,00	-	42.993.974.273,00	42.993.974.273,00	170.833.406,00
Utang Tap erum	-	-	-	-	-
Iuran Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-	1.284.071.441,00	1.284.071.441,00	-
Iuran Utang Jaminan Kematian	-	-	3.851.979.300,00	3.851.979.300,00	-
	170.833.406,00	-	145.131.587.587,00	145.131.587.587,00	170.833.406,00
<i>Utang PFK Lainnya</i>					
Jaminan Kesungguhan	107.197.574,00	-	863.415,00	-	108.060.989,00
Penerimaan Kesalahan Transfer	-	-	37.372.000,00	-	37.372.000,00
	107.197.574,00	-	38.235.415,00	-	145.432.989,00
Jumlah Utang PFK pada BUD	278.030.980,00	-	145.169.823.002,00	145.131.587.587,00	316.266.395,00
Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	2.724.790,00	-	7.658.673.014,00	7.658.547.876,00	2.849.928,00
LS Pihak Ketiga	73.813.170,00	-	212.454.419.753,00	212.528.232.923,00	-
	76.537.960,00	-	220.113.092.767,00	220.186.780.799,00	2.849.928,00
Utang PFK pada Bendahara BOS:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	25.714.646,00	-	3.591.413.027,00	3.475.945.888,00	141.181.785,00
Pajak atas Dana BOS	-	-	-	-	-
	25.714.646,00	-	3.591.413.027,00	3.475.945.888,00	141.181.785,00
Utang PFK pada BLUD					
Potongan Pajak belum disetor	-	-	33.623.671.364,00	33.596.237.260,00	27.434.104,00
Uang Titipan Pasien	219.519.511,00	-	219.519.511,00	219.519.511,00	219.519.511,00
Jumlah Utang PFK pada BLUD	219.519.511,00	33.623.671.364,00	33.843.190.875,00	33.815.756.771,00	246.953.615,00
Jumlah Utang PFK	599.803.097,00	33.623.671.364,00	399.126.106.644,00	399.134.125.157,00	707.251.723,00



1) Utang PFK pada BUD

- Utang PFK pada BUD merupakan Utang PFK PPh Pasal 21 sebesar Rp170.833.406,00 berasal dari pemotongan PPh Pasal 21 pembayaran gaji bulan Oktober s.d. Desember 2016. Jumlah tersebut semula dimaksudkan sebagai kompensasi atas kelebihan perhitungan setoran PPh Pasal 21 pembayaran gaji tahun 2015. Berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Nomor S-423/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 25 Januari 2017, jumlah tersebut tidak dikompensasikan sehingga harus disetorkan ke Kas Negara.
- Utang PFK Lainnya pada BUD sebesar Rp145.432.989,00 berasal dari pokok, bunga atas deposito jaminan kesungguhan pertambangan dan Penerimaan kesalahan transfer yang berada di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Namun demikian karena kewenangan pertambangan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat, maka diperlukan penilaian dari Kementerian ESDM mengenai status reklamasi tanah hasil pertambangan untuk menentukan dapat tidaknya deposito jaminan pertambangan tersebut dikembalikan ke pemilik tambang. Sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, belum ada koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait permohonan penilaian reklamasi.

2) Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD

Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp2.849.928,00 merupakan pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah tersebut seluruhnya telah disetor pada tahun 2023.

3) Utang PFK pada Bendahara BOS

Utang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp141.181.785,00 merupakan pajak atas belanja yang bersumber dari dana BOS yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2022.

4) Utang PFK pada BLUD

Utang PFK pada BLUD sebesar Rp219.519.511,00 merupakan uang titipan pasien pada RSUD Banyumas.

b. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga sebesar Rp1.142.286.024,00 merupakan utang bunga pinjaman PEN bagian bulan Desember 2022 yang jatuh tempo pada 31 Desember 2022 dan diperhitungkan sebagai pemotong DAU pada periode penyaluran bulan Januari 2023 yang ditetapkan berdasarkan KMK Nomor 36/KM/7/2021.



c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.500.000.000,00 merupakan nilai kewajiban moneter atas penyelesaian sengketa hukum kerja sama bangun serah kelola bangunan Komplek Kebondalem Purwokerto dengan PT GCG.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2443/K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2011, Pemkab Banyumas sebagai Tergugat berkewajiban untuk:

- a) Membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp24.410.883.023,00;
- b) Membayar kerugian bunga sebesar 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan pelaksanaan isi putusan;
- c) Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00;
- d) Meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu:
 - (1) Pemkab Banyumas berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari pedagang kaki lima (PKL).
 - (2) Pemkab Banyumas berkewajiban memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (memberikan hak kepada PT. GCG untuk mengelola bangunan Taman Hiburan Rakyat selama 20 tahun, Pertokoan selama 30 tahun dan perkiosan selama 15 tahun).
- e) Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan.
- f) Membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00.
- g) Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2011 Pemkab Banyumas menyerahkan titipan pembayaran melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebesar Rp500.000.000,00.
- h) Jumlah kewajiban moneter berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung terhitung sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp40.395.770.119,00 yang terdiri atas:
 - (1) Ganti kerugian materiil sebesar Rp24.410.883.023,00.
 - (2) Ganti kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - (3) Biaya perkara sebesar Rp500.000,00
 - (4) Pembayaran kerugian bunga (*opportunity loss*) sebesar Rp12.083.387.096,00 yakni 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 terhitung sejak September 2007 sampai 31 Desember 2015.
 - (5) Pembayaran uang paksa sebesar Rp1.901.000.000,00 yakni sebesar Rp1.000.000,00 per hari selama 1.536 hari (yakni dari tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2015).



- i) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN. Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT. Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/ 2011 tanggal 8 Desember 2016, para pihak telah menyepakati eksekusi/pelaksanaan putusan perkara sebagai berikut:
- (1) Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Mahkamah Agung Nomor 2443K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 segera dilaksanakan oleh Pemkab Banyumas dengan secara sukarela.
 - (2) Kewajiban pembayaran dari Termohon Eksekusi (Pemkab Banyumas) kepada Pemohon Eksekusi (PT. GCG) disepakati sebesar Rp22.000.000.000,00.
 - (3) Pembayaran kewajiban oleh Pemkab Banyumas kepada PT. GCG akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:
 - (a) Tahap I sebesar Rp10.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
 - (b) Tahap II sebesar Rp5.000.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2018.
 - (c) Tahap III sebesar Rp6.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2019.
 - (4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai yang dijanjikan maka Pemkab Banyumas akan dikenai sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 per hari keterlambatan.
 - (5) Pengosongan obyek sengketa terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Pemkab Banyumas paling lambat 31 Maret 2017.
 - (6) Pihak PT GCG bersedia menampung 80 PKL di lahan obyek sengketa dari relokasi-relokasi sementara, kemudian PT. GCG akan menyediakan tempat untuk menampung 80 PKL tersebut dengan prioritas untuk memilih tempat usaha sesuai zonasi sebelum ditawarkan pihak luar.
 - (7) Penyerahan Hak Pengelolaan atas obyek sengketa dimulai dari nol tahun pengelolaan bangunan di atas tanah seluas 20.637 m2 yang dimulai setelah pembangunan selesai dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Agung.
 - (8) Para pihak sepakat melakukan evaluasi surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang akan dituangkan dalam perjanjian secara terpisah.
- j) Pada TA 2017, Pemkab Banyumas telah membayarkan kewajiban yang jatuh tempo sebesar Rp10.500.000.000,00 yang terdiri atas sebesar Rp500.000.000,00 telah dibayarkan melalui titipan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui APBD TA 2017.
- k) Kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan sisanya yang jatuh tempo pada TA 2019 sebesar Rp6.500.000.000,00. Pemkab Banyumas belum membayarkan kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:



- (1) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pendapatan Daerah Pemkab Banyumas No.110/LHP/BPK/XVIII.SMG/ 11/2017 BPK merekomendasikan antara lain: (1) untuk melakukan pengukuran ulang atas aset Komplek Kebondalem yang dikerjasamakan berdasarkan perjanjian tahun 1980 dan 1982 dengan PB Bali CV dan segera memproses serah terima ruko Komplek Kebondalem yang telah selesai masa pengelolaannya sesuai perjanjian tahun 1980 dan Tahun 1982, serta (2) meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/ 2011 tanggal 8 Desember 2016 dan mengupayakan kerja sama yang menguntungkan Pemkab Banyumas.
- (2) Pengukuran ulang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk obyek perjanjian tahun 1980, 1982, dan 1986. Pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Jaksa Pengacara Negara. Sedangkan Peninjauan Kembali atas kesepakatan eksekusi tanggal 8 Desember 2016 belum bisa dilaksanakan namun upaya untuk meninjau kembali sedang dilaksanakan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan rekomendasi BPK-RI Nomor 110/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2017, Pemkab Banyumas dengan didampingi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Melaksanakan negosiasi dengan PT. GCG untuk meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. Nomor 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. Nomor 2443K/Pdt./2008 Jo Nomor 530PK/Pdt/2011 dan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2016, namun upaya dimaksud gagal.
 - (b) Pemkab Banyumas juga telah melaporkan pelanggaran kode etik Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atas kesalahan pengukuran obyek sengketa dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setelah melakukan pemeriksaan menyatakan pelaporan dimaksud diterima dan terbukti serta yang bersangkutan telah diberi hukuman disiplin berat.
 - (c) Pada Tahun 2019, Pemkab Banyumas bersama Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto menyusun gugatan ke PT. GCG tentang pembatalan kesepakatan bersama dan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan hak-hak milik Pemkab Banyumas terkait sengketa pengelolaan kompleks Kebondalem.
 - (d) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dan mulai disidangkan pada tahun 2020 dengan nomor perkara 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt.
 - (e) Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 36/ Pdt.G/2020/PN.Pwt, tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan bahwa gugatan Pemkab Banyumas hanya dikabulkan sebagian.



- (f) Atas putusan tersebut Pemkab Banyumas saat ini sedang mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melawan PT. GCG. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt Pemkab Banyumas telah mendaftarkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 dan pada tanggal 29 April 2021 pengadilan Tinggi Semarang telah memutuskan perkara Nomor 125/Pdt/2021 yang amanatnya berbunyi/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Januari 2021 Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt yang dimohonkan banding tersebut menyatakan gugatan pembanding/penggugat tidak dapat diterima atas putusan nomor 125/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 29 April 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Mei 2021 telah mengajukan upaya kasasi hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia begitu pula dengan PT. Graha Cipta Guna pada tanggal yang sama juga telah mengajukan upaya hukum kasasi dan sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

d. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.293.714.622,33 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari sewa aset daerah dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Pemanfaatan	Jangka Waktu	Dari	Sampai dengan	Nilai kontrak	Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022
Dinas Kesehatan	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	75.000.000,00	40.000.000,00
RSUD Banyumas	ATM	5 Tahun	10/09/20	09/09/23	52.500.000,00	41.680.432,00
RSUD Ajibarang	ATM	5 Tahun	01/10/17	30/09/22	75.000.000,00	8.250.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	75.000.000,00	40.000.000,00
DPMPTSP	ATM	5 Tahun	16/09/21	15/09/26	75.000.000,00	56.250.000,00
Dinkanak	Tanah	5 Tahun	26/07/21	25/07/26	157.788.050,00	91.659.603,00
Sekretariat Daerah	ATM	5 Tahun	21/10/19	20/10/24	75.000.000,00	48.750.000,00
Kecamatan Cilongok	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	60.000.000,00	32.000.000,00
Kecamatan Jatilawang	ATM	5 Tahun	04/09/20	04/09/25	62.500.000,00	33.333.333,00
Kecamatan Lumir	ATM	5 Tahun	04/09/20	04/09/25	60.000.000,00	32.000.000,00
Kecamatan Kemranjen	ATM	5 Tahun	30/11/20	29/11/25	60.000.000,00	35.000.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekolah	5 Tahun	21/02/18	20/02/23	74.135.000,00	2.471.167,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	K. Kas Pembantu	5 Tahun	12/11/18	11/11/23	74.230.000,00	13.608.794,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. Delimas Adana	5 Tahun	30/11/22	29/11/27	475.000.000,00	467.083.293,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	120.870.000,00	8.711.667,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	130.675.000,00	8.058.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara	Lahan billboard	5 Tahun	08/08/19	07/08/24	21.000.000,00	6.650.000,00
Dinas Pendidikan	Bank Jateng/ATM	5 Tahun	02/06/20	01/06/25	75.000.000,00	36.250.000,00
Lokawisata Baturraden	Pemanfaatan Aset	1 Tahun	01/05/22	31/05/23		290.458.333,33
BKSDM	Kantin	1 Tahun	01/06/22	31/05/23	3.000.000,00	1.500.000,00
JUMLAH						1.293.714.622,33

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 berdasarkan SKPD disajikan di Lampiran V.12.



e. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp34.857.276.716,00 dan Rp141.396.400.421,00. Dengan demikian, Utang Belanja per 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp106.539.123.705,00 atau mengalami penurunan sebesar 75,35 persen dari Utang Belanja per 31 Desember 2021.

Utang Belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diselesaikan pembayarannya. Utang Belanja sebesar Rp34.857.276.716,00 terdiri atas:

- 1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp28.446.682.624,00.
- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.410.594.092,00 yakni kewajiban atas pembayaran langganan daya dan jasa serta pembayaran barang dan jasa lainnya.

Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2022 disajikan di Lampiran V.13.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.367.578.067,00 dan Rp2.330.836.292,00. Dengan demikian, Utang Jangka Pendek Lainnya berkurang sebesar Rp36.741.775,00 atau 1,58 persen dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021. Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut disebabkan adanya lebih bayar Dana Bagi Hasil sesuai PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Rincian komponen lebih bayar DBH Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 2.367.578.067,00 adalah sebagai berikut:

NAMA	Saldo awal Lebih Bayar Tahun 2021	Penyesuaian	Penetapan Lebih bayar No. 127/PMK.07/20 22	Penambahan Nomor 37/KM.7/2022	Penambahan KMK Nomor 29/KM.7/2022	Total Lebih Bayar TA 2022
Piutang Bagi Hasil Pajak						
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	848,290,337	-1,106,547,248	1,954,837,585			1,954,837,585
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	0	0			0	0
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,087,666,436	1,087,666,436		0		0
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	0	0				0
Jumlah		0				0
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak		0				0
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	120,609,516	0	120,609,516			120,609,516
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	87,014,240	0	87,014,240			87,014,240



NAMA	Saldo awal Lebih Bayar Tahun 2021	Penyesuaian	Penetapan Lebih bayar No. 127/PMK.07/2022	Penambahan Nomor 37/KM.7/2022	Penambahan KMK Nomor 29/KM.7/2022	Total Lebih Bayar TA 2022
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	197,965	-1,226,000	1,423,965			1,423,965
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	29,363,778	-856,059	30,219,837			30,219,837
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0	0	0			0
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	157,694,020	-15,778,904	173,472,924			173,472,924
Jumlah	2,330,836,292	-36,741,775	2,367,578,067	0	0	2,367,578,067

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp185.370.032.650,00 merupakan pinjaman yang berasal dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

a) Dasar Hukum

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemkab Banyumas mengajukan pinjaman kepada Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur setinggi-tingginya/dengan limit sebesar Rp191.920.464.000,00 yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-101/SMI/0721 atau Nomor 900/27/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT.SMI dan Bupati Banyumas. PT. SMI adalah BUMN yang bertindak selaku penerima penugasan dari Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana PEN ke sejumlah Pemerintah Daerah.

b) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan, yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali, yaitu tanggal 11 Oktober 2021 dengan masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan. Dengan demikian, Pemkab Banyumas akan mulai membayar pokok pinjaman pada tahun ketiga setelah pencairan pinjaman pertama kali, yaitu pada tahun 2023.



Masa Pencairan Pinjaman PEN Kabupaten Banyumas adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman dan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022.

c) Biaya-biaya

1) Bunga Pinjaman

Atas setiap pinjaman berdasarkan perjanjian, Pemkab Banyumas wajib membayar bunga sebesar 5,66 persen. Bunga dihitung dari pinjaman yang ditarik oleh Pemkab Banyumas.

Bunga dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut PMK Pinjaman PEN Daerah. Perhitungan Bunga PEN pada Pemkab Banyumas diatur dalam KMK Nomor 30/KM.07/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Adapun skedul pemotongan DAU TA 2022 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Periode Pembayaran	Periode Penyaluran DAU	Pemotongan DAU untuk Pembayaran Bunga Pinjaman	
1	Januari 2022	Rp	267.957.370,00
2	Februari 2022	Rp	407.785.041,00
3	Maret 2022	Rp	632.413.277,00
4	April 2022	Rp	903.472.943,00
5	Mei 2022	Rp	874.328.654,00
6	Juni 2022	Rp	903.472.943,00
7	Juli 2022	Rp	874.328.654,00
8	Agustus 2022	Rp	903.472.943,00
9	September 2022	Rp	903.472.943,00
10	Oktober 2022	Rp	874.328.654,00
11	Nopember 2022	Rp	903.472.943,00
12	Desember 2022	Rp	874.328.654,00
JUMLAH		Rp	9.322.835.019,00

2) Biaya Pengelolaan Pinjaman

Pemkab Banyumas wajib membayar biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185 persen yang dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum efektifnya pinjaman sebesar 0,185 persen dari limit pinjaman yang telah dibayar oleh Pemkab Banyumas pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp355.052.858,00.
- Pada tahun 2022 Pemkab Banyumas telah membayar biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185 dari limit pinjaman sebesar Rp342.934.560,00 pada tanggal 24 Oktober 2022.

3) Biaya Provisi

Biaya Provisi sebesar 1 persen dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali dari yang dibayarkan pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman.



Biaya provisi Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.853.700.327,00 yang telah dibayar pada tanggal 3 Februari 2022.

d) Jadwal Indikatif Pembayaran Pokok Pinjaman

Seperti halnya pembayaran bunga, pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum. Mekanisme pemotongan DTU mengacu kepada perjanjian pinjaman. Besaran DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PT.SMI dengan DPJK.

Besarnya angsuran pokok setiap bulan adalah masing-masing sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan. Angsuran pokok dibayarkan setiap tanggal perhitungan DTU oleh DJPK setiap akhir bulan setelah masa *grace period* berakhir. Angsuran pokok pada periode terakhir adalah sebesar nilai penarikan pinjaman dikurangi nilai pokok pinjaman yang telah dibayar. Pembayaran pokok dimulai pada bulan/periode ke-25 sampai dengan bulan ke-60 pinjaman atau selama 36 bulan.

Adapun rincian rencana pembayaran pokok pinjaman dan biaya lainnya disajikan pada tabel berikut:

No	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pencairan Pinjaman	185.370.032.650	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok	-	-	20.596.670.456	61.790.011.368	61.790.011.368	41.193.339.458
3	Saldo Pinjaman	185.370.032.650	185.370.032.650	164.773.362.194	102.983.350.826	41.193.339.458	-

e) Kontrak yang dibiayai Pinjaman PEN

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang diajukan pada Kementerian Keuangan, pinjaman PEN pada Pemkab Banyumas dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Adapun kontrak yang dibiayai pinjaman PEN pada Pemkab Banyumas adalah sebesar Rp185.370.032.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Taman Botani yang dilaksanakan oleh Dinporabudpar sebesar Rp15.415.579.000,00;
- (2) Pengembangan Lokawisata Baturraden yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp33.128.512.300,00;
- (3) Pengembangan Sentra Kuliner dan UMKM serta Pembangunan Menara Pandang dan Kawasannya di Jl. Gerilya-Soedirman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp108.279.252.850,00;
- (4) Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp28.546.688.500,00.

f) Pencairan Pinjaman PEN

Pencairan pinjaman PEN TA 2021 terlaksana dalam 2 (dua) tahap, sedangkan pencairan tahap ketiga dilaksanakan pada TA 2022.

Pencairan Tahap I ditransfer ke rekening RKUD pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp46.620.318.250,00 sedangkan pencairan Tahap II dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp21.955.283.370,00 dan Pencairan Tahap III dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp116.794.431.030,00.



G. EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemkab Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2021	7.032.262.399.237,04
Surplus/(Defisit)-LO	186.736.411.100,63
Koreksi Ekuitas	(75.938.863.239,77)
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	7.143.059.947.097,90

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan nilai persediaan dan koreksi atas pencatatan aset. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemkab Banyumas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO pada periode Tahun 2022 disandingkan dengan LO Tahun 2021.

Pendapatan-LO pada periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.164.538.006.083,80 atau mengalami penurunan sebesar minus Rp113.358.650.101,32 atau minus 3,46 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp3.277.896.656.185,12. Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2022 tersebut berasal dari PAD sebesar Rp779.183.244.022,38, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.217.414.227.518,00, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp167.940.534.543,42.

Beban pada periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.106.258.633.479,17 atau mengalami kenaikan sebesar Rp170.993.721.237,03 atau 5,83 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.935.264.912.242,14.

A. PENDAPATAN-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp3.164.538.006.083,80 dan Rp3.277.896.656.185,12. Pendapatan-LO periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp113.358.650.101,32 atau minus 3,46 persen dari periode Tahun 2021. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO disajikan dalam tabel berikut.

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan-LO				
1 Pendapatan Asli Daerah	779.183.244.022,38	823.255.835.433,32	(44.072.591.410,94)	(5,35)
2 Pendapatan Transfer	2.217.414.227.518,00	2.135.273.791.011,00	82.140.436.507,00	3,85
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	167.940.534.543,42	319.367.029.740,80	(151.426.495.197,38)	(47,41)
	3.164.538.006.083,80	3.277.896.656.185,12	(113.358.650.101,32)	(3,46)



Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp779.183.244.022,38 dan Rp823.255.835.433,32. PAD-LO periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp44.072.591.410,94 atau minus 5,35 persen dari periode Tahun 2021. Rincian PAD-LO disajikan dalam tabel berikut:

<i>Pendapatan-LO</i>	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1 Pendapatan Pajak Daerah	269.732.853.557,00	228.987.185.408,00	40.745.668.149,00	17,79
2 Pendapatan Retribusi Daerah	26.748.346.527,00	23.304.971.779,00	3.443.374.748,00	14,78
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.156.015.215,75	28.366.641.098,32	1.789.374.117,43	6,31
4 Lain-lain PAD Yang Sah	452.546.028.722,63	542.597.037.148,00	(90.051.008.425,37)	(16,60)
	779.183.244.022,38	823.255.835.433,32	(44.072.591.410,94)	(5,35)

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp269.732.853.557,00 dan Rp228.987.185.408,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp40.745.668.149,00 atau naik 17,79 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Pajak Hotel	11.691.202.409,00	6.661.447.114,00	5.029.755.295,00	75,51
Pajak Restoran	30.341.525.352,00	19.573.620.505,00	10.767.904.847,00	55,01
Pajak Hiburan	3.745.164.050,00	663.337.982,00	3.081.826.068,00	464,59
Pajak Reklame	4.472.575.525,00	3.247.767.630,00	1.224.807.895,00	37,71
Pajak Penerangan Jalan	79.981.345.497,00	69.076.634.126,00	10.904.711.371,00	15,79
Pajak Parkir	1.954.749.591,00	1.067.145.250,00	887.604.341,00	83,18
Pajak Air Tanah	1.530.155.774,00	1.559.900.519,00	(29.744.745,00)	-1,91
Pajak Mineral Bukan Logam	7.932.886.217,00	7.642.314.183,00	290.572.034,00	3,80
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	67.260.699.037,00	67.024.527.362,00	236.171.675,00	0,35
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60.822.550.105,00	52.470.490.737,00	8.352.059.368,00	15,92
	269.732.853.557,00	228.987.185.408,00	40.745.668.149,00	17,79

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp269.732.853.557,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan sebesar Rp267.236.064.377,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:



Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	Pajak Daerah-LO	Pajak Daerah -LRA	
Pajak Hotel	11.691.202.409,00	11.691.202.409,00	0,00
Pajak Restoran	30.341.525.352,00	30.341.525.352,00	0,00
Pajak Hiburan	3.745.164.050,00	3.745.164.050,00	0,00
Pajak Reklame	4.472.575.525,00	4.446.084.050,00	26.491.475,00
Pajak Penerangan Jalan	79.981.345.497,00	79.981.345.497,00	0,00
Pajak Parkir	1.954.749.591,00	1.954.749.591,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.530.155.774,00	1.516.529.774,00	13.626.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam	7.932.886.217,00	7.932.886.217,00	0,00
PBB-P2	67.260.699.037,00	64.804.027.332,00	2.456.671.705,00
BPHTB	60.822.550.105,00	60.822.550.105,00	0,00
	269.732.853.557,00	267.236.064.377,00	2.496.789.180,00

1. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak (*self-assessment*). Pada TA 2022 tidak terdapat ketetapan lebih atau kurang bayar yang diterbitkan oleh BUD. Dengan demikian, untuk obyek pajak tersebut tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak pada LO dengan Pendapatan Pajak pada LRA.
2. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 dipungut berdasarkan mekanisme ketetapan oleh BUD (*official assessment*). Ketetapan pajak tersebut menjadi dasar pengakuan timbulnya hak tagih bagi Pemerintah Daerah yang diakui pada LO. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat selisih antara besaran Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA.
3. Selisih pada Pajak Reklame sebesar Rp26.491.475,00 berasal dari ketetapan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan saldo piutang Pajak Reklame dari sebesar Rp413.037.180,00 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp439.528.655,00 per 31 Desember 2022.
4. Selisih pada Pajak Air Tanah sebesar Rp13.626.000,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan nilai Piutang Pajak Air Tanah, dari sebesar Rp449.280.951,20 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp462.906.951,20 per 31 Desember 2022.
5. Selisih pada PBB-P2 sebesar Rp2.456.671.705,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan saldo Piutang PBB-P2 dari sebesar Rp105.688.805.800,00 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp108.145.477.505,00 per 31 Desember 2022.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp26.748.346.527,00 dan Rp23.304.971.779,00. Pendapatan Retribusi Daerah periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.443.374.748,00 atau 14,78 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	126.730.500,00	(126.730.500,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	97.288.000,00	(97.288.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.196.800.000,00	783.886.000,00	412.914.000,00	52,68
Retribusi Pelayanan Pasar	5.935.372.722,00	4.135.594.207,00	1.799.778.515,00	43,52
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.225.760.000,00	905.510.000,00	320.250.000,00	35,37
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.850.000,00	99.650.000,00	26.200.000,00	26,29
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	389.454.500,00	372.592.500,00	16.862.000,00	4,53
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.870.838.000,00	1.682.833.700,00	188.004.300,00	11,17
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.725.037.161,00	4.322.162.972,00	402.874.189,00	9,32
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	388.375.000,00	-	388.375.000,00	-
Retribusi Terminal	1.284.978.200,00	767.206.500,00	517.771.700,00	67,49
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.032.969.000,00	824.663.200,00	208.305.800,00	25,26
Retribusi Rumah Potong Hewan	200.111.000,00	166.588.000,00	33.523.000,00	20,12
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	915.707.000,00	4.647.556.000,00	(3.731.849.000,00)	(80,30)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	221.424.650,00	108.469.000,00	112.955.650,00	104,14
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.119.354.294,00	4.093.877.800,00	3.025.476.494,00	73,90
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	48.500.000,00	19.500.000,00	29.000.000,00	148,72
Retribusi Izin Trayek	49.575.000,00	65.025.000,00	(15.450.000,00)	(23,76)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	18.240.000,00	85.838.400,00	(67.598.400,00)	(78,75)
Jumlah Retribusi Daerah	26.748.346.527,00	23.304.971.779,00	3.443.374.748,00	14,78

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Banyumas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit pengelola.

Selisih Pendapatan Retribusi LRA-LO tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan retribusi, yakni Pendapatan Retribusi dalam LRA diakui berdasarkan penerimaan Kas Daerah selama TA 2022 (basis kas) sedangkan dalam LO diakui berdasarkan timbulnya hak bagi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp26.748.346.527,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan sebesar Rp26.130.786.681,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		
	Retribusi-LO	Retribusi-LRA	Selisih
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.196.800.000,00	1.215.800.000,00	(19.000.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	5.935.372.722,00	5.865.677.722,00	69.695.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.225.760.000,00	1.225.760.000,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.850.000,00	125.850.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	389.454.500,00	389.454.500,00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.870.838.000,00	1.870.838.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.725.037.161,00	4.437.484.886,00	287.552.275,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	388.375.000,00	388.375.000,00	-
Retribusi Terminal	1.284.978.200,00	1.284.978.200,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.032.969.000,00	1.032.969.000,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	200.111.000,00	200.111.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	915.707.000,00	915.707.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	221.424.650,00	221.424.650,00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.119.354.294,00	6.840.041.723,00	279.312.571,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	48.500.000,00	48.500.000,00	-
Retribusi Izin Trayek	49.575.000,00	49.575.000,00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	18.240.000,00	18.240.000,00	-
Jumlah Retribusi Daerah	26.748.346.527,00	26.130.786.681,00	617.559.846,00

Berikut penjelasan untuk pos Retribusi Daerah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

1. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar minus Rp19.000.000,00. Selisih tersebut sesuai dengan penurunan piutang karena adanya pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Zona Sokaraja tahun 2018 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp19.000.000,00.
2. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp69.695.000,00 disebabkan terdapat penambahan ketetapan yang belum terbayar di tahun 2022 sebesar Rp78.200.000,00, dan pelunasan piutang retribusi kios tahun 2014 sebesar Rp8.505.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar minus Rp287.552.275,00 dengan rincian sebagai berikut:



Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Realisasi (Rp)			Selisih dari Piutang	Selisih dari pendapatan diterima dimuka
	LO	LRA	Selisih		
Dinas Pendidikan	37.771.500,00	22.771.500,00	15.000.000,00	-	15.000.000
Dinas Kesehatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000
Dinas Pekerjaan Umum	611.347.400,00	611.347.400,00	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000
Dinas Lingkungan Hidup	50.681.400,00	50.681.400,00	-	-	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000,00	600.000,00	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.940.048,00	115.880.048,00	15.060.000,00	60.000,00	15.000.000
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	75.051.000,00	61.557.500,00	13.493.500,00	13.493.500,00	-
Dinas Perikanan dan Peternakan	68.635.610,00	14.600.000,00	54.035.610,00	-	54.035.610
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142.785.000,00	142.785.000,00	-	-	-
Sekretariat Daerah	16.600.000,00	1.600.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000
Kecamatan Ajibarang	17.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000
Kecamatan Banyumas	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000
Kecamatan Cilongok	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	12.000.000
Kecamatan Jatilawang	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000
Kecamatan Kemranjen	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	12.000.000
Kecamatan Lumbir	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	12.000.000
Kecamatan Purwokerto Barat	502.248.305,00	435.206.563,00	67.041.742,00	67.041.742,00	-
Kecamatan Purwokerto Selatan	1.086.934.022,00	672.987.921,00	413.946.101,00	363.637.101,00	50.309.000
Kecamatan Purwokerto Timur	666.181.575,00	615.462.260,00	50.719.315,00	50.719.315,00	-
Kecamatan Purwokerto Utara	461.731.914,00	451.206.714,00	10.525.200,00	6.325.200,00	4.200.000
Kecamatan Somagede	924.000,00	924.000,00	-	-	-
Kecamatan Sumpiuh	712.315.680,00	727.674.580,00	(15.358.900,00)	(15.358.900,00)	-
Kecamatan Tambak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.589.707,00	475.000.000,00	(437.410.293,00)	-	437.410.293
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.700.000,00	24.200.000,00	(1.500.000,00)	-	1.500.000
Jumlah	4.725.037.161,00	4.437.484.886,00	287.552.275,00	485.917.958,00	(198.365.683,00)

Penjelasan selisih retribusi LRA-LO pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Selisih LRA-LO pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.000.000,00 karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM pada TA 2022 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00.
- Selisih LRA-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.000.000,00 karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM pada TA 2022 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00.
- Selisih LRA-LO pada SatpolPP sebesar Rp15.000.000,00 karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan dimuka atas sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor SatpolPP yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00.
- Selisih LRA-LO pada DPMPSTP sebesar Rp15.060.000,00 karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM pada TA 2022 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2021 sebesar Rp75.000.000,00, dan terdapat ketetapan piutang baru pada TA 2022 sebesar Rp60.000,00.
- Selisih LRA – LO pada Dinporabudpar sebesar Rp13.493.500,00 merupakan penambahan piutang retribusi sewa kios di Lokawisata Baturraden TA 2022.



- f) Selisih LRA – LO pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp54.035.610,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa lahan yang diakui sebagai pendapatan retribusi pada TA 2022 sebesar Rp54.035.610,00.
- g) Selisih LRA – LO pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.000.000,00 terjadi karena pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor Sekretariat Daerah pada TA 2022 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2021 sebesar Rp 75.000.000,00.
- h) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Ajibarang sebesar Rp5.000.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk kantor kas PT. BPR BKK di kompleks kantor Kecamatan Ajibarang pada TA 2022 sebesar Rp5.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00.
- i) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Banyumas sebesar Rp3.500.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk *payment point* Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Banyumas pada TA 2022 sebesar Rp3.500.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp 10.500.000,00.
- j) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Cilongok sebesar Rp12.000.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk rumah mesin ATM Bank Jateng tahun 2022 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00.
- k) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Jatilawang sebesar Rp12.500.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk ATM Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Jatilawang pada TA 2021 sebesar Rp45.833.333,00.
- l) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Kemranjen sebesar Rp12.000.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk rumah mesin ATM Bank Jateng tahun 2022 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00.
- m) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Lumbir sebesar Rp12.000.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk ATM Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Lumbir pada TA 2021 sebesar Rp44.000.000,00.
- n) Selisih LRA-LO pada Kecamatan Purwokerto Barat sebesar Rp67.041.742,00 terjadi karena adanya pelunasan piutang Ex Bengkulu TA 2021 yang dibayar pada TA 2022 sebesar minus Rp40.256.900,00 dan Piutang baru Ex Bengkulu TA 2022 sebesar Rp107.298.642,00
- o) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Purwokerto Selatan sebesar Rp413.946.101,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.309.000,00 atas perjanjian pendirian Tower/Menara BTS TA 2021 sebesar Rp67.078.667,00, pelunasan piutang Ex Bengkulu TA 2021 yang dibayar pada TA 2022 sebesar minus Rp4.426.450,00 dan Piutang baru Ex Bengkulu TA 2022 sebesar Rp368.063.551,00.
- p) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Purwokerto Timur sebesar Rp50.719.315,00 terjadi karena adanya Piutang baru Ex Bengkulu TA 2022 sebesar Rp50.719.315,00.



- q) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Purwokerto Utara sebesar Rp10.525.200,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan sebesar Rp4.200.000,00 atas perjanjian pendirian papan iklan TA 2021 sebesar Rp10.850.000,00 dan Piutang baru Ex Bengkulu TA 2022 sebesar Rp6.325.200,00.
- r) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Sumpiuh sebesar minus Rp15.358.900,00 terjadi karena adanya pelunasan piutang Ex Bengkulu TA 2021 yang dibayar pada TA 2022 sebesar minus Rp18.383.900,00 dan Piutang baru Ex Bengkulu TA 2022 sebesar Rp3.025.000,00.
- s) Selisih LRA – LO pada BKAD sebesar minus Rp437.410.293,00 terjadi karena adanya penambahan dari bagian pendapatan retribusi sewa tanah dari PT. Delimas Adana Putra yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2022 sebesar Rp475.000.000,00 sehingga mengakui pendapatan retribusinya sebesar Rp7.916.707,00 untuk TA 2022. Serta adanya pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 29.673.000 atas pendapatan retribusi dari Yayasan Al-Irsyad dan Kantor Kas Bank Jateng.
- t) Selisih LRA – LO pada BKPSDM sebesar minus Rp1.500.000,00 terjadi karena adanya pengurangan dari bagian pendapatan retribusi sewa tanah dan bangunan sebesar Rp1.500.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada bulan September TA 2022 namun terhitung sejak Juni TA 2022 sebesar Rp3.600.000,00.
4. Selisih LO-LRA pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp279.312.571,00 terjadi karena adanya ketetapan piutang baru TA 2022 sebesar Rp303.747.871,00 dan pelunasan piutang Tahun 2021 sebesar minus Rp24.435.300,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp30.156.015.215,75 dan Rp28.366.641.098,32. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.789.374.117,43 atau 6,31 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-Lo	9.481.986.004,00	8.723.491.506,00	758.494.498,00	-
Pendapatan Investasi dari Penyertaan Modal BUMD	20.674.029.211,75	19.643.149.592,32	1.030.879.619,43	5,25
Jumlah Retribusi Daerah	30.156.015.215,75	28.366.641.098,32	1.789.374.117,43	6,31

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp30.156.015.215,75 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA disajikan sebesar Rp21.801.615.649,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		
	LO	LRA	Selisih
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-IO	9.481.986.004	21.801.615.649,00	(12.319.629.645,00)
Pendapatan Investasi dari Penyertaan Modal BUMD	20.674.029.212	-	20.674.029.211,75
Jumlah	30.156.015.215,75	21.801.615.649,00	8.354.399.566,75

Selisih LO – LRA sebesar Rp8.354.399.566,75 disebabkan oleh penerapan metode ekuitas pada BUMD dengan kepemilikan saham mayoritas. Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penilaian investasi disajikan sebesar investasi awal ditambah proporsi bagian laba Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan deviden tunai bagian Pemerintah Daerah.

Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas, yaitu PT. BIJ (Perseroda), PD Pasar Satria, Perumdam Tirta Satria dan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO yang Sah pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp452.546.028.722,63 dan Rp542.597.037.148,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp90.051.008.425,37 atau minus 16,60 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Lain-lain PAD yang Sah:	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.428.847.735,00	742.640.000,00	686.207.735,00	92,40
Jasa Giro-LO	2.004.687.083,12	5.747.941.872,00	(3.743.254.788,88)	(65,12)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	613.571.961,00	39.407.002,00	574.164.959,00	1.457,01
Pendapatan Bunga-LO	12.175.639.762,00	3.386.583.910,00	8.789.055.852,00	259,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	998.279.060,00	537.484.748,00	460.794.312,00	85,73
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.046.698.368,00	303.591.984,00	3.743.106.384,00	1.232,94
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	993.476.308,00	708.117.365,00	285.358.943,00	40,30
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	137.647.463,00	264.538.289,00	(126.890.826,00)	(47,97)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	960.719.700,00	202.500.000,00	758.219.700,00	374,43
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.267.949.463,00	1.185.292.783,00	82.656.680,00	6,97
Pendapatan dari BLUD-LO	427.892.198.489,51	527.986.849.337,00	(100.094.650.847,49)	(18,96)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	624.571.250,00	(624.571.250,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	13.976.454,00	25.151.943,00	(11.175.489,00)	(44,43)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	-	200.613.255,00	(200.613.255,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.695.000,00	7.074.000,00	(5.379.000,00)	(76,04)
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	10.641.876,00	634.679.410,00	(624.037.534,00)	(98,32)
JUMLAH	452.546.028.722,63	542.597.037.148,00	(90.051.008.425,37)	(16,60)

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp452.546.028.722,63 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp507.517.525.434,84. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut:



<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.428.847.735,00	1.428.847.735,00	-
Jasa Giro	2.004.687.083,12	2.400.766.186,00	(396.079.102,88)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	613.571.961,00	613.571.961,00	-
Pendapatan Bunga	12.175.639.762,00	12.175.639.762,00	-
Daerah	998.279.060,00	998.279.060,00	-
Pekerjaan	4.046.698.368,00	4.046.698.368,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	993.476.308,00	993.476.308,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	137.647.463,00	137.650.663,00	(3.200,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	960.719.700,00	960.719.700,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	1.267.949.463,00	1.267.949.463,00	-
Pendapatan BLUD	427.892.198.489,51	482.481.589.352,84	(54.589.390.863,33)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	13.976.454,00	-	13.976.454,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.695.000,00	1.695.000,00	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	10.641.876,00	10.641.876,00	-
JUMLAH	452.546.028.722,63	507.517.525.434,84	(54.971.496.712,21)

Berikut penjelasan untuk pos Lain-lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Selisih LO-LRA pos Penerimaan Jasa Giro sebesar minus Rp396.079.102,88 berasal dari:
 - a) Penyesuaian Penerimaan bunga/remunerasi TDF di Bank Indonesia sebesar Rp1.661.823,12;
 - b) Penyesuaian pendapatan bunga atas setoran pokok Dana Bergulir pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) pada TA 2022 sebesar minus Rp440.883.584,00 (s.d. Bulan November);
 - c) Penyesuaian Jasa Giro Pokok Dana Bergulir sebesar Rp8.418.913,00;
 - d) Penyesuaian Jasa Giro Bunga Dana Bergulir Rp108.765,00;
 - e) Penyesuaian penerimaan bunga jasa giro atas setoran Dana Bergulir Bank Jateng sebesar Rp34.614.980,00;
- 2) Selisih LO-LRA pos Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar minus Rp3.200,00 berasal dari pelunasan piutang Denda Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp3.200,00.
- 3) Selisih LO-LRA pos Pendapatan BLUD sebesar minus Rp54.589.390.863,33 terdiri atas:
 - a) Selisih yang berasal dari penambahan dan pengurangan saldo Piutang Pendapatan BLUD sebesar minus Rp54.321.611.602,00;
 - b) Selisih yang berasal dari penyesuaian saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar minus Rp270.345.762,33;
 - c) Selisih yang berasal dari penyesuaian Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.566.501,00.
- 4) Selisih LO-LRA pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp13.976.454,00 terjadi karena adanya pengakuan tunggakan bunga dana bergulir sebesar Rp4.684.189,00, dan adanya selisih catat sebesar pada Laporan Keuangan Rp9.292.265,00 PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).



2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp2.217.414.227.518,00 dan Rp2.135.273.791.011,00. Pendapatan Transfer-LO periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp82.140.436.507,00 atau naik 3,85 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Transfer	Kenaikan/(Penurunan)			
	2022	2021	(Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.941.516.950.569,00	1.903.233.345.943,00	38.283.604.626,00	2,01
Pendapatan Transfer Antar	275.897.276.949,00	232.040.445.068,00	43.856.831.881,00	18,90
JUMLAH	2.217.414.227.518,00	2.135.273.791.011,00	82.140.436.507,00	3,85

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp2.217.414.227.518,00 sedangkan Pendapatan Transfer-LRA disajikan sebesar Rp2.589.697.751.952. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.941.516.950.569,00	2.314.527.536.417,00	(373.010.585.848)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	275.897.276.949,00	275.170.215.535,00	727.061.414
JUMLAH	2.217.414.227.518,00	2.589.697.751.952,00	(372.283.524.434)

Berikut penjelasan untuk pos Pendapatan Transfer yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.



a. Selisih LO-LRA sebesar minus Rp1.813.679.968,00 pada Dana Perimbangan berasal dari:

- 1) Penyesuaian Penyelesaian Piutang Dana Transfer_DBH Pajak_Kurang Bayar DBH s.d. TA 2022 (KMK 29/KMK.7/2022) sebesar minus Rp2.940.736.920,00
- 2) Koreksi Penetapan Pengakuan Piutang Kurang bayar DBH Mineral dan Batu Bara 2021 sebesar Rp19.314.537,00
- 3) Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh 25/29 sebesar minus Rp252.383.821,00
- 4) Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 sebesar minus Rp426.164.052,00
- 5) Koreksi Realisasi/Pelunasan Piutang Kurang bayar DBH Mineral dan Batu Bara 2021 sebesar minus Rp19.314.537,00
- 6) Koreksi Utang Lebih Salur DBH PBB LO sebesar Rp19.314.537,00
- 7) Penerimaan TDF (Treasury Deposit Facility) di Bank Indonesia sebesar Rp6.852.019.595,00
- 8) Penyelesaian Pengakuan Kurang Salur Dana Transfer-DBH Bukan Pajak (KMK.37/KM.7/2022) sebesar minus Rp612.533.957,00
- 9) Penyesuaian - Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak (PMK No. 127/PMK.07/2022) sebesar Rp510.579.063,00
- 10) Penyesuaian - Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak (PMK No. 127/PMK.07/2022) sebesar minus Rp756.745.901,00
- 11) Penyesuaian Pengakuan Lebih Bayar DBH PMK No. 127/PMK.07/2022 -sebesar Rp36.741.775,00
- 12) Penyesuaian Penyelesaian Kurang Salur Dana Transfer-DBH Pajak (KMK.37/KM.7/2022 & KMK.29/KM.7/2022) sebesar minus Rp4.848.834.610,00
- 13) Penyesuaian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang menjadi kurang bayar (KMK No.29/KMK.07/2022) sebesar Rp426.164.052,00
- 14) Penyesuaian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang menjadi kurang bayar KMK Nomor 37/KM.7/2022 sebesar Rp252.383.821,00

b. Selisih LO – LRA pada Dana Desa

Selisih LO-LRA untuk pos Dana Desa adalah minus Rp371.196.905.880,00. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerimaan Dana Desa tidak menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun hanya sebagai dana yang harus disalurkan kembali ke desa. Karena itu Dana Desa tidak disajikan sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional.

c. Selisih LO – LRA pada Pendapatan Bagi Hasil

Selisih LO – LRA pada Pendapatan Bagi Hasil sebesar minus Rp727.061.414,00 disebabkan pembayaran kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2021 sebesar Rp3.058.195.354,00 yang dibayar tahun 2022 dan penetapan kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2022 sebesar Rp3.785.256.768,00.



3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp167.940.534.543,42 dan Rp319.367.029.740,80. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp151.426.495.197,38 atau minus 47,41 persen dari periode Tahun 2021. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Pendapatan Hibah	164.502.166.126,02	157.366.903.232,00	7.135.262.894,02	4,53
Hibah dari Pemerintah Pusat	60.584.223.030,00	147.949.147.675,00	(87.364.924.645,00)	(59,05)
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	619.170.000,00	8.268.738.500,00	(7.649.568.500,00)	(92,51)
Hibah dari Kelompok Masyarakat	94.209.800,00	894.543.562,00	(800.333.762,00)	(89,47)
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	15.487.518,00	254.473.495,00	(238.985.977,00)	(93,91)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	103.189.075.778,02	-	103.189.075.778,02	-
Pendapatan Lainnya	3.438.368.417,40	162.000.126.508,80	(158.561.758.091,40)	(97,88)
	167.940.534.543,42	319.367.029.740,80	(151.426.495.197,38)	(47,41)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp167.940.534.543,42 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp14.024.437.570,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)
	LO	LRA	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	164.502.166.126,02	14.024.437.570,00	150.477.728.556,02
Hibah dari Pemerintah Pusat	60.584.223.030,00	14.024.437.570,00	46.559.785.460,00
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	619.170.000,00	-	619.170.000,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat	94.209.800,00	-	94.209.800,00
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	15.487.518,00	-	15.487.518,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	103.189.075.778,02	-	103.189.075.778,02
Lain-lain Pendapatan	3.438.368.417,40	-	3.438.368.417,40
	167.940.534.543,42	14.024.437.570,00	153.916.096.973,42

Pendapatan Hibah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp167.940.534.543,42 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp14.024.437.570,00 sehingga terdapat selisih LO-LRA Pendapatan Hibah sebesar Rp153.916.096.973,42. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp60.584.223.030,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp14.024.437.570,00. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp46.559.785.460,00 merupakan:

- 1) Pendapatan Hibah untuk penanganan Covid berupa persediaan pada RSUD Banyumas yang tidak diakui di LRA sebesar Rp280.139.600,00;
- 2) Pendapatan Hibah Obat dan Vaksin Non Covid dari Provinsi kepada Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp23.683.992.187,00 dan Rp25.276.446.624,00;
- 3) Pendapatan Hibah yang tidak diakui di LRA sebesar Rp42.712.026,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Hibah IPDMIP yang belum direimburs. Dan



penyelesaian Piutang Hibah IPDMIP tahun 2021 sebesar minus Rp5.800.599.928,00;

- 4) Pendapatan hibah reguler berupa barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dari pemerintah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak diakui di LRA sebesar Rp146.976.254,00;
 - 5) Pendapatan Hibah OSLON berupa persediaan dari BKKN kepada DPPKBP3A sebesar Rp1.878.035.483,00;
 - 6) Koreksi Penerimaan dan Penggunaan Blanko KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.052.083.214,00.
- b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp619.170.000,00 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp619.170.000,00 adalah hibah persediaan penanganan COVID dari Pemerintah Provinsi kepada RSUD Banyumas.
- c) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp94.209.800,00 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp94.209.800,00 adalah hibah/donasi persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid dan Non Covid pada RSUD Banyumas.
- d) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri -LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp15.487.518,00 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp15.487.518,00 adalah Hibah Non Covid dari BUMN/Swasta pada RSUD Banyumas sebesar Rp14.475.518,00 serta hibah/donasi persediaan/barang pada UPTD Lokawisata Baturaden sebesar Rp1.012.000,00.
- e) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp103.183.075.778,02 sedangkan LRA tidak menyajikan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Selisih LO-LRA Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp103.183.075.778,02 adalah Koreksi Penambahan Aset yang berasal dari donasi/hibah.
- f) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp3.438.368.417,40 sedangkan LRA tidak menyajikan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selisih LO-LRA pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp3.438.368.417,40 merupakan:
- 1) Penyesuaian penyisihan piutang 2022 (Jika Penyisihan Piutang Lebih Kecil dari Penyisihan Tahun Lalu) sebesar Rp1.655.764.586,75
 - 2) Koreksi-Penambahan Inventarisasi sebesar Rp1.417.180.000,00
 - 3) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Ex-Bengkok) sebesar Rp4.444.725,00
 - 4) Koreksi Penyisihan pada pendapatan Jurnal Un Audited 2022 sebesar minus Rp8.017.706,75



- 5) Koreksi penyisihan piutang 2022 Hasil Konfirmasi BPJS (Jika Penyisihan Piutang Lebih Kecil dari Penyisihan Tahun Lalu) sebesar Rp361.614.237,40
- 6) Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi 2022 sebesar Rp6.795.000,00
- 7) Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi Sewa sebesar Rp587.575,00

B. BEBAN

Realisasi Beban-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp3.106.258.633.479,17 dan Rp2.935.264.912.242,14. Beban-LO pada periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp170.993.721.237,03 atau naik sebesar 5,83 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO pada periode Tahun 2021. Perbandingan Beban-LO periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

<i>Beban - LO</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Pegawai	1.421.998.581.986,00	1.443.483.283.139,00	(21.484.701.153,00)	(1,49)
Beban Barang	255.550.359.269,71	252.458.157.259,70	3.092.202.010,01	1,22
Beban Jasa	265.170.475.537,50	276.985.222.715,67	(11.814.747.178,17)	(4,27)
Beban Pemeliharaan	27.020.985.260,01	23.246.276.808,00	3.774.708.452,01	16,24
Beban Perjalanan Dinas	76.173.568.482,00	43.919.037.158,00	32.254.531.324,00	73,44
Beban Uang/Barang untuk Pihak Ketiga/Masyarakat	4.076.678.103,00	5.810.382.166,00	(1.733.704.063,00)	(29,84)
Beban Barang dan Jasa BOS	138.200.882.813,00	134.872.175.486,59	3.328.707.326,41	2,47
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.556.036.376,00	154.752.017.454,00	(195.981.078,00)	(0,13)
Beban Bunga	9.672.133.257,00	1.363.150.880,00	8.308.982.377,00	609,54
Beban Hibah	77.982.207.574,00	63.420.758.764,00	14.561.448.810,00	22,96
Beban Bantuan Sosial	14.993.271.400,00	34.396.421.400,00	(19.403.150.000,00)	(56,41)
Beban Penyisihan	2.488.291.549,44	9.512.349.245,66	(7.024.057.696,22)	(73,84)
Beban Lain-lain	119.266.039,55	360.671.785,00	(241.405.745,45)	(66,93)
Beban Penyusutan	379.978.840.612,96	246.136.833.565,52	133.842.007.047,44	54,38
Beban Transfer	278.277.055.219,00	244.548.174.415,00	33.728.880.804,00	13,79
Jumlah	3.106.258.633.479,17	2.935.264.912.242,14	170.993.721.237,03	5,83

Rincian lebih lanjut mengenai Beban-LO adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.421.998.581.986,00 dan Rp1.443.483.283.139,00. Dengan demikian Beban Pegawai-LO pada periode tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp21.484.701.153,00 atau minus 1,49 persen dari Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2021. Perbandingan realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:



<i>Beban Pegawai</i>	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	828.771.735.621,00	814.935.205.489,00	13.836.530.132,00	1,70
Beban Tambahan Penghasilan ASN	133.626.872.915,00	129.869.527.482,00	3.757.345.433,00	2,89
Beban Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Objektif	292.337.106.096,00	332.725.146.225,00	(40.388.040.129,00)	(12,14)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.480.505.084,00	33.718.087.792,00	762.417.292,00	2,26
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.157.066.199,00	1.614.483.490,00	542.582.709,00	33,61
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.533.120.000,00	1.293.120.000,00	240.000.000,00	18,56
Beban Pegawai BLUD	129.092.176.071,00	129.350.474.661,00	(258.298.590,00)	(0,20)
Beban Pegawai BOS	0,00	-22.762.000,00	22.762.000,00	(100,00)
	1.421.998.581.986,00	1.443.483.283.139,00	(21.484.701.153,00)	(1,49)

Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp1.421.998.581.986,00 sedangkan Belanja Pegawai-LRA disajikan sebesar Rp1.451.366.997.587,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

<i>Beban Pegawai</i>	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	828.771.735.621,00	829.434.215.767,00	(662.480.146,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	133.626.872.915,00	144.622.323.249,00	(10.995.450.334,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	292.337.106.096,00	269.781.685.539,00	22.555.420.557,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.480.505.084,00	34.480.505.084,00	-
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.157.066.199,00	2.157.066.199,00	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.533.120.000,00	1.533.120.000,00	-
Beban Pegawai BLUD	129.092.176.071,00	169.358.081.749,00	(40.265.905.678,00)
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	-
	1.421.998.581.986,00	1.451.366.997.587,00	(29.368.415.601,00)

Selisih LO-LRA pos Beban-Belanja Pegawai sebesar minus Rp29.368.415.601,00 disebabkan oleh :

- a. Selisih Beban - Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar minus Rp662.480.146,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO TA 2021 dan pengakuan Utang Beban Pegawai TA 2022 dengan jumlah total sebesar minus Rp662.480.146,00.
- b. Selisih Beban - Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar minus Rp10.995.450.334,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO TA 2021 dan pengakuan Utang Beban Pegawai TA 2022 dengan jumlah total sebesar minus Rp10.995.450.334,00.
- c. Selisih Beban - Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar Rp22.555.420.557,00 disebabkan adanya pembayaran Beban-LO TA 2021, pengakuan Utang Beban Pegawai, pengakuan Utang Barang Jasa BLUD, serta reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD ke Beban Persediaan dengan jumlah total sebesar Rp22.555.420.557,00.
- d. Selisih Beban - Belanja Pegawai BLUD sebesar minus Rp40.265.905.678,00 disebabkan adanya pembayaran Beban-LO TA 2021, pengakuan Utang Barang Jasa serta reklasifikasi Beban Barang Jasa ke Beban Persediaan dengan jumlah total sebesar minus Rp40.265.905.678,00.



2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp920.748.985.841,22 dan Rp892.043.269.047,96. Dengan demikian, Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.705.716.793,26 atau 3,22 persen dari Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2021. Rincian realisasi Beban Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Barang	255.550.359.269,71	252.458.157.259,70	3.092.202.010,01	1,22
Beban Jasa	265.170.475.537,50	276.985.222.715,67	(11.814.747.178,17)	(4,27)
Beban Pemeliharaan	27.020.985.260,01	23.246.276.808,00	3.774.708.452,01	16,24
Beban Perjalanan Dinas	76.173.568.482,00	43.919.037.158,00	32.254.531.324,00	73,44
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	4.076.678.103,00	5.810.382.166,00	(1.733.704.063,00)	(29,84)
Beban Barang dan Jasa BOS	138.200.882.813,00	134.872.175.486,59	3.328.707.326,41	2,47
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.556.036.376,00	154.752.017.454,00	(195.981.078,00)	(0,13)
	920.748.985.841,22	892.043.269.047,96	28.705.716.793,26	3,22

Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp920.748.985.841,22 sedangkan Belanja Barang dan Jasa-LRA disajikan sebesar Rp896.365.360.138,00 Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Barang	255.550.359.269,71	90.533.800.961,00	165.016.558.308,71
Beban Jasa	265.170.475.537,50	249.776.923.147,00	15.393.552.390,50
Beban Pemeliharaan	27.020.985.260,01	62.950.659.165,00	(35.929.673.904,99)
Beban Perjalanan Dinas	76.173.568.482,00	76.021.481.148,00	152.087.334,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.076.678.103,00	4.076.678.103,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	138.200.882.813,00	128.728.340.093,00	9.472.542.720,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.556.036.376,00	284.277.477.521,00	(129.721.441.145,00)
	920.748.985.841,22	896.365.360.138,00	24.383.625.703,22

1. **Beban Barang**

Beban Barang-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp255.550.359.269,71 dan Rp252.458.157.259,70. Dengan demikian, Beban Barang-LO pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.092.202.010,01 atau 1,22 persen dari Beban Barang-LO pada periode Tahun 2021. Rincian realisasi Beban Barang-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Beban Barang	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	254.859.671.297,71	254.415.944.011,70	443.727.286,01	0,17
Beban Barang Tak Habis Pakai	690.687.972,00	(1.957.786.752,00)	2.648.474.724,00	(135,28)
	255.550.359.269,71	252.458.157.259,70	3.092.202.010,01	1,22

Beban Barang-LO disajikan sebesar Rp255.550.359.269,71 sedangkan Belanja Barang-LRA disajikan sebesar Rp90.533.800.961,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang adalah sebagai berikut:



<i>Beban Barang</i>	LO	LRA	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Barang Pakai Habis	254.859.671.297,71	90.533.800.961,00	164.325.870.336,71
Beban Barang Tak Habis Pakai	690.687.972,00	-	690.687.972,00
	255.550.359.269,71	90.533.800.961,00	165.016.558.308,71

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA sebesar Rp165.016.558.308,71. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Selisih LO-LRA pada pos Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp164.325.870.336,71 merupakan penyesuaian Persediaan Akhir SKPD dan BLUD, penyesuaian Reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD, penyesuaian Dropping Obat BLUD, penyesuaian BTT dan pengakuan Pendapatan Hibah.

Selisih LO-LRA pada pos Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp690.687.972,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD ke Beban Persediaan pada RSUD Banyumas sebesar Rp319.038.450,00 dan koreksi Aset Tetap dari Belanja Modal TA 2022 yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp371.649.522,00

2. Beban Jasa

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp265.170.475.537,50 dan Rp276.985.222.715,67. Dengan demikian, Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp11.814.747.178,17 atau minus 4,27 persen dari Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2021. Rincian realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

<i>Beban Jasa</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Jasa Kantor	216.089.077.232,00	240.951.844.475,00	(24.862.767.243,00)	(10,32)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.009.360.806,50	22.231.841.199,67	8.777.519.606,83	0,39
Beban Sewa Tanah	82.414.612,00	60.000.000,00	22.414.612,00	0,37
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.651.356.277,00	1.453.734.000,00	2.197.622.277,00	1,51
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	356.734.588,00	1.187.627.000,00	(830.892.412,00)	(0,70)
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	(425.703.575,00)	0,00	(425.703.575,00)	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	215.686.620,00	127.750.000,00	87.936.620,00	0,69
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.952.911.759,00	4.557.829.206,00	1.395.082.553,00	0,31
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.091.204.220,00	1.889.644.710,00	201.559.510,00	0,11
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	182.851.692,00	91.791.518,00	91.060.174,00	0,99
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.639.976.180,00	2.276.585.000,00	1.363.391.180,00	0,60
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.231.350.626,00	2.067.928.709,00	163.421.917,00	0,08
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	93.254.500,00	88.646.898,00	4.607.602,00	0,05
	265.170.475.537,50	276.985.222.715,67	(11.814.747.178,17)	(4,27)

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp265.170.475.537,50 sedangkan Belanja Jasa-LRA disajikan sebesar Rp249.776.923.147,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Jasa adalah sebagai berikut:



Beban Jasa:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Jasa Kantor	216.089.077.232,00	201.419.968.371,00	14.669.108.861,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.009.360.806,50	31.001.875.528,00	7.485.278,50
Beban Sewa Tanah	82.414.612,00	103.600.000,00	(21.185.388,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.651.356.277,00	2.433.395.276,00	1.217.961.001,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	356.734.588,00	269.105.000,00	87.629.588,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-425.703.575,00	0,00	(425.703.575,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	215.686.620,00	215.686.620,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.952.911.759,00	5.952.911.759,00	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.091.204.220,00	2.091.204.220,00	-
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	182.851.692,00	182.551.692,00	300.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	3.639.976.180,00	3.639.976.180,00	-
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.231.350.626,00	2.373.394.001,00	(142.043.375,00)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	93.254.500,00	93.254.500,00	-
	265.170.475.537,50	249.776.923.147,00	15.393.552.390,50

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Penjelasan secara lebih rinci untuk pos-pos Beban LO yang terdapat perbedaan dengan pos Belanja pada LRA adalah sebagai berikut.

- Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Kantor sebesar Rp14.669.108.861,00 merupakan Pengakuan beban TA 2022 yang belum menjadi Belanja - LRA yang meliputi tagihan telepon, langganan air, tagihan listrik, langganan jurnal/surat kabar/majalah, dan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan yang dicatat sebagai Utang Beban TA 2022 dan terdapat pengeluaran Belanja-LRA TA 2022 yang digunakan untuk pembayaran Utang Beban TA 2021 meliputi tagihan langganan telepon, langganan air, langganan daya listrik dan internet;
- Selisih LO-LRA pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp7.485.278,50 merupakan penyesuaian atas Utang Beban Jasa Kantor sebesar Rp279.639,00, Utang Beban Pegawai sebesar Rp42.832,00, Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp7.162.807,50;
- Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Tanah sebesar minus Rp21.185.388,00 merupakan Reklasifikasi Defisit Non Operasional ke Beban alasan Non Modal sebesar Rp21.185.388,00.
- Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.217.961.001,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Bencana Alam sebesar Rp1.167.845.000,00, realisasi BTT Covid-19 sebesar Rp22.626.000,00 yang digunakan untuk sewa peralatan dan mesin, serta penyesuaian Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp27.490.001,00, sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sewa Peralatan dan Mesin;
- Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp137.000.000,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19 sebesar Rp43.000.000,00 yang digunakan untuk Sewa Hotel dan Extrabed untuk Karantina dan Penanganan Bencana Alam sebesar Rp94.000.000,00 yang



digunakan untuk Sewa Rumah Korban Bencana sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sewa Gedung dan Bangunan serta Reklasifikasi Defisit Non Operasional ke Beban alasan Non Modal sebesar minus Rp49.370.412,00.

- f) Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar minus Rp425.703.575,00 merupakan Reklasifikasi Defisit Non Operasional ke Beban alasan Non Modal.
- g) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Ketersediaan Layanan sebesar Rp300.000,00 terjadi karena adanya Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah 2022 sebesar Rp300.000,00 pada Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
- h) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar minus Rp142.043.375,00 terjadi karena adanya penyelesaian Utang Beban Jasa Kantor Tahun 2021 sebesar minus Rp291.076.900,00 dan penyesuaian Utang Beban Jasa Kantor Tahun 2022 sebesar Rp149.033.525,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

3. Beban Pemeliharaan
- Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp27.020.985.260,01 dan Rp23.246.276.808,00. Dengan demikian, Beban Pemeliharaan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp3.774.708.452,01 atau 16,24 persen dari Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2021.
- Rincian realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	676.739.000,00	115.181.500,00	561.557.500,00	487,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.382.806.788,00	9.158.997.878,00	1.223.808.910,00	13,36
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.887.794.475,01	6.142.079.930,00	(254.285.454,99)	(4,14)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.031.844.997,00	7.527.817.500,00	2.504.027.497,00	33,26
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41.800.000,00	302.200.000,00	(260.400.000,00)	(86,17)
	27.020.985.260,01	23.246.276.808,00	3.774.708.452,01	16,24

Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp27.020.985.260,01 sedangkan Belanja Pemeliharaan-LRA disajikan sebesar Rp62.950.659.165,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Pemeliharaan Tanah	676.739.000,00	676.739.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.382.806.788,00	10.694.758.121,00	(311.951.333,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.887.794.475,01	16.498.347.804,00	(10.610.553.328,99)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.031.844.997,00	35.039.014.240,00	(25.007.169.243,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41.800.000,00	41.800.000,00	-
	27.020.985.260,01	62.950.659.165,00	(35.929.673.904,99)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Pemeliharaan sebesar Rp35.929.673.904,99 merupakan:

- a) Realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Belanja Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Tempat Karantina Terpusat sehingga sesuai



substansinya pada LO diakui sebagai Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.205.000,00;

- b) Realisasi BTT Penanganan Bencana Alam yang digunakan untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan sebesar Rp34.463.185,00;
- c) Adanya Belanja Non Modal Pemeliharaan sebesar Rp35.629.927.571,99, sehingga sesuai substansinya diakui sebagai Beban Pemeliharaan-LO.

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp76.173.568.482,00 dan Rp43.919.037.158,00. Dengan demikian Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.254.531.324,00 atau 73,44 persen dari Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2021. Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.795.722.388,00	43.919.037.158,00	31.876.685.230,00	72,58
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	377.846.094,00	-	377.846.094,00	100,00
	76.173.568.482,00	43.919.037.158,00	32.254.531.324,00	73,44

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp76.173.568.482,00 dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA disajikan sebesar Rp76.021.481.148,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.795.722.388,00	75.643.635.054,00	152.087.334,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	377.846.094,00	377.846.094,00	-
	76.173.568.482,00	76.021.481.148,00	152.087.334,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Selisih LO-LRA pos Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp152.087.334,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19, Bencana Alam dan Inflasi yang digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Perjalanan Dinas, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Penyesuaian BTT Bencana Alam 2022	
BPBD	Rp89.190.862,00
b. Penyesuaian BTT Covid 2022	
BPBD	Rp30.903.472,00
Dinas Perhubungan	Rp19.004.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp6.398.500,00
c. Penyesuaian BTT Inflasi 2022	
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp6.590.000,00
Total	Rp152.087.334,00



5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp4.076.678.103,00 dan Rp5.810.382.166,00. Dengan demikian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.733.704.063,00 atau 29,84 persen dari Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2021.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.877.890.600,00	5.767.075.000,00	(1.889.184.400,00)	(32,76)
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	198.787.503,00	43.307.166,00	155.480.337,00	359,02
	4.076.678.103,00	5.810.382.166,00	(1.733.704.063,00)	(29,84)

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp4.076.678.103,00 dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO disajikan sebesar Rp5.810.382.166,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.877.890.600,00	3.877.890.600,00	-
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	198.787.503,00	198.787.503,00	-
	4.076.678.103,00	4.076.678.103,00	-

6. Beban Barang dan Jasa BOS
Beban Barang dan Jasa BOS-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp138.200.882.813,00 dan Rp134.872.175.486,59. Dengan demikian Beban Barang dan Jasa BOS-LO pada periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.328.707.326,41 atau 2,47 persen dari Beban Barang dan Jasa BOS -LO pada periode Tahun 2021.

Beban Barang dan Jasa BOS	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOS	138.200.882.813,00	134.872.175.486,59	3.328.707.326,41	2,47
	138.200.882.813,00	134.872.175.486,59	3.328.707.326,41	2,47

Beban Barang dan Jasa BOS-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp138.200.882.813,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA disajikan sebesar Rp128.728.340.093,00. Perbandingan LO-LRAnya adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa BOS	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Barang dan Jasa BOS	138.200.882.813,00	128.728.340.093,00	9.472.542.720,00
	138.200.882.813,00	128.728.340.093,00	9.472.542.720,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan adanya Koreksi Penambahan Aset yang berasal



dari BOS sebesar Rp10.631.718.539,00 dan Koreksi Penambahan Belanja Non Modal BOS sebesar minus Rp1.159.175.819,00 pada Dinas Pendidikan.

7. **Beban Barang dan Jasa BLUD**
Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp154.556.036.376,00 dan Rp154.752.017.454,00. Dengan demikian Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp195.981.078,00 atau minus 0,13 persen dari Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2021.

<i>Beban Barang dan Jasa BLUD</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.556.036.376,00	154.752.017.454,00	(195.981.078,00)	(0,13)
	154.556.036.376,00	154.752.017.454,00	(195.981.078,00)	(0,13)

Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp154.556.036.376,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA disajikan sebesar Rp284.277.477.521,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang dan Jasa BLUD adalah sebagai berikut:

<i>Beban Barang dan Jasa BLUD</i>	Realisasi (Rp)		Selisih (LO-LRA)
	LO	LRA	
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.556.036.376,00	284.277.477.521,00	(129.721.441.145,00)
	154.556.036.376,00	284.277.477.521,00	(129.721.441.145,00)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar minus Rp129.721.441.145,00 terjadi karena adanya koreksi Belanja Non Modal BLUD, penyesuaian Utang Beban Jasa Pelayanan, penyesuaian Utang Beban Barang Jasa dan reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD ke Beban Persediaan.

3. **Beban Bunga**

Beban Bunga-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp9.672.133.257,00 dan Rp1.363.150.880,00. Dengan demikian, Beban Bunga-LO mengalami kenaikan sebesar Rp8.308.982.377,00 atau 609,54 persen dari Beban Bunga-LO pada periode Tahun 2021. Rincian realisasi Beban Bunga Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

<i>Beban Bunga</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.672.133.257,00	1.363.150.880,00	8.308.982.377,00	609,54
	9.672.133.257,00	1.363.150.880,00	8.308.982.377,00	609,54

Beban Bunga pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp9.672.133.257,00 dan Belanja Bunga disajikan sebesar Rp9.322.835.019,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Bunga adalah sebagai berikut:

<i>Beban Bunga</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
	9.672.133.257,00	9.322.835.019,00	349.298.238,00
Beban Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.672.133.257,00	9.322.835.019,00	349.298.238,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Bunga sebesar Rp349.298.238,00 merupakan Koreksi untuk



mencatat Utang Belanja Bunga PEN yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai KMK No 5/KMK.07/2022 sebesar Rp349.298.238,00.

4. Beban Hibah

Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp77.982.207.574,00 dan Rp63.420.758.764,00. Beban Hibah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp14.561.448.810,00 atau 22,96 persen jika dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2021. Rincian realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah	1.875.565.500,00	1.127.433.600,00	748.131.900,00	66,36
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	73.194.227.074,00	59.380.910.164,00	13.813.316.910,00	23,26
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	-	-
	77.982.207.574,00	63.420.758.764,00	14.561.448.810,00	22,96

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022 dengan mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang hanya berlaku sampai tanggal 7 Februari 2022.

Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022 dengan mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang hanya berlaku sampai tanggal 7 Februari 2022. Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp77.982.207.574,00 dan Belanja Hibah-LRA disajikan sebesar Rp78.073.991.484,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Beban Hibah	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.875.565.500,00	1.875.565.500	-
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	73.194.227.074,00	73.286.010.984,00	(91.783.910,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	-
	77.982.207.574,00	78.073.991.484,00	(91.783.910,00)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan adanya Penambahan Aset dari BOP pada Dinas Pendidikan



berupa Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp79.633.910,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp12.150.000,00.

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp14.993.271.400,00 dan Rp34.396.421.400,00. Beban Bantuan Sosial TA 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp19.403.150.000,00 atau minus 56,41 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2021.

Perbandingan realisasi Beban Bantuan Sosial periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Beban Bantuan Sosial</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	7.013.271.400,00	16.594.388.900,00	(9.581.117.500,00)	(57,74)
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.980.000.000,00	17.795.800.000,00	(9.815.800.000,00)	(55,16)
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	6.232.500,00	(6.232.500,00)	(100,00)
	14.993.271.400,00	34.396.421.400,00	(19.403.150.000,00)	(56,41)

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp14.993.271.400,00 dan Belanja Bantuan Sosial-LRA disajikan sebesar Rp9.044.271,00. Selisih LO-LRA sebesar Rp5.949.000,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

<i>Beban Bantuan Sosial</i>	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	7.013.271.400,00	5.579.271.400,00	1.434.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	7.980.000.000,00	3.465.000.000,00	4.515.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-
	14.993.271.400,00	9.044.271.400,00	5.949.000.000,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan adanya Realisasi BTT Penanganan Inflasi pada Dinsospermedes kepada individu sebesar Rp1.434.000.000,00 serta Realisasi BTT pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.515.000.000,00 untuk Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH).



6. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp379.978.840.612,96 dan Rp246.136.833.565,52.

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan Aset Tetap. Perhitungan beban penyusutan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis Aset Tetap.
2. Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan Aset Tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3. Untuk Aset Tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan tahunan dimulai pada tahun pertama perolehan.

Perbandingan Beban Penyusutan periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	Beban Penyusutan (Rp)	
	Tahun 2022	Tahun 2021
Penyusutan Aset Tetap		
Penyusutan Peralatan dan Mesin	122.356.798.682,00	101.902.367.900,00
Penyusutan Gedung dan Bangunan	68.194.227.668,00	37.838.384.471,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.370.105.617,96	103.753.135.428,52
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.259.275.583,00	1.153.558.918,00
	378.180.407.550,96	244.647.446.717,52
Penyusutan Aset Lainnya		
Penyusutan Aset Lainnya	1.548.091.638	1.394.846.986
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	250.341.424	94.539.862
	1.798.433.062	1.489.386.848
JUMLAH	379.978.840.612,96	246.136.833.565,52

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp2.488.291.549,44 dan Rp9.512.349.245,66. Beban Penyisihan Piutang-LO pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp7.024.057.696,22 atau minus 73,84 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang-LO pada periode Tahun 2021.

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.433.062.573,34	6.220.405.494,76	(4.787.342.921,42)	-76,96
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	195.456.470,35	110.464.040,00	84.992.430,35	76,94
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	859.772.505,75	3.181.479.710,90	(2.321.707.205,15)	-72,98
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	0,00
Jumlah	2.488.291.549,44	9.512.349.245,66	(7.024.057.696,22)	(73,84)



8. **Beban Transfer**

Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp278.277.055.219,00 dan Rp244.548.174.415,00. Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.728.880.804,00 atau 13,79 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2021.

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Rincian dan perbandingan Beban Transfer TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut:

<i>Beban Transfer</i>	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	29.582.380.341,00	20.916.759.399,00	8.665.620.942,00	41,43
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa	2.450.257.878,00	2.589.057.551,00	(138.799.673,00)	(5,36)
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	246.244.417.000,00	221.042.357.465,00	25.202.059.535,00	11,40
	278.277.055.219,00	244.548.174.415,00	33.728.880.804,00	13,79

9. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp119.266.039,55 dan Rp360.671.785,00. Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp241.405.745,45 atau minus 66,93 persen jika dibandingkan dengan Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2021.

Rincian Beban Lain-lain-LO pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Beban Lain-lain</i>	Beban Lain-lain (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	%
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	
Beban Penyisihan Dana Bergulir	119.266.039,55	360.671.785,00	(241.405.745,45)	(66,93)
Jumlah	119.266.039,55	360.671.785,00	(241.405.745,45)	(66,93)

C. **SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL**

Surplus Non Operasional pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp126.038.101.285,00 dan Rp84.580.205,00. Surplus Non Operasional periode Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp125.953.521.080,00 atau 148.916,07 persen dari periode Tahun 2021. Surplus Non Operasional disajikan dalam tabel berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	126.038.101.285,00	84.580.205,00	125.953.521.080,00	148.916,07

Rincian Surplus Non Operasional sebesar Rp126.038.101.285,00 adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp) Tahun 2022
Koreksi Penambahan Aset dari Penilaian	135.820.497.000,00
Penyerahan dan Penilaian Aset Kemitraan	(9.782.395.715,00)
	126.038.101.285,00



Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing disajikan sebesar minus Rp2.518.041.674,00 dan Rp32.847.854.826,00. Dengan demikian, Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp35.365.896.500,00 atau minus 107,67 persen dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2021. Rincian dan perbandingan Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Defisit Non Operasional	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Defisit				
Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(2.518.041.674,00)	32.847.854.826,00	(35.365.896.500,00)	(107,67)
	(2.518.041.674,00)	32.847.854.826,00	(35.365.896.500,00)	(107,67)

Rincian Defisit non operasional sebesar minus Rp2.518.041.674,00 adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp) Tahun 2022
Jurnal Penghapusan Aset Lainnya	11.363.637,00
AJ- Jurnal Penyusutan Penghapusan AL	(728.181.877,00)
AJ Koreksi-Penambahan Belanja Modal	332.153.466,00
AJ Koreksi-Penambahan Belanja Modal BLUD	60.226.083,00
AJ Koreksi-Penambahan Belanja Non Modal	(37.054.646.088,99)
AJ Koreksi-Pengurangan Penghapusan Aset Tetap	7.603.163.560,00
JP Audit Reklas Defisit Operasional ke Beban Barang dari belanja Modal	(392.379.549,00)
Jurnal Penghapusan Aset Lainnya	875.938.555,00
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Antar Jenis Berkurang	(68.967.666,00)
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Antar Jenis Berkurang (Audited)	-
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Antar Jenis Bertambah	1.164.270.191,00
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Antar Jenis Bertambah (Audited)	-
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Pecah/Gabung Berkurang	(9.172.654.394,00)
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Pecah/Gabung Berkurang (Audit	(10.957.094.128,00)
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Pecah/Gabung Bertambah (Kore	8.366.521.376,00
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Mutasi Pecah/Gabung Bertambah (Kore	6.400.768.607,00
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Penghapusan	(5.135.402.261,00)
Jurnal Reklas Defisit Non operasional ke Beban alasan Non Modal	36.472.601.464,99
Penambahan Aset Belanja Non Modal BOS	6.000.000,00
Penambahan Belanja Non Modal	(278.121.526,00)
Penyesuaian amortisasi ATB karena penghapusan ATB	(23.601.124,00)
	(2.518.041.674,00)



BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp99.104.463,00 dan Rp8.643.090.589,00. Dengan demikian, Beban Tak Terduga pada periode Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.543.986.126,00 atau 98,85 persen dari Beban Tak Terduga pada periode Tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang sudah menurun. Rincian dan perbandingan Beban Tak Terduga TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Beban Tak Terduga	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	(Rp)	%
Beban Tak Terduga	99.104.463,00	8.643.090.589,00	(8.543.986.126,00)	(98,85)
		8.643.090.589,00	(8.543.986.126,00)	(98,85)

Beban Tak Terduga merupakan beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Tak Terduga Lainnya-LO pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp99.104.463,00 sedangkan Belanja Tak Terduga-LRA pada periode Tahun 2022 disajikan sebesar Rp28.163.884.848,00. Perbandingan Beban Tak Terduga-LO dengan Belanja Tak Terduga-LRA TA 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Tak Terduga	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Tak Terduga Lainnya	99.104.463,00	28.163.884.848,00	(28.064.780.385,00)
	99.104.463,00	28.163.884.848,00	(28.064.780.385,00)

Selisih Beban Tak Terduga dengan Belanja Tak Terduga-LRA sebesar Rp28.064.780.385,00 adalah sebagai berikut:

- Realisasi BTT untuk penanganan pandemi COVID-19, Bencana Alam, dan penanganan inflasi yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp48.750.000,00 berupa Peralatan dan Mesin;
- Realisasi BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam, pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi untuk Beban-beban sesuai substansi penggunaan BTT tersebut sebesar Rp28.016.030.385,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp16.027.019.816,00 yang digunakan untuk membeli barang pakai habis untuk penanganan COVID-19 dan bencana seperti *handsanitizer*, masker, *faceshield*, bahan kebutuhan karantina dan pemakaman, Makan pasien positif dan petugas vaksin, tanggap darurat dan pengadaan sembako;
 - Beban Jasa Kantor sebesar Rp4.513.784.050,00 yang diantaranya digunakan untuk membayar jasa petugas posko, tim Satgas COVID-19, jasa penguburan, jasa tenaga vaksinator dan perawat pasien penderita COVID-19, jasa tenaga keamanan dan jasa tanggap darurat.
 - Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.150.471.000,00 digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan operasional dalam rangka penanganan COVID-19.
 - Beban Sewa Bangunan dan Gedung sebesar Rp137.000.000,00 digunakan untuk membayar sewa hotel untuk karantina penderita COVID-19, sewa alat berat dan sewa rumah korban bencana.



- 5) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp86.668.185,00 digunakan untuk pemeliharaan tempat karantina terpusat dan pemeliharaan peralatan penanganan bencana.
- 6) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp152.087.334,00 digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, posko COVID-19 dan penanganan bencana.
- 7) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp5.949.000.000,00 digunakan untuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang disalurkan oleh Dinperkim dan pemberian bansos tunai/BLT yang disalurkan oleh Dinsospermades.

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2022 ini mengikuti SAP Tahun 2010. Sesuai dengan Pernyataan SAP 03 Laporan Arus Kas, arus kas yang disajikan pada LAK adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Dalam hal ini, penerimaan pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang sudah diakui sebagai Pendapatan-LRA tidak disajikan sebagai arus kas masuk pada LAK. Dengan demikian, terdapat selisih pada beberapa pos LRA dengan pos dengan LAK.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh BKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah, Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD, Kas pada BLUD, serta kas lainnya yang atas penerimaan dan pengeluaran dilakukan pengesahan oleh BUD.

Transaksi Kas Daerah pada BKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Transaksi kas pada kas BLUD menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Pengesahan Pembukuan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ini diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

Transaksi kas Dana BOS menggunakan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Satuan Pendidikan dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Transaksi kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD menggunakan informasi pemotongan dan penyeteroran pajak oleh Bendahara Pengeluaran SKPD selaku wajib potong/pungut pajak-pajak atas pembayaran yang menjadi beban APBD.



Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	303.165.862.331,84	488.360.825.796,00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(527.353.217.863,00)	(479.741.606.229,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	116.794.431.030,00	67.076.601.620,00
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	110.412.610,00	75.760.584,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(107.282.511.891,16)	75.771.581.771,00
Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran	370.385.521.337,00	294.613.939.566,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran	263.103.009.445,84	370.385.521.337,00
Saldo pada Bendahara Penerimaan	7.166.954,00	4.996.932,00
Saldo Kas Lainnya	46.357.432,00	444.098.358,00
Jumlah Kas	263.156.533.831,84	370.834.616.627,00

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Arus Masuk Kas	3.424.977.163.906,84	3.487.009.865.720,00
2. Arus Keluar Kas	3.121.811.301.575,00	2.998.649.039.924,00
Arus Kas Bersih	303.165.862.331,84	488.360.825.796,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	267.233.894.355,00	222.544.965.148,00
Pendapatan Retribusi Daerah	26.130.786.681,00	23.698.321.273,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.801.615.649,00	15.507.581.925,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	506.088.677.699,84	499.527.537.137,00
Dana Bagi Hasil Pajak	51.280.979.747,00	56.584.800.161,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	3.574.498.957,00	2.506.021.548,00
Dana Alokasi Umum	1.280.141.707.164,00	1.289.633.614.000,00
Dana Alokasi Khusus	577.729.669.669,00	533.105.229.215,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	30.603.775.000,00	19.361.734.000,00
Dana Desa	371.196.905.880,00	381.247.099.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	253.570.782.196,00	233.070.254.488,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	21.599.433.339,00	20.129.335.915,00
Pendapatan Hibah	14.024.437.570,00	30.775.169.520,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	159.318.202.390,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.424.977.163.906,84	3.487.009.865.720,00



Jika dibandingkan dengan LRA, terdapat pos pada arus masuk kas dari aktivitas operasi yang berbeda dengan pos pada LRA. Pos yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Arus masuk kas dari pendapatan Pajak pada LAK sebesar Rp267.233.894.345,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp267.236.064.377,00 atau terdapat selisih sebesar minus Rp2.170.032,00. Selisih tersebut terdiri atas:
 - 1) Penerimaan pada LAK TA 2022 sebesar Rp4.996.932,00 yang tidak diakui dalam LRA TA 2022. Penerimaan tersebut berasal dari setoran Pajak ke Kas Daerah pada TA 2022 yang telah diakui sebagai LRA TA 2021. Jumlah tersebut telah disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.
 - 2) Pendapatan pada LRA TA 2022 yang tidak diakui dalam LAK TA 2022 sebesar Rp7.166.954,00. Pendapatan pada LRA tersebut merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima di Bendahara Penerimaan pada TA 2022 namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022.
- b. Arus masuk kas dari lain-lain PAD yang Sah pada LAK sebesar Rp506.088.677.699,64 sedangkan pada LRA sebesar Rp507.517.525.434,84 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp1.428.847.735,00. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan atas Kekayaan Daerah pada LRA berupa penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya Pada LAK pendapatan tersebut tidak disajikan dalam pos arus masuk kas operasi, namun disajikan pada pos arus masuk kas dari investasi.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.451.366.997.587,00	1.398.098.601.191,00
Belanja Barang dan Jasa	896.365.360.138,00	822.140.656.636,00
Bunga	9.322.835.019,00	570.163.094,00
Belanja Hibah	78.073.991.484,00	63.420.758.764,00
Belanja Bantuan Sosial	9.044.271.400,00	10.865.621.400,00
Belanja Bantuan Keuangan	617.441.322.880,00	602.289.456.465,00
Belanja Tidak Terduga	28.163.884.848,00	77.757.965.424,00
Bagi Hasil Pajak	29.582.380.341,00	20.916.759.399,00
Bagi Hasil Retribusi	2.450.257.878,00	2.589.057.551,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.121.811.301.575,00	2.998.649.039.924,00

B. Arus Kas dari Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.428.847.735,00	742.640.000,00
Arus Keluar Kas	528.782.065.598,00	480.484.246.229,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(527.353.217.863,00)	(479.741.606.229,00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk sebesar Rp1.428.847.735,00 berasal dari penerimaan yang bersumber dari penjualan Aset Tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Aset Tetap yang terdiri atas:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	20.000.000.000
Perolehan Tanah	2.307.762.514,00	12.781.710.449,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	122.539.063.761,00	108.280.757.683,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	222.410.863.132,00	203.318.241.966,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.808.411.347,00	100.697.645.954,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.281.964.844,00	7.156.890.177,00
Perolehan Aset Lainnya	1.688.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.746.000.000,00	28.249.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	528.782.065.598,00	480.484.246.229,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp528.782.065.598,00 ekuivalen dengan Belanja Modal pada LRA sebesar Rp479.036.065.598,00; Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp24.746.000.000,00.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih sebesar Rp116.794.431.030,00 terdiri atas :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	116.794.431.030,00	68.575.601.620,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	116.794.431.030,00	68.575.601.620,00
Arus Keluar Kas	-	1.499.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.499.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	116.794.431.030,00	67.076.601.620,00



D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya.

Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada Kas Daerah yang dikelola oleh BKAD selaku PPKD dan Bendahara Pengeluaran (BLUD, Dana BOS, dan Bendahara Pengeluaran SKPD).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	147.052.176.598,00	144.961.319.406,00
2 Arus Keluar Kas	146.941.763.988,00	144.885.558.822,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	110.412.610,00	75.760.584,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

<i>Arus Kas Masuk</i>	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Penerimaan PFK BUD		
Penerimaan Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.044.896.902,00	41.286.912.527,00
Penerimaan Potongan IWP	55.956.665.671,00	56.785.027.640,00
Penerimaan Potongan Taperum	-	-
Penerimaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.284.071.441,00	1.264.428.837,00
Penerimaan Jaminan Kematian	3.851.979.300,00	3.790.827.348,00
Titipan Jaminan Kesungguhan	863.415,00	1.220.510,00
Penerimaan PFK lainnya	37.372.000,00	-
	102.175.848.729,00	103.128.416.862,00
2. Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran		
Penerimaan Non Transitoris BLUD	33.623.671.364,00	32.285.055.496,00
Penerimaan Non Transitoris dana BOS	3.591.413.027,00	4.106.966.229,00
Penerimaan Potongan Pajak dan PFK lainnya pada Bendahara Pengeluaran SKPD	7.661.243.478,00	5.440.880.819,00
	44.876.327.869,00	41.832.902.544,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	147.052.176.598,00	144.961.319.406,00

Penerimaan PFK pada BUD berupa Potongan Iuran Jaminan Kesehatan, IWP, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kesungguhan merupakan penerimaan PFK atas Pembayaran gaji dan Tunjangan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga penerima yakni BPJS (Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Iuran Jaminan Kematian) dan PT Taspen (Iuran Wajib Pegawai).

Penerimaan Titipan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp863.415,00 merupakan bunga atas deposito Jaminan Kesungguhan yang akan diperhitungkan sebagai hak pemegang deposito. Penerimaan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan reklamasi yang selanjutnya ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas.



Penerimaan PFK Lainnya sebesar Rp37.372.000,00 merupakan penerimaan pada Kas Daerah berupa pengembalian kembali belanja hibah BOP PAUD Kesetaraan yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Penerimaan PFK pada BLUD sebesar Rp33.623.673.364,00 dan Dana BOS sebesar Rp3.591.413.027,00 merupakan penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas BLUD dan Dana BOS.

Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp7.661.243.478,00 adalah penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.658.279.494,00 dan penerimaan SP2D LS atas pembayaran yang sampai dengan akhir tahun belum dibayarkan kepada penerima sebesar Rp2.963.984,00.

2. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

<i>Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris</i>	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Penyetoran PFK BUD		
Penyetoran Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.044.896.902,00	41.286.912.527,00
Penyetoran Potongan IWP	55.956.665.671,00	56.785.027.640,00
Penyetoran Potongan Taperum	-	1.007.000,00
Penyetoran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.284.071.441,00	1.264.428.837,00
Penyetoran Jaminan Kematian	3.851.979.300,00	3.790.827.348,00
Titipan Jaminan Kesungguhan		
	<u>102.137.613.314,00</u>	<u>103.128.203.352,00</u>
2. Penyetoran PFK pada Bendahara Pengeluaran		
Penyetoran Non Transitoris BLUD	33.596.237.260,00	32.285.055.496,00
Penyetoran Non Transitoris dana BOS	3.475.945.888,00	4.106.968.229,00
Penyetoran PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD	7.731.967.526,00	5.365.331.745,00
	<u>44.804.150.674,00</u>	<u>41.757.355.470,00</u>
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>146.941.763.988,00</u>	<u>144.885.558.822,00</u>

Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada BUD dengan jumlah sebesar Rp102.137.613.314,00 merupakan penyetoran ke Kas Negara pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa serta potongan iuran asuransi kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.

Pengeluaran Transitoris pada BLUD sebesar Rp33.596.237.260,00 dan Dana BOS sebesar Rp3.475.945.888,00 merupakan penyetoran potongan pajak atas pembayaran melalui Kas BLUD dan Dana BOS.

Penyetoran PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp7.731.967.526,00 adalah penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.658.154.356,00 dan pengeluaran dana pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD atas penerimaan pembayaran honorarium tahun 2021 yang baru dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp73.813.170,00.



E. Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara	370.385.521.337,00	294.613.939.566,00
Pengeluaran		
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(107.282.511.891,16)	75.771.581.771,00
Saldo Akhir Kas Daerah	263.103.009.445,84	370.385.521.337,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.166.954,00	4.996.932,00
Kas Lainnya	46.357.432,00	444.098.358,00
Saldo Akhir Kas	263.156.533.831,84	370.834.616.627,00

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022:

1. Saldo SAL pada LPSAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00. Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA TA 2022.
2. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp263.156.533.831,84 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL sebesar 262.505.937.756,84 sehingga terdapat selisih sebesar Rp650.596.075,00. Selisih tersebut adalah kas yang bukan bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rp)
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2022	263.156.533.831,84
SILPA di LRA dan SAL di LPSAL	262.505.937.756,84
<i>Selisih</i>	<u>650.596.075,00</u>
Kas yang bukan bagian SILPA:	
Kas di Kas Daerah BUD	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	210.486.065,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.813.912,00
Kas BLUD	
Uang muka jaminan pasien RSUD Banyumas dan PFK pada BLUD Pariwisata	246.953.615,00
Kas Dana BOS	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	140.985.051,00
Kas Lainnya - Bunga Rekening Dana Bergulir	46.357.432,00
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA	<u>650.596.075,00</u>

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.143.059.947.097,90 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.032.262.399.237,04 ditambah Surplus-LO sebesar Rp186.736.411.100,63 dikurangi koreksi ekuitas TA 2022 sebesar Rp75.938.863.239,77.

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp7.032.262.399.237,04 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2021.



B. Surplus/(Defisit) – LO TA 2022

Surplus–LO TA 2022 sebesar Rp186.736.411.100,63 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2022. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

C. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas sebesar minus Rp75.938.863.239,77 merupakan koreksi ekuitas selama tahun 2022. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas koreksi ekuitas yang menambah dan koreksi ekuitas yang mengurangi saldo awal ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi yang Menambah Ekuitas Awal		Nilai (Rp)
1	Penambahan Koreksi BMD	6.720.863.035,00
2	Penambahan Aset dari Penilaian	4.005.725.000,00
3	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Kemitraan	3.842.000.000,00
4	Reklas Pendapatan ke Koreksi Ekuitas karena AJ Koreksi-Penambahan Reklasifikasi dari Ekstrakomptable	877.481.100,00
5	Koreksi Penambahan Aset Lainnya	156.043.351,00
6	Penambahan Koreksi BMD	125.653.118,00
5	JP Audit Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (EX Bengkok)	80.621.709,00
6	Reklasifikasi dari Ekstrakomptable /Belanja Jasa Konsultan yang belum dikanitalisasi tahun 2020	9.500.000,00
5	Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Piutang	400.000,00
6	jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	101.606,25
Jumlah		15.818.388.919,25
Koreksi yang mengurangi ekuitas awal		
1	Jurnal Pencatatan Selisih Klaim (Piutang tahun lalu yang tidak dapat diklaim)	2.032.125,00
2	Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada Bank Jateng atas Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2011)	34.551.481,00
3	Pengurangan Koreksi BMD	125.653.118,00
4	Jurnal Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	539.568.160,00
5	JP Audit Koreksi Ekuitas BIJ	973.848.537,09
6	Pengurangan Koreksi Ekuitas Aset Tetap	6.178.099.955,00
7	Pengurangan Koreksi BMD	6.720.863.035,00
8	Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Koreksi Saldo Awal (Audited)	77.182.635.747,93
Jumlah		91.757.252.159,02
Jumlah Koreksi Ekuitas		(75.938.863.239,77)

Penjelasan atas koreksi ekuitas dan pos-pos laporan keuangan yang terkait adalah sebagai berikut:



Alasan Koreksi	Nama SKPD	Nama Akunt Pasanangan Koreksi Ekuitas	Nilai (Rp)
4. Jurnal Pencatatan Selisih Klaim (Piutang tahun lalu yang tidak dapat diklaim)	Puskesmas Patikraja	Piutang Pendapatan BLUD	65.000,00
	Puskesmas Tambak I	Piutang Pendapatan BLUD	1.255.675,00
	Puskesmas Wangon II	Piutang Pendapatan BLUD	711.450,00
5. Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Piutang	Puskesmas Tambak I	Piutang Pendapatan BLUD	-400.000,00
6. Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	Puskesmas Karanglewas	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
	Puskesmas Patikraja	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-3.250,00
	Puskesmas Tambak I	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-62.783,75
	Puskesmas Wangon II	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-35.572,50
AJ- Jurnal Koreksi Kurang	Dinas Perikanan dan Peternakan	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	-57.550.551,00
	Puskesmas Banyumas	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	-98.492.800,00
AJ Koreksi-Penambahan Aset dari Penilaian	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	-4.005.725.000,00
AJ Koreksi-Penambahan Koreksi BMD	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	-125.653.118,00
AJ Koreksi-Pengurangan Koreksi BMD	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	125.653.118,00
AJ Koreksi-Pengurangan Koreksi Ekuitas	Balai Kesehatan Paru Masyarakat	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	10.000.000,00
	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	212.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah yang Belum Diregister	4.966.465.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.796.000,00
	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	100.000.000,00
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister	67.508.500,00
	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	11.000.000,00
	Puskesmas Ajibarang I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	16.000.000,00
	Puskesmas Ajibarang II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	4.000.000,00
	Puskesmas Banyumas	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	63.000.000,00
		Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	19.000.000,00
		Tanah yang Belum Diregister	124.300.000,00
	Puskesmas Baturraden II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	11.000.000,00
	Puskesmas Cilongok I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	8.000.000,00
	Puskesmas Cilongok II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	16.700.000,00
	Puskesmas Gumelar	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	8.500.000,00
	Puskesmas Jatilawang	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	9.000.000,00
	Puskesmas Kebasen	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	22.000.000,00
	Puskesmas Kedungbanteng	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	11.000.000,00
	Puskesmas Kembaran I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	6.000.000,00
	Puskesmas Kemranjen I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	12.500.000,00
	Puskesmas Kemranjen II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	15.000.000,00
	Puskesmas Lumbir	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	12.500.000,00
	Puskesmas Patikraja	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	10.000.000,00
	Puskesmas Pekuncen I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	13.000.000,00
	Puskesmas Purwojati	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	17.000.000,00
	Puskesmas Purwokerto Barat	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	20.000.000,00
	Puskesmas Purwokerto Selatan	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	20.300.000,00
	Puskesmas Purwokerto Timur I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	22.000.000,00
	Puskesmas Purwokerto Timur II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	22.500.000,00
	Puskesmas Purwokerto Utara I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	17.000.000,00
	Puskesmas Purwokerto Utara II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	15.500.000,00
	Puskesmas Rawalo	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	6.000.000,00
	Puskesmas Sokaraja I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	12.000.000,00
	Puskesmas Sokaraja II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	10.000.000,00
	Puskesmas Somagede	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	8.000.000,00
	Puskesmas Sumbang I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	8.000.000,00
	Puskesmas Sumbang II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	14.000.000,00
	Puskesmas Sumpiuh I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	10.000.000,00
	Puskesmas Sumpiuh II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	11.000.000,00
	Puskesmas Tambak I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	12.000.000,00
	Puskesmas Tambak II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	8.685.000,00
	Puskesmas Wangon I	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	19.300.000,00
	Puskesmas Wangon II	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	25.500.000,00
	Rumah Sakit Mata Purwokerto	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	10.000.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	84.045.455,00
JP Audit Koreksi Ekuitas BIJ	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	595.790.297,94
		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	378.058.239,15
JP Audit Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (EX Bengkulu)	Kecamatan Purwokerto Barat	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	-45.366.634,00
	Kecamatan Purwokerto Timur	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	-35.255.075,00
Jurnal Koreksi Ekuitas	Dinas Perikanan dan Peternakan	Aset Lainnya Belum Diregister	413.568.160,00
	Puskesmas Banyumas	Aset Lainnya Belum Diregister	126.000.000,00



Alasan Koreksi	Nama SKPD	Nama Akunt Pasanangan Koreksi Ekuitas	Nilai (Rp)
Jurnal Penyesuaian Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada Bank Jateng atas Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2011)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dana Bergulir kepada Masyarakat	34.551.481,00
Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Kemitraan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-3.842.000.000,00
Jurnal Penyusutan Aset Tetap - Koreksi Saldo Awal (Audited)	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.450.156,00
	Dinas Pekerjaan Umum	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.143.048.398,93
	Dinas Pendidikan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.512,00
	Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.678.552,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.200.000,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.917.165.827,00
	Kecamatan Purwokerto Timur	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	624.142,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.417.160,00
Penambahan Koreksi BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister	-6.564.263.035,00
		Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	-156.600.000,00
Pengurangan Koreksi BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister	6.564.263.035,00
		Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	156.600.000,00
Reklas Pendapatan ke Koreksi Ekuitas karena AJ Koreksi-Penambahan Reklasifikasi dari Ekstrakomptable	Dinas Kesehatan	Lain-lain Pendapatan Lainnya-LO	-868.109.100,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	Lain-lain Pendapatan Lainnya-LO	-9.372.000,00
Reklasifikasi dari Ekstrakomptable /Belanja Jasa Konsultan yang belum dikapitalisasi tahun 2020	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	-9.500.000,00
TOTAL			75.938.863.239,77